



PERUBAHAN

RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2023





BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- b. bahwa dikarenakan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta rencana program dan kegiatan, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 Nomor 16), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2022 KABUPATEN MUSI RAWAS SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023

BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023

BAB VI PENUTUP

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Isi beserta uraian Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini adalah merupakan

bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, **28 Juli** 2023

BUPATI MUSI RAWAS,



Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, **28 Juli** 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023 NOMOR **19**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala segala karunia dan kekuatan-Nya kita dapat menyelesaikan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2023.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2023, disusun dengan berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, serta mengacu pada RKP tahun 2023 dan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.

Sesuai fungsinya dokumen Perubahan RKPD merupakan dokumen perencanaan teknis operasional tahunan. Oleh karena itu perannya sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah dan menjadi pedoman dalam proses penganggaran RAPBD-P Kabupaten Musi Rawas tahun 2023. Untuk selanjutnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Musi Rawas harus mempedomani serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi/memaduserasikan rencana program dan kegiatan hingga pelaksanaannya.

Pada kesempatan ini juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD kabupaten Musi Rawas tahun 2023.

Muara Beliti, 20 Juli 2023



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii-iii
DAFTAR TABEL	iv-viii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1. Latar Belakang	I.1
1.2. Dasar Hukum	I.2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I.5
1.3.1 Hubungan Antara Dokumen Perencanaan.....	I.5
1.4. Maksud Dan Tujuan	I.8
1.4.1 Maksud	I.8
1.4.2 Tujuan.....	I.8
1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.....	I.9
BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun 2023	II.1
2.1. Pengantar	II.1
2.2. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan OPD.....	II.1
2.3. Target dan Realisasi Capaian Indikator Makro Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022.....	II.174
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III.1
3.1. Kondisi Ekonomi Daerah	III.1
3.2. Kerangka Keuangan Daerah.....	III.6
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023	IV.1
4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	IV.2
4.2. Tema dan Tematik Pembangunan Daerah Tahun 2023....	IV.4
4.3. Telaah Terhadap Dokumen Perencanaan untuk Penentuan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Tahun 2023	IV.8
4.3.1 Telaah Terhadap RKP 2023.....	IV.8
4.3.2 Telaah RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	IV.10
4.3.3 Telaah Terhadap Pemenuhan Janji Kepala Daerah Pada Saat Kampanye Yang Tertuang	

	Pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026	IV.10
4.3.4	Telaah Terhadap Pokok pikiran DPRD Kabupaten Musi Rawas.....	IV.17
4.3.5	Telaah Terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKP Tahun Sebelumnya	IV.17
4.3.6	Telaah Terhadap RTRW Kabupaten Musi Rawas	IV.19
4.3.7	Telaah Terhadap Isu Strategis	IV.22
4.4.	Prioritas, Sasaran, Arah Kebijakan, Program Prioritas Program Nomenklatur Pembangunan Daerah Tahun 2023	IV.23
4.5.	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 Dengan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2023.....	IV.41
4.5.1	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 Dengan Prioritas Nasional Tahun 2023.....	IV.41
4.5.2	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 Dengan Prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.....	IV.42
4.5.3	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2023.....	IV.43
4.6.	Strategi Pendukung Tujuan Pembangunan	IV.44
4.6.1	Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19.....	IV.44
4.6.2	Strategi Untuk Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG).....	IV.49
4.6.3	Strategi Untuk Mendukung Pelaksanaan SPM.....	IV.51
4.7	Arah Pengembangan Kecamatan	IV.52
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V.1
BAB VI	PENUTUP	VI.1

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan	II.2
Tabel 2.2	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan	II.9
Tabel 2.3	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan RS. Dr. Sobirin	II.15
Tabel 2.4	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas PU Bina Marga	II.16
Tabel 2.5	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan.....	II.28
Tabel 2.6	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II.51
Tabel 2.7	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Sat. Pol PP	II.54
Tabel 2.8	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Sosial	II.57
Tabel 2.9	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	II.61
Tabel 2.10	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II.63
Tabel 2.11	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan	II.67
Tabel 2.12	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Lingkungan Hidup .	II.70
Tabel 2.13	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II.74
Tabel 2.14	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	II.76
Tabel 2.15	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II.79
Tabel 2.16	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.....	II.86
Tabel 2.17	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM	II.89
Tabel 2.18	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	II.92
Tabel 2.19	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga.....	II.94
Tabel 2.20	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	II.96
Tabel 2.21	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	II.96
Tabel 2.22	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip.....	II.99

Tabel 2.23	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perikanan	II.101
Tabel 2.24	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan	II.103
Tabel 2.25	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan .	II.106
Tabel 2.26	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	II.108
Tabel 2.27	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Bagian Sekretariat Daerah Kab. Mura.....	II.111
Tabel 2.28	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Mura	II.117
Tabel 2.29	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	II.118
Tabel 2.30	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan kab. Mura.....	II.123
Tabel 2.31	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.....	II.125
Tabel 2.32	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.....	II.130
Tabel 2.33	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Inspektorat.....	II.131
Tabel 2.34	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	II.134
Tabel 2.35	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Bagian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	II.137
Tabel 2.36	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	II.141
Tabel 2.46	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan STL Ulu Terawas.....	II.142
Tabel 2.47	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Selangit	II. 144
Tabel 2.48	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Sumber Harta.....	II.146
Tabel 2.49	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Tugumulyo	II.148
Tabel 2.50	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Purwodadi.....	II.150
Tabel 2.51	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Muara Beliti	II.153
Tabel 2.52	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	II. 155
Tabel 2.53	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Jayaloka	II.156
Tabel 2.54	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Sukakarya.....	II. 159

Tabel 2.55	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Muara Kelingi.....	II.161
Tabel 2.56	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Tuah Negeri.....	II.162
Tabel 2.57	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Muara Lakitan.....	II.164
Tabel 2.58	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Megang Sakti.....	II.167
Tabel 2.59	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan BTS Ulu	II.170
Tabel 2.60	Target dan Realisasi Capaian Indikator Makro Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022	II.174
Tabel 3.1	PDRB Kabupaten Musi Rawas ADHB=2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2020 (Milyar Rupiah) dan Target 2023	III.3
Tabel 3.2	Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan Proyeksi Struktur Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2023	III.7
Tabel 3.3	Struktur Perubahan Belanja Daerah.....	III.9
Tabel 3.4	Struktur Pembiayaan Daerah	III.10
Tabel 4.1	Keterkaitan Misi dan Tujuan Pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026	IV.2
Tabel 4.2	Sasaran Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023	IV.3
Tabel 4.3	Tema dan Tematik Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023	IV.6
Tabel 4.4	Keselarasan Tema Pembangunan RKP Nasional Tahun 2023 dan Tema Pembangunan RKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan Musi Rawas Tahun 2023	IV.7
Tabel 4.5	Visi,Mis, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Sasaran RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 ..	IV.14
Tabel 4.6	Isu Strategis Pembangunan Daerah.....	IV.22
Tabel 4.7	Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023	IV.23
Tabel 4.8	Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023	IV.26
Tabel 4.9	Program Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023	IV.32
Tabel 4.10	Program Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023	IV.32
Tabel 4.11	Program Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.33

Tabel 4.12	Program Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.33
Tabel 4.13	Program Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.33
Tabel 4.14	Program Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.34
Tabel 4.15	Program Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.34
Tabel 4.16	Program Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.35
Tabel 4.17	Program Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.35
Tabel 4.18	Program Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.35
Tabel 4.19	Program Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.36
Tabel 4.20	Program Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.36
Tabel 4.21	Program Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.36
Tabel 4.22	Program Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.37
Tabel 4.23	Program Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.37
Tabel 4.24	Program Prioritas dan Targe Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.37
Tabel 4.25	Program Prioritas dan Targe Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.38
Tabel 4.26	Program Prioritas dan Targe Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.38
Tabel 4.27	Program Prioritas dan Targe Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.38
Tabel 4.28	Program Prioritas dan Targe Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.39
Tabel 4.29	Program Prioritas dan Targe Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.39
Tabel 4.30	Program Prioritas dan Targe Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.39
Tabel 4.31	Program Prioritas dan Targe Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.40
Tabel 4.32	Program Prioritas dan Targe Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2023	IV.40

Tabel 4.33	Sinkronisasi Prioritas Daerah Tahun 2023 Dengan Prioritas Provinsi Tahun 2023.....	IV.42
Tabel 4.34	Sinkronisasi Prioritas Daerah Tahun 2023 Dengan RPJMD Tahun 2021-2026	IV.43
Tabel 4.35	Korelasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Dalam Merespon Program SDGs.....	IV.48
Tabel 4.36	Dukungan Prioritas Daerah Terhadap Pengarusutamaan Gender	IV.51
Tabel 5.1	Rencana Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023	V.2
Tabel 5.2	Rekap Rencana Pendanaan Per Perangkat Daerah Perubahan Tahun anggaran 2023	V.4

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018- 2022..... III.1
Grafik 3.2	Perubahan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022..... III.2
Grafik 3.3	Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018-2022 dan Target Tahun 2023..... III.4
Grafik 3.4	Perubahan Proyeksi Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022..... III.4
Grafik 3.5	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi dan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020-2022 dan Target Tahun 2023..... III.5
Grafik 3.6	Perubahan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2022..... III.6

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan OPD	I.6
Gambar 4.1 Peta Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Rawas	IV.20

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah yang dituangkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dengan jangka waktu perencanaan tertentu, dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam pelaksanaan sampai dengan satu semester pada tahun perencanaan atau tahun berjalan (2023) ini telah ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan ke dua tahun 2023, dimana beberapa poin yang ditemukan, antara lain sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan;
4. Kegiatan baru yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah; serta

5. Percepatan pencapaian target pembangunan daerah, provinsi maupun nasional Tahun 2023 yang berdampak pada perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah disertai perubahan anggaran untuk mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan daerah sekaligus memberikan kontribusi bagi pencapaian target pembangunan provinsi, maupun nasional Tahun 2023.

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD;

Maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan, guna menampung seluruh perubahan dalam pendapatan, belanja, serta defisit dan pembiayaan anggaran, yang terjadi baik karena perubahan asumsi makro, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6794);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor

- 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 7).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

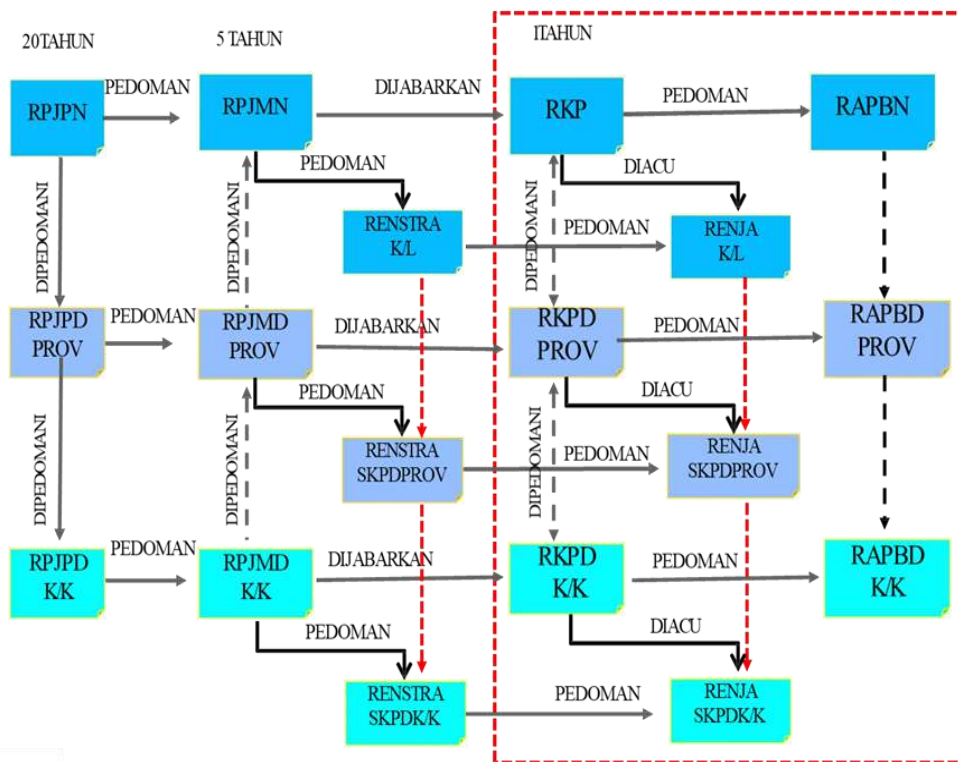
Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas yang dituangkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 sinkron dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dan dokumen perencanaan Kabupaten Musi Rawas.

1.3.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas yang dituangkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dan dokumen perencanaan Kabupaten Musi Rawas. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Skema hubungan antara dokumen di tiap tingkat pemerintahan disajikan pada Gambar berikut ini :

Gambar 1.1 Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan OPD



Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing - masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Secara lengkap penjelasan masing-masing dokumen yang terkait dengan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 juga disusun dengan memperhatikan pada kebijakan pada dokumen Pemutakhiran RKP Tahun 2023 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023. RKP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut sebagai acuan untuk mewujudkan sinergitas kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan memastikan bahwa prioritas nasional sudah terintegrasi dalam Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 memperhatikan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, guna mewujudkan sinergitas kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Rawas dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, sehingga kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 akan mendukung kebijakan pembangunan jangka menengah di tingkat provinsi.

3. Rancangan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Guna mewujudkan sinergitas kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Rawas dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas tidak bertentangan dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, untuk itu penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 mengacu pada dokumen Rancangan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026

Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 merupakan penjabaran Tahun ke tiga RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas periode 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Bupati Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021.

5. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD)

Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat program dan kegiatan pembangunan dalam rangka

pelaksanaan urusan pemerintahan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026. Renstra OPD tersebut sebagai pedoman penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2023.

6. Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)

Perubahan RKPD Tahun 2023 akan menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun dokumen Perubahan Renja OPD Tahun 2023 sebagai rencana pembangunan tahunan di tingkat perangkat daerah sesuai dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata perangkat daerah.

1.4. Maksud Dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Perubahan RKPD Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan, yaitu Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas. Perubahan RKPD Tahun 2022 Kabupaten Musi Rawas sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan Kabupaten Musi Rawas dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam tahapan perubahan di tahun 2023.

Perubahan RKPD Tahun 2023 memuat dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi pembangunan sampai semester 1(satu), dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan tahun 2023.

1.4.2. Tujuan

Perubahan RKPD Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas ditujukan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD Tahun 2023. Penyusunan ini juga bertujuan untuk merangsang partisipasi publik dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi proses pembangunan.

Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut :

- a. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.
- b. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Musi Rawas tahun 2023
- c. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023, sebagai dasar dari penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Musi Rawas.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 349, disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
- c. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
- e. Rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
- f. Penutup

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2023

2.1. Pengantar

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Evaluasi hasil RKPD tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas sampai dengan Semester I Tahun 2022 dilakukan melalui analisa capaian Kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan menghitung rerata indikator kegiatan. Rerata indikator capaian dihitung dengan membandingkan capaian pada bulan Juni program kegiatan tahun 2023 pada tiap OPD dengan capaian yang harus dicapai pada bulan Juni tahun 2023 dalam satuan persentase atau dengan notasi sebagai berikut: ***Rerata indikator capaian= (Nilai yang dicapai bulan Juni 2023 / target bulan Juni 2023) x 100%***.

Nilai dari hasil perhitungan di setiap indikator kegiatan menjadi Nilai dari Kegiatan (Rerata indikator kinerja maupun Rerata Indikator capaian). Selanjutnya nilai dari setiap program, pada akhirnya juga menjadi nilai dari setiap OPD (Rerata indikator kinerja maupun Rerata Indikator capaian).

2.2 Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Berdasarkan OPD

Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2023 berdasarkan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas selengkapnya tersaji pada uraian berikut:

1. Dinas Pendidikan

Tabel 2.1
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Pendidikan

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	316.917.501.341	169.455.808.398	53,47%	
Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	164.849.100	8.875.592	5,38%	47%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.776.390	2.383.692	5,32%	57%
Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	26.792.600	6.491.900	24,23%	80%
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	12.315.660	-	0,00%	80%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	13.091.000	-	0,00%	20%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48.151.000	-	0,00%	33%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.722.450	-	0,00%	20%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	313.180.314.496	168.870.598.163	53,92%	36%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	312.936.379.046	168.805.298.163	53,94%	43%
Pelaksana Penatausahaan dan Penunjang/Verifikasi Keuangan SKPD	192.861.000	65.300.000	33,86%	57%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	51.074.450	-	0,00%	22%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.000.000	-	0,00%	0%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000	-	0,00%	0%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	105.780.500	-	0,00%	0%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30.780.500	-	0,00%	0%

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000	-	0,00%	0%
Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	618.661.195	172.339.351	27,86%	10%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.500.000	-	0,00%	0%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	50.000.000	-	0,00%	0%
Penyediaan bahan Logistik Kantor	114.994.545	63.015.500	54,80%	33%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.000.000	13.239.000	52,96%	50%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	103.000.000	19.000.000	18,45%	25%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	313.166.650	77.084.851	24,61%	29%
			0,00%	16%
			0,00%	8%
Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	801.279.000	201.640.392	25,16%	15%
Penyediaan jasa surat menyurat	50.000.000	25.000.000	50,00%	50%
		-	0,00%	0%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	128.959.000	48.140.392	37,33%	50%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	622.320.000	128.500.000	20,65%	11%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.946.617.050	202.354.900	10,40%	5%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.772.500	-	0,00%	0%
Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	1.566.444.550	166.804.900	10,65%	0%

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.400.000	35.550.000	50,50%	14%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	215.000.000	-	0,00%	0%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	105.796.230.255	-	0,00%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	105.587.674.105	971.408.550	0,00%	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	105.587.674.105	971.408.550	0,92%	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	58.629.345.210	170.000.000	0,29%	
Penambahan Ruang Kelas Baru	520.000.000	-	0,00%	0%
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	422.709.450		0,00%	0%
Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	244.849.200		0,00%	0%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	854.000.000	-	0,00%	0%
Rehabilitasi sedang berat ruang kelas	2.518.800.848		0,00%	0%
Rehabilitasi sedang berat Ruang Guru/ Ruang kepala sekolah /TU	384.479.250		0,00%	0%
Rehabilitasi sedang berat perpustakaan sekolah	382.541.250		0,00%	0%
Rehabilitasi sedang berat sarana prasarana dan utilitas sekolah	326.122.650		0,00%	0%
Pengadaan perlengkapan sekolah	3.369.750.000		0,00%	0%
Pengadaan Perlengkapan Siswa	6.071.800.000	-	0,00%	0%
Pengadaan Perlengkapan Sekolah			#DIV/0!	

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	127.315.100	-	0,00%	0%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	414.313.460	-	0,00%	0%
				0%
				0%
Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar	845.920.000	170.000.000	20,10%	17%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	120.000.000	-	0,00%	0%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.402.715.650	-	0,00%	0%
				0%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	39.852.400.000		0,00%	0%
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar	75.000.000	-	0,00%	0%
Pembangunan Laboratorium Sekolah dasar	696.628.352		0,00%	100%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	36.006.706.553	526.302.300	1,46%	4%
Penambahan Ruang Kelas Baru	200.000.000	-	0,00%	0%
Pembangunan Laboratorium	1.052.971.650		0,00%	0%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.187.259.500	-	0,00%	0%
	-	-	0,00%	0%
Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah	1.442.470.350		0,00%	0%
Rehabilitasi sedang berat runag guru sekolah	335.671.100		0,00%	0%
Rehabilitasi sedang berat ruang unit kesehatan sekolah	47.955.150		0,00%	0%

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
Rehabilitasi sedang berat ruang laboratorium sekolah	377.636.400		0,00%	0%
Rehabilitasi sedang berat sarana prasarana utilitas sekolah	136.103.650		0,00%	0%
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.575.876.328	-	0,00%	0%
Pengadaan Perlengkapan Siswa	5.935.400.000	-	0,00%	0%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	106.644.725	19.162.300	17,97%	17%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.408.610.500	507.140.000	36,00%	36%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	60.000.000	-	0,00%	0%
Pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama	19.352.200.000		0,00%	0%
Rehab sedang bearat ruang TU	691.999.000		0,00%	0%
Rehab sedang bearat ruang Kepala Sekolah	95.908.200		0,00%	0%
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.675.091.282	255.000.000	2,64%	2%
Pembangunan sarana prasarana dan utilitas PAUD	611.844.500		0,00%	0%
Rehabilitasi sedang berat gedung/ruang kelas/ ruang guru PAUD	363.203.050		0,00%	0%
Rehabilitasi sedang/ berat sarana prasarana dan utilitas PAUD	98.924.450		0,00%	0%
Pengadaan Perlengkapan PAUD	50.000.000	-	0,00%	0%
Pengadaan Perlengkapan siswa PAUD	265.489.737	-	0,00%	0%
				0%

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan PAUD	905.469.500	255.000.000	28,16%	3%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	2.255.000.000	-	0,00%	0%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	310.760.045	-	0,00%	0%
				0%
Pengelolaan dana BOP PAUD	4.814.400.000		0,00%	0%
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.276.531.060	20.106.250	1,58%	0%
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal /Kesetaraan	1.212.000.000	-	0,00%	0%
Penyelenggaraan ujian bagi peserta didik PAUD/Nonformal	64.531.060	20.106.250	31,16%	0%
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	124.727.350	-	0,00%	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	110.000.000	-	0,00%	0%
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	55.000.000	-	0,00%	0%
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	55.000.000	-	0,00%	0%
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	14.727.350	-	0,00%	0%
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	14.727.350	-	0,00%	0%
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	51.268.800	-	0,00%	

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	51.268.800	-	0,00%	0%
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	51.268.800	-	0,00%	0%
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	16.485.700	-	0,00%	
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat	16.485.700	-	0,00%	0%
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	16.485.700	-	0,00%	0%
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	16.074.300	-	0,00%	
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.074.300	-	0,00%	0%
Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	16.074.300	-	0,00%	0%
JUMLAH	422.713.731.596	170.427.216.948	40,32%	1,08%

2. Dinas Kesehatan

Tabel 2.2
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Kesehatan

Prioritas Program dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	87.911.897.152,00	34.565.303.088,00	39,32	28,45
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	282.000.000,00	31.236.600,00	11,08	53,23
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	94.600.000,00	5.947.100,00	6,29	14,29
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000,00	3.043.300,00	20,29	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16.000.000,00	5.615.700,00	35,10	66,67
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.000.000,00	2.237.900,00	18,65	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	12.000.000,00	2.383.300,00	19,86	33,33
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	62.800.000,00	3.568.700,00	5,68	33,33
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.600.000,00	8.440.600,00	12,13	25
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	61.915.969.990,00	32.555.684.052,00	52,58	44,44
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	61.525.609.990,00	32.427.152.552,00	12,13	50,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	365.360.000,00	118.591.300,00	13,13	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	25.000.000,00	9.940.200,00	39,76	33,33
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000,00	9.927.520,00	49,64	50,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000,00	9.927.520,00		50
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	-	0,00	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000,00			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	877.500.000,00	4.460.200,00	0,51	18,12

Prioritas Program dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	4.460.200,00	17,84	17,84
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	121.000.000,00	-	0,00	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000,00	-	0,00	0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.500.000,00	1.242.400,00	7,53	7,53
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	2.950.000,00	17,84	50,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000,00	162.632.980,00	17,84	33,33
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000,00	902.948.308,00	1805,90	-
Pengadaan Mebel	50.000.000,00	-	0	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.232.845.180,00	899.619.308,00	72,97	38,88
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	3.329.000,00	16,65	16,65
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	471.995.180,00	236.364.646,00	50,08	50,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	740.850.000,00	420.176.162,00	56,72	50,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	610.000.000,00	161.427.100,00	26,46	22,89
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000,00	78.322.400,00	39,16	50,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000,00	83.104.700,00	41,55	41,55
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00		-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	180.000.000,00		-	
Peningkatan Pelayanan BLUD	22.823.581.982,00	8.246.683.733,57	36,13	-

Prioritas Program dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	22.823.581.982,00	8.246.683.733,57	36,13	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	38.605.956.312,00		0	25,19
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.380.000.000,00	29.055.600,00	0,66	5,56
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	200.000.000,00	-	0	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	200.000.000,00	-	0	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	300.000.000,00	-	0	
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	300.000.000,00	-	0	
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	200.000.000,00	29.055.600,00	14,53	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.500.000.000,00	-		
Pengadaan Obat, Vaksin	750.000.000,00	-		
Pengadaan Bahan Habis Pakai	580.000.000,00	-		
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	350.000.000,00	19.345.000,00	5,53	50,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.691.725.032,00	10.045.997.810,00	29,82	45,22
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20.000.000,00	-	0,00	50,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	20.000.000,00	614.500,00	3,07	50,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	20.000.000,00	-	0,00	50,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	20.000.000,00	-	0,00	50,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12.050.000,00	-	0,00	50,00
	20.000.000,00	-	0,00	50,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	18.500.000,00	1.472.600,00	7,96	50,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	20.000.000,00	10.924.900,00	54,62	50,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	20.000.000,00	1.999.750,00	10,00	50,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	20.000.000,00	1.999.800,00	10,00	50,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	20.000.000,00	4.438.700,00		50,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	20.000.000,00	14.862.700,00	74,31	50,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	20.000.000,00	3.100.000,00	15,50	50,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	20.000.000,00	-	0,00	50,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20.000.000,00	-	0,00	50,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	50.000.000,00	-	0,00	50,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	20.000.000,00	4.965.200,00	24,83	24,83
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	150.000.000,00	70.619.550,00	47,08	47,08
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	50.000.000,00	18.711.750,00	37,42	37,42
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	31.948.555.562,00	9.813.188.993,00	30,72	30,72
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	11.541.800,00	-	0,00	
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	971.077.670,00	55.756.000,00	5,74	50,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	200.000.000,00	43.343.367,00	21,67	50,00
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	20.000.000,00	-	0,00	-
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	20.000.000,00	-	0,00	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	514.231.280,00	57.019.400,00	11,09	50,00
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	514.231.280,00	57.019.400,00	11,09	50,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.730.750.000,00	1.594.155.000,00	42,73	50,00
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	8.600.000,00	17,20	50,00
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	25.000.000,00	6.700.000,00	26,80	50,00
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	25.000.000,00	1.900.000,00	7,60	50,00
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	3.630.750.000,00	1.568.750.000,00	43,21	50,00
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	20.000.000,00	8.000.000,00	40,00	50,00
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	3.590.750.000,00	1.560.750.000,00	43,47	50,00
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	20.000.000,00	-	0,00	50,00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	16.805.000,00	33,61	50,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	-	0,00	50,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	60.000.000,00	15.427.500,00	25,71	50,00
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20.000.000,00	1.377.500,00	6,89	50,00
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20.000.000,00	1.377.500,00	6,89	50,00
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	20.000.000,00	4.000.000,00	20,00	50,00
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	20.000.000,00	4.000.000,00	20,00	50,00
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	20.000.000,00	10.050.000,00	50,25	50,00
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	20.000.000,00	10.050.000,00	50,25	50,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	60.000.000,00	3.933.000,00	6,56	50,00
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	2.350.000,00	7,83	50,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	30.000.000,00	2.350.000,00	7,83	50,00
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	1.583.000,00	5,28	50,00
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	30.000.000,00	1.583.000,00	5,28	50,00
JUMLAH	130.368.603.464,00	36.178.818.588,00	27,75	40,73

3. Rs. Dr. Sobirin

Tabel 2.3

Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan RS. Dr. Sobirin

Prioritas Program Dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.348.287	-	0,00%	0,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.810.746.392	13.902.000.831	53,86%	53,86%
Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	121.080.000	56.460.000	46,63%	46,63%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

Prioritas Program Dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.500.000.000	524.374.745	34,96%	34,96%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	650.400.000	302.050.000	46,44%	46,44%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota				
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	300.000.000	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9.514.463.000	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Bahan Habis Pakai	200.000.000	-	0,00%	0,00%
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				
Pengelolaan Pelayanan kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat Bencana dan/atau Berpotensi bencana	100.000.000	-	0,00%	0,00%
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3.361.122.883	1.160.723.650	34,53%	34,53%
Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM diwilayah kabupaten/kota				
Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	1.215.000.000	409.000.000	33,66%	33,66%
JUMLAH	42.774.160.562	16.354.609.226	38,23%	38,23%

4. Dinas PU Bina Marga

Tabel 2.4
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas PU Bina Marga

Prioritas Program Dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.366.823.046,00	2.989.729.123,00	46,96	46,96
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.541.000,00	15.714.800,00	35,28	35,28

Prioritas Program Dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	4
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.394.000,00	4.664.800,00	40,94	40,94
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.110.000	4.310.000,00	70,54	70,54
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.285.000	0,00	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.984.000	3.184.000,00	63,88	63,88
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.398.000	0,00	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.370.000,00	3.556.000,00	37,95	37,95
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.054.637.267,00	2.354.666.576,00	58,07	58,07
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.900.077.267	2.305.148.576,00	59,11	59,11
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	154.560.000	49.518.000,00	32,04	32,04
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000	0,00	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	512.404.779,00	173.716.024,00	33,90	33,90
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.500.000	12.240.000,00	59,71	59,71
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	81.904.779	55.933.230,00	68,29	68,29
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.000.000	8.750.000,00	25,00	25,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375.000.000	96.792.794,00	25,81	25,81
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	100.000.000	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	789.160.000,00	335.092.049,00	42,46	42,46
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000	43.349.255,00	54,19	54,19

Prioritas Program Dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	4
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	15.000.000	8.989.000,00	59,93	59,93
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	694.160.000	282.753.794,00	40,73	40,73
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	666.080.000,00	110.539.674,00	16,60	16,60
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.000.000	22.770.902,00	15,18	15,18
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.000.000	45.788.772,00	38,16	38,16
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	267.000.000	18.000.000,00	6,74	6,74
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.880.000	18.300.000,00	40,78	40,78
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	34.200.000	5.680.000,00	16,61	16,61
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	0,00	0,00	0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	280.063.500.000,00	18.949.961.248,00	6,77	0,18
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	280.063.500.000,00	18.949.961.248,00	6,77	0,18
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	666.500.000,00	145.592.898,00	21,84	23,74
Jasa Konsultansi Perencanaan Jembatan Kabupaten	348.000.000	0,00	0,00	0,00
Jasa Konsultasi Perencanaan Jalan Kabupaten	93.000.000	0,00	0,00	13,56
Perencanaan Jalan dan Jembatan	225.500.000	145.592.898,00	64,56	64,56
Pengelolaan Leger Jalan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Patok Leger Jalan dan Papan Nama Jembatan	50.000.000	0,00	0,00	0,00
Administrasi Pekerjaan Pengelolaan Leger Jalan	10.000.000	0,00	0,00	0,00
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	189.000.000,00	0,00	0,00	10,76

Prioritas Program Dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	4
Survei Kondisi Jalan	93.000.000	0,00	0,00	13,56
Survei Kondisi Jembatan	57.000.000	0,00	0,00	13,56
Administrasi Pekerjaan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	39.000.000	0,00	0,00	0,00
Pelebaran Jalan Menuju Standar	17.517.000.000,00	1.032.600.000,00	5,89	0,00
Peningkatan Kapasitas Jalan Tanjung - Binjai (K.003)	7.000.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Kapasitas Jalan Marga Tunggal - Ngestikarya (K.106)	2.000.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Kapasitas Jalan Ngestikarya - Marga Tani (K.106)	1.500.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Kapasitas Jalan Simp Gajah - Tapa (K.077)	3.450.000.000	1.032.600.000,00	29,93	0,00
Peningkatan Kapasitas Jalan B.Srikaton - C.Nawangasasi - M.Sitiharjo	3.000.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Kapasitas Jalan Purwodadi - Sadarkarya - Trikarya (K.031)	200.000.000	-	0,00	0,00
Jasa Konsultansi Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar	337.000.000	0,00	0,00	5,37
Administrasi Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar	30.000.000	0,00	0,00	0,00
Rekonstruksi Jalan	198.139.000.000,00	9.129.600.000	4,61	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Bamasco - Dangku (K.048)	5.000.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Q.1 Tambah Asri - Spg. Semambang (K.024)	11.000.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Pasar Muara Kelingi - Spg. Temuan Jaya (K.094)	10.000.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Jajaran Baru I - Kebun Kulim (K.087)	8.000.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Tugu Sempurna - Marga Sakti (K.084)	7.000.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Dharma Sakti - Simpang Gading (K.039)	7.000.000.000	-	0,00	0,00

Prioritas Program Dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	4
Peningkatan Jalan Mambang - Simpang Gajah (K.044)	7.000.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Jayaloka - Griyoso (K.114)	1.000.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan S. Kertosari - U.1 Pagar Sari (K.136)	1.950.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan U1. Pagar Sari - Sumber Sari (K.041)	500.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Sukamaju - Jambu Rejo (K.012)	1.500.000.000	449.100.000,00	29,94	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Jambu Rejo - Sukarami (K.012)	1.500.000.000	448.980.000,00	29,93	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Sp. Kosgoro - Kosgoro (K.025)	2.000.000.000	598.800.000,00	29,94	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Purwodadi - Trikarya (K.048)	1.431.000.000	426.990.000,00	29,84	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Trikarya - Megang Sakti II (K.048)	1.450.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Lubuk Ngin - Padang Lalang (K.024)	1.500.000.000	449.220.000,00	29,95	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Padang Lalang - Srimulyo (K.024)	1.450.000.000	434.490.000,00	29,96	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Pasar Megang Sakti - Jajaran Baru I (K.047)	1.450.000.000	434.100.000,00	29,94	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Jajaran Baru I - Muara Megang (K.047)	2.000.000.000	599.310.000,00	29,97	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Dangku - Tapa - Lubuk Tua (K.076)	2.900.000.000	869.190.000,00	29,97	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Lubuk Tua - Tugu Sempurna (Eks TMMD) (K.084)	2.900.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan T2. Purwakarya - T1. Bangun Sari (K.042)	2.000.000.000	599.400.000,00	29,97	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Srimulyo - Srikemuning (K.023)	2.000.000.000	599.250.000,00	29,96	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Mulyosari - Padang Lengkuas (K.063)	500.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Padang Lengkuas - Rantau Kasih (K.063)	1.000.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan SP.3 Mekarsari - SP.2 Karyamulya (K.022)	500.000.000	-	0,00	0,00

Prioritas Program Dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	4
Peningkatan Struktur Jalan Griyoso - Simp Gunung Kembang (K.114)	2.450.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Cempaka Bamasco (K.118)	2.000.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Sukamerindu - SP.2 Karyamulya (K.022) (TMMD)	950.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Q2 Wonerejo - Bumi Agung (K.134)	400.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Sadar Karya - Leban Jaya (K.035)	300.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan G2 Dwijaya - Sadar Karya (K.040)	300.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan U2 Karyadadi - Trikarya (K.034)	500.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Spg. Pangkalan Tarum - SP.8 Trijaya (K.099/K.100)	3.000.000.000	898.500.000,00	29,95	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Spg. Gunung Kembang - Kembang Tanjung - Bts. Empat Lawang (K.098)	3.000.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Dalam Kecamatan BTS Ulu	2.000.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Sukowono - Ngestiboga 1 - Marga Tani (K.086/K.087)	2.000.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Giriyo - Ngestiboga 2 (K.084)	3.000.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Dalam Kecamatan Jayaloka	2.250.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Megang Sakti - Jajaran Baru 1 - SP.4 Campur Sari (K.065/K.048)	5.000.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan SP.1 Rejosari - SP.5 Tegal Sari (K.053)	2.500.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Dangku - Pagar Ayu - Lubuk Tua	2.750.000.000	823.800.000,00	29,96	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Trisakti - Megang Sakti I	2.000.000.000	599.250.000,00	29,96	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Sukajaya - Sumber Rejo - Wonosari	2.000.000.000	-	0,00	0,00

Prioritas Program Dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	4
Peningkatan Struktur Jalan Dalam Kecamatan Megang Sakti	2.250.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Kerambil - Mandi Aur (K.127)	2.750.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Spg Tapa - Karya Sakti	3.000.000.000	899.220.000,00	29,97	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Dalam Kecamatan Muara Kelingi	2.250.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Dalam Kecamatan Muara Beliti	1.750.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Dalam Kecamatan Purwodadi	2.250.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Dalam Kecamatan Selangit	1.500.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Simp Sukamana - Sukamerindu (K.062)	2.750.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Dalam Kecamatan STL Ulu Terawas	1.500.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Ciptodadi - Rantau Alih - Ngestiboga I (K.094/K.092)	2.750.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Ciptodadi 1 - Sukarena (K.095)	3.000.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Dalam Kecamatan Sukakarya	2.250.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Dalam Kecamatan Tuah Negeri	2.500.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Dalam Kecamatan Muara Lakitan	2.250.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Sumber Harta - Jamburejo (K.038)	1.500.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Dalam Kecamatan Sumber Harta	2.000.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan L. Sidoharjo - V. Surodadi (K.014)	2.000.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan F. Trikoyo - Kalibening - V. Surodadi (K.015)	2.000.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Dalam Kecamatan Tugumulyo	2.250.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Spg. Gegas - Sugih Waras (K.076)	3.000.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Struktur Jalan Dalam Kecamatan TPK	1.500.000.000	-	0,00	0,00

Prioritas Program Dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	4
Peningkatan Jalan Desa Dharma Sakti	300.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Sadu	400.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Lubuk Pandan	500.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Prabumulih I	1.000.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Bingin Jungut	500.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Semeteh	800.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Banpres	400.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Kosgoro	300.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa U.2 Karyadadi	200.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Lubuk Muda	500.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Petrans Jaya	500.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Tanah Periuk	200.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Muara Rengas	400.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Anyar	400.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Semangus Lama (Dusun Panglero)	400.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Rantau Alih	300.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa R. Rejosari	200.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Anyar (Kec. Muara Lakitan)	800.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Ngestiboga II (Kec. Jayaloka)	800.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Ngestiboga II	600.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Tri Jaya	350.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Kota Baru	350.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Pangkalan Tarum	300.000.000	-	0,00	0,00

Prioritas Program Dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	4
Peningkatan Jalan Desa Sukarena	500.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Bangun Sari	200.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Trikarya (Dusun I)	200.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Babat	500.000.000,00	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Leban Jaya	400.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Ngestikarya	450.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Beliti Jaya (Muara Kelingi)	800.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Tugu Sempurna (Kec. Muara Kelingi)	800.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Beliti Jaya	500.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Tugu Sempurna	300.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Karya Teladan	300.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Marga Baru	900.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Sidomulyo	900.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Pelita Jaya	900.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Tanjung	500.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Lubuk Tua	500.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Semangus Baru	300.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Kelurahan Muara Lakitan	350.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Lubuk Rumbai	800.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Bamasco	400.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Prabumulih II	500.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Air Satan	150.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Air Lesing	150.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Sungai Naik	900.000.000	-	0,00	0,00

Prioritas Program Dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	4
Peningkatan Jalan Kelurahan Sumber Harta	500.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Madang	600.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Trikarya	1.000.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Megang Sakti V	450.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Kelurahan Pasar Muara Beliti	200.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Jajaran Baru II	150.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa E. Wonokerto	500.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Q.1 Tambah Asri (Dusun 3)	500.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Wonorejo (Dusun V)	400.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Pulau Panggung	200.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Kelurahan B. Srikaton	500.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Pasenan	300.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa A. Widodo (Akses Jalan Menuju Masjid As-Sunnah)	450.000.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Jalan Desa Margoyoso	500.000.000	-	0,00	0,00
Jasa Konsultasi Pengawasan Rekonstruksi Jalan I	337.000.000	0,00	0,00	0,00
Jasa Konsultasi Pengawasan Rekonstruksi Jalan II	203.000.000	0,00	0,00	0,00
Jasa Konsultasi Pengawasan Rekonstruksi Jalan III	203.000.000	0,00	0,00	0,00
Administrasi Pekerjaan Rekonstruksi Jalan	515.000.000	0,00	0,00	0,00
Pemeliharaan Berkala Jalan	23.203.000.000,00	2.973.600.000,00	12,82	0,12
Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan Kabupaten Zona I (Spj Temelat - Marga Tani)	2.500.000.000	747.000.000,00	29,88	0,00
Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan Kabupaten Zona II (Mataram - L. Sidoharjo / Mataram Dusun 7/O. Mangunharjo - G 2 Dwijaya)	2.500.000.000	747.600.000,00	29,90	0,00

Prioritas Program Dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	4
Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan Kabupaten Zona III (Pasar Muara Kelingi - Temuan Jaya)	2.500.000.000	747.000.000,00	29,88	0,00
Pemeliharaan Berkala Jalan O Mangunharjo - Pasar Megang Sakti (K.047)	1.500.000.000	-	0,00	0,00
Pemeliharaan Berkala Jalan O. Mangunharjo - G2. Dwijaya (K.039)	1.450.000.000	433.500.000,00	29,90	0,00
Pemeliharaan Berkala Jalan G2. Dwijaya - Sadarkarya (K.040)	1.000.000.000	298.500.000,00	29,85	0,00
Pemeliharaan Berkala Jalan Megang Sakti II - Megang Sakti IV (Benai) (K.059)	2.000.000.000	-	0,00	0,00
Pemeliharaan Berkala Jalan Spg. 4 Polres - F. Trikoyo (K.001/K.002)	3.000.000.000	-	0,00	0,00
Pemeliharaan Jalan Berkala Bundaran AC - Tanah Periuk (K.003)	2.500.000.000	-	0,00	0,00
Pemeliharaan Jalan Berkala G1. Mataram - Air Deras (K.017)	2.500.000.000	-	0,00	0,00
Pemeliharaan Jalan G1. Mataram - G2. Dwijaya - Q2. Wonorejo (K.018)	1.500.000.000	-	0,00	0,00
Jasa Konsultasi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan	203.000.000	0,00	0,00	13,56
Administrasi Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan	50.000.000	0,00	0,00	0,00
Pemeliharaan Rutin Jalan	600.000.000,00	293.468.350,00	48,91	48,91
Operasioanal UPT	600.000.000	293.468.350,00	48,91	48,91
Pembangunan Jembatan	19.427.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pembangunan Jembatan Gantung Multifungsi Sungai Musi Desa Pelawe	13.500.000.000	0,00	0,00	0,00
Pembangunan Jembatan Besi Desa Sadarkarya	500.000.000	0,00	0,00	0,00
Pembangunan Jembatan Besi Desa V. Surodadi	200.000.000	0,00	0,00	0,00

Prioritas Program Dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	4
Pembangunan Jembatan Gantung Mambang	1.300.000.000	0,00	0,00	0,00
Pembangunan Box Culvert Desa SP.2 Karya Mulya (K.022)	500.000.000	0,00	0,00	0,00
Pembangunan Box Culvert Desa V Surodadi (K.126)	500.000.000	0,00	0,00	0,00
Pembangunan Box Culvert Desa Donorejo (K.114)	500.000.000	0,00	0,00	0,00
Pembangunan Box Culvert Desa Griyoso (K.114)	500.000.000	0,00	0,00	0,00
Pembangunan Box Culvert Desa Purwodadi (K.108)	500.000.000	0,00	0,00	0,00
Pembangunan Box Culvert Desa U2. Karyadadi (K.047)	500.000.000	0,00	0,00	0,00
Pembangunan Box Culvert Desa Ciptodadi I (K.128)	500.000.000	0,00	0,00	0,00
Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Jembatan	337.000.000	0,00	0,00	0,00
Administrasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan	90.000.000	0,00	0,00	0,00
Penggantian Jembatan	19.547.000.000,00	5.375.100.000,00	27,50	0,00
Penggantian Jembatan Sungai Pering (K.105)	11.500.000.000,00	3.434.100.000,00	29,86	0,00
Penggantian Box Culvert Desa Ngestiboga I	1.170.000.000,00	-	0,00	0,00
Penggantian Jembatan Air Pelai	6.500.000.000,00	1.941.000.000,00	29,86	0,00
Jasa Konsultansi Pengawasan Penggantian Jembatan	337.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Administrasi Pekerjaan Penggantian Jembatan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitasi Jembatan	615.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Sukamenang	100.000.000	0,00	0,00	0,00
Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Pedang	500.000.000	0,00	0,00	0,00
Administrasi Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan	15.000.000	0,00	0,00	0,00

Prioritas Program Dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	4
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	286.430.323.046,00	21.939.690.371,00	7,66	1,22

5. Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan

Tabel 2.5
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.486.769.098,00	11.768.658.674	21,21%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	450.000.000,00	67.202.200	14,93%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	290.811.800,00	44.988.400	15,47%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.000.000,00	44.988.400	59,98%	54,55 %
Perencanaan dan Pengawasan Teknis	215.811.800,00	-	0,00%	15,35 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	8.267.700,00	3.785.500,00	45,79%	50,00 %

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	9.857.100,00	-	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	6.744.200,00	3.022.400,00	44,81%	50,00 %
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.303.600,00	-	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.015.600,00	1.886.000,00	26,88%	33,33 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.000.000,00	13.519.900,00	11,27%	
Evaluasi Kinerja	70.000.000,00	13.519.900,00	19,31%	21,43 %
Pengendalian Teknis Kegiatan Perangkat Daerah	50.000.000,00	-	0,00%	5,88%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.862.506.850,00	6.215.757.962	52,40%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.635.506.850,00	6.215.757.962	53,42%	53,57
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200.000.000,00	-	0,00%	25,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	27.000.000,00	-	0,00%	11,11
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000,00	-	0,00%	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	50.000.000,00	-	0,00%	7,69%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.000.000,00	-	0,00%	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.640.000.000,00	149.057.953,00	9,09%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	-	0,00%	0,00%

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	225.000.000,00	825.000,00	0,37%	1,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	-	0,00%	20,00 %
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	75.000.000,00	39.725.000,00	52,97%	52,98 %
Penyediaan Bahan/Material	1.300.000.000,00	-	0,00%	
Pengadaan Material Listrik dan LPJU di Kabupaten Musi Rawas	500.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000,00	108.507.953,00	36,17%	41,67 %
Pengadaan Tawas	500.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.297.914.100,00	-	0,00%	
Pengadaan Mebel	70.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.577.914.100,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Komplek Rumah Dinas Bupati Musi Rawas di Muara Beliti	-	-		0,00%
Pembangunan Komplek Rumah Dinas Bupati Musi Rawas di Muara Beliti	25.077.914.100,00	-	0,00%	2,00%
Pembangunan Trotoar di Muara Beliti	1.500.000.000,00		0,00%	0,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.650.000.000,00	-	0,00%	
Pembangunan Gedung Barang Bukti Polres di Muara Beliti	700.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Pagar Kantor BNN Musi Rawas di Muara Beliti	300.000.000,00		0,00%	0,00%
Pembangunan dan Rehabilitasi Pagar Kantor Polres Musi Rawas di Muara Beliti	500.000.000,00		0,00%	0,00%
Pembangunan Gedung Pos Jaga Kantor Polres Musi Rawas di Muara Beliti	500.000.000,00		0,00%	0,00%

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Pembangunan Pagar Kantor UPT Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan Muara Beliti	250.000.000,00		0,00%	0,00%
Pembangunan Pagar SMA Negeri 8 Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti	400.000.000,00		0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.688.569.180,00	3.272.377.594,00	57,53%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00	-	0,00%	8,77%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.360.354.181,00	2.699.167.594,00	61,90%	54,17%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.639.999,00	2.800.000,00	10,51%	25,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.276.575.000,00	570.410.000,00	44,68%	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.280.000.000,00	53.603.000,00	4,19%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000,00	31.568.000,00	31,57%	50,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	100.000.000,00	22.035.000,00	22,04%	50,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.080.000.000,00	-	0,00%	
Rehabilitasi Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) Simpang Gegas	380.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Rehabilitasi Gedung Dharma Wanita Kabupaten Musi Rawas	100.000.000,00		0,00%	0,00%
Pemeliharaan Rumah Dinas Polres Musi Rawas di Muara Beliti	600.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Peningkatan Pelayanan BLUD	5.152.778.968,00	2.010.659.965,00	39,02%	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.152.778.968,00	2.010.659.965,00	39,02%	41,67%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.790.000.000,00	856.863.417,00	22,61%	
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.600.000.000,00	2.278.000,00	0,14%	
Peningkatan Tanggul Sungai	900.000.000,00	-	0,00%	
Perkuatan Tebing Sungai Musi Kelurahan Muara Lakitan Kecamatan Muara Lakitan	300.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Tembok Penahan Tanah Desa M. Sitiharjo	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Tembok Penahan Tanah Desa P1. Mardiharjo	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Tembok Penahan Tanah Desa K. Kalibening	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Normalisasi/Restorasi Sungai	550.000.000,00	-	0,00%	
Normalisasi Sungai Desa L Sidoarjo	249.695.801,00	-	0,00%	0,00%
Normalisasi Sungai Desa J Ngadirejo	300.304.199,00	-	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	2.278.000,00	1,52%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota (Komisi Irigasi)	150.000.000,00	2.278.000,00	1,52%	41,67%
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.190.000.000,00	854.585.417,00	39,02%	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	500.000.000,00	-	0,00%	
Studi Kelayakan Daerah Irigasi Baru Desa Mangan Jaya Kecamatan Muara Kelingi	100.000.000,00	-	0,00%	0,00%
DED Daerah Irigasi Baru Desa Mangan Jaya Kecamatan Muara Kelingi	300.000.000,00	-	0,00%	0,00%
UKL / UPL Daerah Irigasi Baru di Kecamatan Muara Kelingi	100.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.550.000.000,00	812.553.229,00	52,42%	
Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	1.550.000.000,00	812.553.229,00	52,42%	50,00 %
Operasional Unit Pengelola Irigasi	140.000.000,00	42.032.188,00	30,02%	
Penyelenggaraan UPT Kelingi Tugumulyo	70.000.000,00	21.016.094,00	30,02%	41,67 %
Penyelenggaraan UPT Air Lakitan	70.000.000,00	21.016.094,00	30,02%	41,67 %
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.110.000.000,00	-	0,00%	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.110.000.000,00	-	0,00%	
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	400.000.000,00	-	0,00%	
- Pembangunan Sarana Prasarana Air bersih (Pamsimas) Desa Semangus Lama Kecamatan Muara Lakitan	400.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	710.000.000,00	-	0,00%	
Pembangunan Sumur Bor Kecamatan Jayaloka	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Sumur Bor Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti	250.000.000,00		0,00%	0,00%

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Administrasi Kegiatan Pembangunan Sumur Bor Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti	5.000.000,00		0,00%	0,00%
Pembangunan Sumur Bor Desa Muara Megang I Kecamatan Megang Sakti	250.000.000,00		0,00%	0,00%
Administrasi Pembangunan Sumur Bor Desa Muara Megang I Kecamatan Megang Sakti	5.000.000,00		0,00%	0,00%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.050.000.000,00	-	0,00%	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	-	0,00%	
Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	510.000.000,00		0,00%	
Pembangunan MCK Desa Muara Megang I Kecamatan Megang Sakti	250.000.000,00		0,00%	0,00%
Administrasi Pembangunan MCK Desa Muara Megang I Kecamatan Megang Sakti	5.000.000,00		0,00%	0,00%
Pembangunan MCK Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti	250.000.000,00		0,00%	0,00%
Administrasi Pembangunan MCK Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti	5.000.000,00		0,00%	0,00%
Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	200.000.000,00	-	0,00%	
- Penyelenggaraan UPT Pengelola Air Limbah Domestik Kabupaten Musi Rawas	200.000.000,00	-	0,00%	33,33 %

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	140.000.000,00		0,00%	
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Binjai Kecamatan Muara Kelingi	140.000.000,00		0,00%	0,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	42.439.000.000,00	79.075.000,00	0,19%	
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	42.439.000.000,00	79.075.000,00	0,19%	
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	41.989.000.000,00	-	0,00%	
PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK / JALAN LINGKUNGAN / JALAN PERMUKIMAN				
KECAMATAN PURWODADI				
Pembangunan Jalan Ke Makam Desa Sadar Karya Kecamatan Purwodadi	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Jalan Pemukiman Desa T2 Purwakarya Kecamatan Purwodadi	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan P2 Purwodadi Kecamatan Purwodadi	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
KECAMATAN MEGANG SAKTI				
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Megang Sakti 5 Kecamatan Megang Sakti	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Mekar Sari Kecamatan Megang Sakti	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Megang Sakti li Kecamatan Megang Sakti	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Muara Megang I Kecamatan Megang Sakti	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Jajaran Baru I Kecamatan Megang Sakti	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Jajaran Baru II Kecamatan Megang Sakti	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Trisakti Kecamatan Megang Sakti	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Karya Mulya Kecamatan Megang Sakti	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sumber Rejo Kecamatan Megang Sakti	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
KECAMATAN MUARA KELINGI				
Pembangunan Jalan Pemukiman Desa Tugu Sempurna Kecamatan Muara Kelingi	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Jalan Pemukiman Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Jalan Lingkungan (arah pemakaman) Kelurahan muara Kelingi Kecamatan Muara Kelingi	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Jalan Setapak Desa Binjai Kecamatan Muara Kelingi	300.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Karya Teladan Kecamatan Muara Kelingi	350.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Prabumulih 1 Kecamatan Muara Kelingi	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Binjai Kecamatan Muara Kelingi	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
MUARA LAKITAN				
Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Harapan Makmur Kecamatan Muara Lakitan	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Jalan Setapak Desa Pendingan Kecamatan Muara Lakitan	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Pendingan Kecamatan Muara Lakitan	400.000.000,00	-	0,00%	0,00%
KECAMATAN TUAH NEGERI				
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Leban Jaya Kecamatan Tuah negeri	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Air Beliti Kec. Tuah Negeri	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Jalan Setapak Desa Leban Jaya Kecamatan Tuah Negeri	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
KECAMATAN JAYALOKA				
Pembangunan Jalan lingkungan Desa Bumi Rejo Kecamatan Jayaloka	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Jalan Setapak Desa Purwodadi Kecamatan Jayaloka	100.000.000,00	-	0,00%	0,00%
KECAMATAN STL ULU TERAWAS				
Pembangunan Jalan Setapak Desa Sumber Karya Kecamatan STL Ulu Terawas	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Jalan Lingkungan di Kelurahan Terawas Kecamatan STL Ulu Terawas	300.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Pasenan Kecamatan STL Ulu Terawas	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sukaraya Kecamatan STL Ulu Terawas	250.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sukaraya Baru Kecamatan STL Ulu Terawas	250.000.000,00	-	0,00%	0,00%

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sukorejo Kecamatan STL Ulu Terawas	300.000.000,00	-	0,00%	0,00%
KECAMATAN SUMBER HARTA				
Pembangunan Jalan Setapak Desa Sumber Asri Kecamatan Sumber Harta	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
KECAMATAN SUUKAKARYA				
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Yudha Karya Kecamatan Suka Karya	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Bangun Rejo Kecamatan Sukakarya	250.000.000,00	-	0,00%	0,00%
KECAMATAN TUGUMULYO				
Pembangunan Jalan Pemukiman Desa G2 Dwijaya Kecamatan Tugumulyo	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa G2 Dwijaya Kecamatan Tugumulyo	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Mataram Kecamatan Tugumulyo	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa M. Sutiharjo Kecamatan Tugumulyo	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Jalan Setapak Desa B Srikaton Kecamatan tugumulyo	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
KECAMATAN BTS ULU				
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Trimukti Sp 3 Kecamatan BTS Ulu	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sp7 Desa Kota Baru Kecamatan BTS Ulu	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Mulyoharjo Sp 4 Kecamatan BTS Ulu	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan Bangun Jaya Kec. BTS Ulu	300.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Jalan Setapak Kelurahan Bangun Jaya Sp 9 Kecamatan BTS Ulu	300.000.000,00	-	0,00%	0,00%
KECAMATAN MUARA BELITI				
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Muara Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
KECAMATAN TIANG PUMPUNG KEPUNGUT				
Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Simpang Gegas Kecamatan TPK	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
PEMBANGUNAN RUANG PUBLIK				
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Alun-Alun Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan BTS Ulu	900.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Rest Area Desa Semangus Baru Kecamatan Muara Lakitan	500.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Lanjutan Pembangunan Taman Olahraga (TOM) Desa Muara Kati Kecamatan TPK	2.134.010.000,00	-	0,00%	0,00%
Lanjutan Pembangunan Taman Olahraga (TOM) Desa Muara Kati Kecamatan TPK (Konsultan Pengawas)	115.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Revitalisasi Rest Area di Masjid Darussalam	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Tribun Stadion Musi Rawas (Stadion Gelora Herman Deru)	2.000.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Revitalisasi Alun-Alun Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti	527.990.000,00		0,00%	0,00%
PEMASANGAN LPJU				
Pemasangan LPJU Dusun 4 dan 5 Desa babat Kecamatan STL Ulu Terawas	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pemasangan LPJU Kelurahan Terawas Kecamatan STL Ulu Terawas	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pemasangan LPJU Desa Sukaraya Lama Kecamatan STL Ulu Terawas	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pemasangan LPJU Desa Kertosono Dusun I dan IV Kecamatan Jayaloka	100.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pemasangan LPJU Desa Ngestikarya Kecamatan Jayaloka	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pemasangan LPJU Desa Kertosono Kecamatan Jayaloka	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pemasangan LPJU Desa Jaya Tunggal Kecamatan Tuah Negeri	100.000.000,00	-	0,00%	0,00%

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Pemasangan LPJU Desa Jaya Bhakti Kecamatan Tuah Negeri	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pemasangan LPJU Desa Air Beliti Kecamatan Tuah Negeri	100.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pemasangan LPJU Desa Sukamulya Kecamatan Tuah Negeri	100.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pemasangan LPJU Desa Rantau Alih Kecamatan Suka Karya	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
PEMASANGAN JARINGAN SUTR				
Pemasangan Jaringan SUTR Desa E Wonokerto Kecamatan Purwodadi	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pemasangan SUTR Desa Kosgoro Kecamatan STL Ulu Terawas	100.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pemasangan Tiang Dan LPJU Desa Jaya Bhakti Kecamatan Tuah Negeri	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pemasangan Jaringan Sutr Desa Ciptodadi II Kecamatan Suka Karya	350.000.000,00	-	0,00%	0,00%
PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE				
KECAMATAN MEGANG SAKTI				
Pembangunan Drainase Desa Tegal Sari Kecamatan Megang Sakti	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Campur Sari Kecamatan Megang Sakti	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Jajaran Baru 1 Kecamatan Megang Sakti	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Megang Sakti 3 Kecamatan Megang Sakti	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Megang Sakti 3 Kec. Megang Sakti	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Megang Sakti 4 Kecamatan Megang Sakti	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Jajaran Baru 2 Kecamatan Megang Sakti	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Megang Sakti 5 Kecamatan Megang Sakti	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Pembangunan Drainase Desa Rejosari Kecamatan Megang Sakti	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Tegal Sari Kec. Megang Sakti	100.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Campur Sari Sp 4 Kecamatan Megang Sakti	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Karya Mulia Kecamatan Megang Sakti	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Campur Sari Kec. Megang Sakti	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Kelurahan Megang Sakti I Kecamatan Megang Sakti	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
KECAMATAN MUARA KELINGI				
Pembangunan Drainase Desa Temuan Sari Kecamatan Muara Kelingi	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Mekar Sari Kecamatan Muara Kelingi	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Tanjung Kecamatan Muara Kelingi	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Pulau Panggung Kecamatan Muara Kelingi	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Karya Teladan Kecamatan Muara Kelingi	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
KECAMATAN TUAH NEGERI				
Pembangunan Drainase Desa Remayu Kecamatan Tuah negeri	160.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Saluran Drainase Desa Air Beliti Kecamatan Tuah Negeri	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Jaya Bhakti Kecamatan Tuah Negeri	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
KECAMATAN STL ULU TERAWAS				
Pembangunan Saluran Drainase Desa Sukamana Kecamatan STL Ulu Terawas	300.000.000,00	-	0,00%	0,00%

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Pembangunan Drainase Desa Sukaraya Baru Kecamatan STL Ulu Terawas	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Sukakarya Kecamatan STL Ulu Terawas	250.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Babat Kecamatan STL Ulu Terawas	300.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Sukaraya Kecamatan STL Ulu Terawas	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Sukaraya Baru Kec STL Ulu Terawas	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Kosgoro Kecamatan STL Ulu Terawas	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Sukorejo Kec. STL Ulu Terawas	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Sukakarya Kecc STL Ulu Terawas	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Sukorejo Kecamatan STL Ulu Terawas	300.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Sukakarya Kec. STL Ulu Terawas	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Sukaraya Lama Kecamatan STL Ulu Terawas	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
KECAMATAN JAYALOKA				
Pembangunan Drainase Desa Kertosono Kec. Jayaloka	100.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Saluran Drainase Desa Donorejo Kecamatan Jayaloka	100.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Margoyoso Kec. Jayaloka	100.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Giriyoso Kecamatan Jayaloka	250.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Donorejo Kec. Jayaloka	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Saluran Drainase Desa Kertosono Kecamatan Jayaloka	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Giriyoso Kec. Jayaloka	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Pembangunan Saluran Drainase Desa Ngestiboga I Kecamatan Jayaloka	350.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Ngesti Karya Kecamatan Jayaloka	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Margoyoso Kecamatan Jayaloka	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Saluran Drainase Desa Ngestiboga II Kecamatan Jayaloka	250.000.000,00	-	0,00%	0,00%
KECAMATAN MUARA BELITI				
Pembangunan Drainase Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Saluran Drainase Desa Satan Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti	100.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Air Lesing Kecamatan Muara Beliti	100.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Bumi Agung Kecamatan Muara Beliti	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Suro Kecamatan Muara Beliti	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Kelurahan Pasar Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti	250.000.000,00	-	0,00%	0,00%
KECAMATAN PURWODADI				
Pembangunan Drainase Kelurahan P2 Purwodadi Kecamatan Purwodadi	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Trikarya Kecamatan Purwodadi	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Sadar Karya Kecamatan Purwodadi	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa P1 Mardiharjo Kecamatan Purwodadi	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
KECAMATAN BTS ULU				
Lanjutan Drainase Kelurahan Bangun Jaya Sp 9 Kecamatan BTS Ulu	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Saluran Drainase Desa Bangun Jaya Kecamatan BTS Ulu	350.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Saluran Drainase Desa trijaya Kecamatan BTS. Ulu	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Trimukti Kecamatan BTS Ulu	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Air Beliti Kecamatan BTS Ulu	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Kembang Tanjung Kecamatan BTS Ulu	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Kelurahan Bangun Jaya Sp.9 Kecamatan BTS Ulu	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Mulyo Harjo Sp 4 Kecamatan BTS Ulu	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Kota Baru Kec. BTS Ulu	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Raksa Budi Kec. BTS Ulu	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
KECAMATAN TUGUMULYO				
Pembangunan Drainase Desa G2 Dwijaya Kecamatan Tugumulyo	500.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa L Sidoarjo Kecamatan Tugumulyo	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Saluran Drainase Desa Siti Harjo Kecamatan Tugumulyo	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Mataram Kecamatan Tugumulyo	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa J Ngadirejo Kecamatan Tugumulyo	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa C Nawangsasi Kecamatan Tugumulyo	500.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa V Surodadi Kecamatan Tugumulyo	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
KECAMATAN SUKAKARYA				

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Pembangunan Saluran Drainase Desa Ciptodadi II Kecamatan Sukakarya	190.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Saluran Drainase Desa Sukarena Kecamatan Suka Karya	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Saluran Drainase Desa Rantau Alih Kecamatan Sukakarya	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Yuda Karya Kecamatan Suka Karya	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
KECAMATAN SUMBER HARTA				
Pembangunan Drainase Desa Sukamaju Kecamatan Sumber Harta	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
KECAMATAN MUARA LAKITAN				
Pembangunan Saluran Drainase Desa Anyar Kecamatan Muara Lakitan	100.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Drainase Desa Muara Rengas Kecamatan Muara Lakitan	100.000.000,00	-	0,00%	0,00%
PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN TEMPAT IBADAH DAN KELENGKAPANNYA				
Pembangunan Mushola SD Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Mushola Desa Muara Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Rehabilitasi Masjid Desa Saten Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Pelataran Masjid Nurul Iman Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Rehabilitasi Pagar Dan Lantai Pure Desa Suro Kecamatan Muara Beliti	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Masjid Desa Jajaran Baru 1 Kecamatan Megang Sakti	100.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Mushola Desa Semeteh Kelurahan Muara Lakitan	250.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Lanjutan Pembangunan Masjid Desa Semangus Baru Kecamatan Muara Lakitan	500.000.000,00	-	0,00%	0,00%

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Rehabilitasi Masjid Desa Prabumulih 2 Kecamatan Muara Lakitan	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Pagar Masjid Al-Molek Kelurahan Muara Lakitan	300.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Perehabilitasian Masjid Dusun 5 Desa Madang Kecamatan Sumber Harta	100.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Perehabilitasian Masjid Desa Sumber Asri Kecamatan Sumber Harta	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Perehabilitasian Masjid Dusun 3 Desa Madang Kecamatan Sumber Harta	100.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Pagar Masjid Dusun III Desa Suka Merindu Kecamatan STL Ulu Terawas	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Pagar Masjid Nurul Falalah Desa Tugu Sempurna Kecamatan Muara Kelingi	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Pelataran Masjid Desa Tugu Sempurna Kecamatan Muara Kelingi	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Pondasi Pagar Pura Desa Tugu Sempurna Kecamatan Muara Kelingi	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
PEMBANGUNAN PAGAR				
Pembangunan Pagar Makam Desa Margatani Kecamatan Jayaloka	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Pagar Kantor Desa Dan Balai Desa Margatani Kecamatan Jayaloka	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Pagar Pemakaman Umum TPU Desa Muara Kati 2 Kecamatan Muara Beliti	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
LAINNYA				
Pembangunan Gapura Desa Margoyoso Kecamatan Jayaloka	100.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Bantuan Pondok Pesantren Kecamatan Jayaloka	50.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Rehabilitasi Kantor Desa Sadar Karya Kecamatan Purwodadi	250.000.000,00	-	0,00%	0,00%

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk Jaringan Listrik di desa Harapan Makmur	12.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Pengadaan Jaringan Listrik Sindang Laya dan Mukti Karya	100.000.000,00		0,00%	0,00%
Pengadaan Taman pada Median Jalan Poros Muara Beliti - Lubuklinggau	100.000.000,00	-	0,00%	0,00%
PEMBANGUNAN TALUD / TEMBOK PENAHAN TANAH				
Pembangunan Talud TPU Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Talud TPU Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
PEMBANGUNAN TOWER TELEKOMUNIKASI				
Pembangunan Tower Mini Desa Pulau Panggung Kecamatan Muara Kelingi	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Tower Mini Desa Binjai Kecamatan Muara Kelingi	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Tower Mini Desa Sukamenang Kecamatan Muara Kelingi	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	450.000.000,00	79.075.000,00	17,57%	
Pemeliharaan Jaringan Listrik dan LPJU di Kabupaten Musi Rawas	200.000.000,00	33.902.000,00	16,95%	41,18 %
Pemeliharaan Rutin Taman	125.000.000,00	33.902.000,00	27,12%	41,67 %
Pemeliharaan Rutin Kebersihan di Kawasan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Sekitarnya	125.000.000,00	33.902.000,00	27,12%	41,67 %
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	57.095.000.000,00	3.650.000,00	0,01%	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	57.095.000.000,00	3.650.000,00	0,01%	
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	250.000.000,00	3.650.000,00	1,46%	
Monitoring dan Evaluasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	250.000.000,00	3.650.000,00	1,46%	50,00 %
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	54.995.000.000,00	-	0,00%	
Perencanaan Landscape Masjid Darussalam	100.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Gedung Tpa Desa Sukamenang Kecamatan Muara Kelingi	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Kantor Desa Karya Mukti Kecamatan Muara Kelingi	1.000.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Gedung Lokal Pondok Pesantren Miftahussalam Desa Megang Sakti 3	100.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Gedung MWC NU Desa Campur Sari	100.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Ruang Kelas Baru Pondok Pesantren AL-MUWAHIDIN Desa Marga Baru Kecamatan Muara lakitan	250.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Kantor Kelurahan Muara Lakitan Kecamatan Muara Lakitan	500.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Prabumulih 1 Kecamatan Muara Lakitan	720.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Pelita Jaya Kecamatan Muara Lakitan	850.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Sidomulyo Kecamatan Muara Lakitan	850.000.000,00	-	0,00%	0,00%

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Marga Baru Kecamatan Muara Lakitan	850.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Asrama Pesantren Sarip Hidayat Desa Ngestiboga II Kecamatan Jayaloka	100.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa Sidodadi Kecamatan Jayaloka	500.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Donorejo Kecamatan Jayaloka	750.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Balai Desa Tri Mukti Sp 9 Kecamatan BTS Ulu	500.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Pembangunan Gedung Sekretariat Margaluyu Ayatul A'In Desa Banpres Kecamatan Tuah Negeri	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Lanjutan Pembangunan Kantor Desa Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti	500.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Konsultan Supervisi Pembangunan Tribun Stadion Musi Rawas (Stadion Gelora Herman Deru)	100.000.000,00		0,00%	0,00%
Konsultan Supervisi Pembangunan Taman Olahraga Muara Kati	100.000.000,00		0,00%	0,00%
Rehabilitasi Masjid Agung Darussalam di Muara Beliti	200.000.000,00		0,00%	0,00%
Perencanaan Jaringan Air Bersih di Kawasan Sulit Air Campur Sari dan Desa Jajaran Baru II Kecamatan Megang Sakti	225.000.000,00		0,00%	0,00%
Pembangunan Gedung Serba Guna Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti	15.000.000.000,00		0,00%	5,00%
Administrasi Kegiatan Pembangunan Gedung Serba Guna Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti	50.000.000,00		0,00%	0,00%
Penyusunan Dokumen Andalalin Pembangunan Gedung Serba Guna Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti	250.000.000,00		0,00%	0,00%
Lanjutan Pembangunan RSUD Musi Rawas di Muara Beliti	29.300.000.000,00		0,00%	0,00%
Administrasi Lanjutan Pembangunan RSUD Musi Rawas di Muara Beliti	100.000.000,00		0,00%	0,00%

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Konsultan Supervisi Lanjutan Pembangunan RSUD Musi Rawas di Muara Beliti	600.000.000,00		0,00%	0,00%
Konsultan Supervisi Pembangunan Gedung Serba Guna Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti	350.000.000,00		0,00%	0,00%
Penyusunan FS dan DED Pembangunan Gardu Induk di Kabupaten Musi Rawas	300.000.000,00		0,00%	0,00%
Perencanaan Lansekap Embung di Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti	100.000.000,00		0,00%	0,00%
Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Gedung Serba Guna Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti	250.000.000,00		0,00%	0,00%
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.850.000.000,00	-	0,00%	
Rehabilitasi Kantor Desa Donorejo Kecamatan Jayaloka	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Rehabilitasi Kantor Desa Pasenan Kecamatan STL Ulu Terawas	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Rehabilitasi Kantor Balai Desa Desa Sukamana Dusun II Kecamatan STL Ulu Terawas	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Rehabilitasi Kantor PKK Desa Sukamana Kecamatan STL Ulu Terawas	150.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Rehabilitasi Kantor Desa Kalibening Kecamatan Tugumulyo	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Rehabilitasi Gedung Kantor Desa Mataram Kecamatan Tugumulyo	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Rehabilitasi Kantor Desa Trikarya Kecamatan Purwodadi	200.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Rehabilitasi Kantor Desa R Rejo Sari Kecamatan Purwodadi	300.000.000,00	-	0,00%	0,00%
Rehabilitasi Gedung NU di Kecamatan Megang Sakti	250.000.000,00	-	0,00%	0,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.566.022.750,00	80.144.009,00	5,12%	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.266.022.750,00	72.144.009,00	5,70%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	250.000.000,00	72.144.009,00	28,86%	
Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	250.000.000,00	72.144.009,00	28,86%	50,00 %
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1.016.022.750,00	-	0,00%	
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Muara Beliti	1.016.022.750,00	-	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	8.000.000,00	2,67%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	300.000.000,00	8.000.000,00	2,67%	
Monitoring dan Evaluasi Menara / Tower Telekomunikasi	300.000.000,00	8.000.000,00	2,67%	50,00 %
J U M L A H	162.536.791.848	12.788.391.100	7,87%	5,24

6. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.6
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Belanja Langsung	73.246.817.551	6.084.301.719	8,31	12,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.015.243.142	1.820.210.617	45,33	45,33

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000	-	0,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	-	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.000.000	-	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25.000.000	-	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25.000.000	-	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	25.000.000	-	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	-	0,00	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000	-	0,00	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.512.103.422	1.439.921.789	57,32	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.317.103.422	1.381.571.789	59,62	42,86
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	185.000.000	58.350.000	31,54	41,67
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	-	0,00	66,67
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	108.518.000	-	0,00	0,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8.518.000	-	0,00	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	-	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	381.618.000	142.292.660	37,29	37,29
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.000.000	16.180.000	43,73	66,67
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.000.000	31.000.000	100,00	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	8.836.360	44,18	75,00
Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	40.000.000	8.043.000	20,11	66,67
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	40.000.000	11.930.000	29,83	33,33
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213.618.000	66.303.300	31,04	500,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	506.638.720	197.153.968	38,91	38,91
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000	5.000.000	16,67	500,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.998.720	23.333.968	38,89	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	416.640.000	168.820.000	40,52	41,67
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256.365.000	40.842.200	15,93	15,93
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	35.842.200	35,84	28,57
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	5.000.000	12,50	40,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	116.365.000	-	0,00	0,00
Program Pengembangan Perumahan	784.066.600	-	0,00	0,00
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	784.066.600	-	0,00	0,00
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	784.066.600	-	0,00	0,00
Program Kawasan Permukiman	9.136.575.500	29.515.754	0,32	0,32
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	650.000.000	18.808.200	2,89	2,89
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	549.999.900	12.253.600	2,23	0,00
Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	100.000.100	6.554.600	6,55	0,00
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	8.486.575.500	10.707.554	0,13	0,13
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	282.281.500	10.707.554	3,79	0,00
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	8.204.294.000	28.600.000	0,35	0,35
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	35.310.932.309	86.866.800	0,25	0,25
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	35.310.932.309	86.866.800	0,25	0,25
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	150.000.000	-	0,00	0,00
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	35.160.932.309	86.866.800	0,25	0,25

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	401.646.000	40.069.600	9,98	9,98
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	401.646.000	40.069.600	9,98	9,98
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	401.646.000	40.069.600	9,98	9,98
Program Penatagunaan Tanah	23.598.354.000	4.107.638.948	17,41	17,41
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	23.598.354.000	4.107.638.948	17,41	17,41
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	23.598.354.000	4.107.638.948	17,41	1,33

7. Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

Tabel 2.7
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

Program dan Kegiatan	PLAPON ANGGARAN (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.378.000	8.298.000	99,05	100,00 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.489.000	3.669.000	81,73	100,00 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.321.100	1.200.000	22,55	100,00 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3.659.900	-	0,00	50,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.939.900	-	0,00	50,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.884.800	-	0,00	0,00%

Program dan Kegiatan	PLAPON ANGGARAN (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.305.420.432	3.323.352.957	52,71	50,00%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	67.800.000	28.250.000	41,67	50,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.110.050	1.000.000	24,33	50,00%
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	-	0,00	50,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	3.500.000	35,00	50,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	34.700.000	9.900.000	28,53	50,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.764.700	57.691.705	33,01	50,00%
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.057.000.000	-	0,00	0,00%
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	-	0,00	50,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.824.289	11.426.522	30,21	50,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.050.400.000	1.525.200.000	50,00	50,00%
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.207.100	-	0,00	50,00%

Program dan Kegiatan	PLAPON ANGGARAN (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	214.345.450	96.899.800	45,21	50,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.800.000	6.000.000	28,85	50,00%
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN ATAU KOTA				
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan Cegah dini, pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	402.102.500	187.442.500	46,62	50,00%
Penindakan atas gangguan Ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	75.663.700	13.388.700	17,70	42,00%
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	59.995.200	7.020.500	11,70	41,67%
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA				
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	75.000.000	2.899.800	3,87	50,00%
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEUANGAN				
PENCEGAHAN , PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten atau Kota	92.107.400	15.584.600	16,92	50,00%

Program dan Kegiatan	PLAPON ANGGARAN (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
JUMLAH	11.736.913.521	5.302.724.084	45,18	51,35%

8. Dinas Sosial

Tabel 2.8
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Sosial

Prioritas Program Dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL	11.976.339.543	5.108.287.284	42,65%	50,75%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.973.744.243	1.965.593.534	49,46%	38,58%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.797.750	35.893.900	41,45%	55,71%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	10.913.100	72,75%	75,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	-	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	6.302.500	63,03%	65,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	4.163.700	41,64%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	-	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	8.362.050	55,75%	75,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.797.750	6.152.550	56,98%	75,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.116.054.837	1.764.014.481	56,61%	53,33%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.034.734.837	1.724.207.181	56,82%	65,00%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76.320.000	38.160.000	50,00%	50,00%

Prioritas Program Dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000	1.647.300	32,95%	45,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000	1.390.500	27,81%	0,00%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	1.390.500	27,81%	35,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	0	0,00%	0,00%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	-	0,00%	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	171.498.136	92.926.778	64,62%	71,25%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.498.136	986.335	65,84%	75,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	5.000.000	100,00%	100,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	15.084.800	30,17%	45,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.000.000	71.855.643	62,48%	65,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.000.000	-	67,24%	0,00%
Pengadaan Mebel	3.000.000	-	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	438.536.720	214.472.658	49,08%	70,00%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100,00%	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.733.000	21.218.658	53,40%	55,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	397.803.720	192.254.000	48,33%	55,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.856.800	71.367.875	49,71%	58%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.853.200	32.891.075	49,20%	55,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.253.600	35.796.800	43,52%	55,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.750.000	2.680.000	56,42%	65,00%

Prioritas Program Dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	323.596.300	41.449.600	18,93%	23%
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	63.597.500	7.939.400	12,48%	18%
Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	29.999.100	1.699.100	5,66%	15,00%
Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	33.598.400	6.240.300	18,57%	20,00%
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	259.998.800	33.510.200	12,89%	28,33%
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	29.998.600	8.598.600	28,66%	40,00%
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	29.999.200	8.489.600	28,30%	35,00%
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200.001.000	16.422.000	8,21%	10,00%
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	10.000.000	3.566.500	35,67%	45,00%
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	10.000.000	3.566.500	35,67%	45,00%
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	10.000.000	3.566.500	35,67%	45,00%
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	408.999.300	73.646.600	35,92%	38,00%
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	158.999.300	73.646.600	32,75%	38,00%
Penyediaan Permakanan	25.000.000	6.977.500	27,91%	30,00%
Penyediaan Sandang	15.000.000	2.999.600	20,00%	30,00%
Penyediaan Alat Bantu	70.000.000	7.537.400	10,77%	20,00%

Prioritas Program Dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	35.000.000	16.245.000	46,41%	50,00%
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	13.999.300	8.214.700	58,68%	60,00%
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	250.000.000	15.836.200	6,33%	0,00%
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	250.000.000	15.836.200	6,33%	15,00%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	7.130.000.000	2.971.692.600	41,68%	125%
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	25.000.000	1.158.000	4,63%	0%
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	25.000.000	1.158.000	4,63%	10%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	7.105.000.000	2.970.534.600	41,81%	125%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	31.101.400	41,47%	45%
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	7.000.000.000	2.930.988.200	41,87%	45%
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	30.000.000	8.445.000	28,15%	35%
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	129.999.700	52.338.450	33,03%	35%
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	34.999.900	2.353.400	6,72%	10%
Penyediaan Makanan	19.999.900	2.353.400	11,77%	20%
Penyediaan Sandang	15.000.000	-	0,00%	0%
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	94.999.800	49.985.050	52,62%	60%
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	94.999.800	49.985.050	52,62%	60%
JUMLAH	11.976.339.543	5.108.287.284	42,65%	50,75%

9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 2.9
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nama Program / Kegiatan	PLAPON ANGGARAN (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.714.000	5.056.350	58	66,7
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.678.900	3.963.100	85	30,0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.580.000		0	20,0
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	3.812.000	3.272.000	86	100,0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.129.000		0	50,0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.165.900	2.927.200	41	0,0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.920.200	4.933.200	19	40,7
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.242.247.281	1.817.642.912	56	41,7
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.120.000	29.500.000	38	20,0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10.000.000	2.500.000	25	30,0
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				

Nama Program / Kegiatan	PLAPON ANGGARAN (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000	8.717.000	44	30,0
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	6.863.000	34	0,0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	11.203.850	56	0,0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	6.000.000	30	0,0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.500.000	2.500.000	33	0,0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	45.450.200	61	10,7
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100	0,0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.922.805	42.007.223	49	41,7
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	403.960.000	160.097.000	40	41,7
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.719.755	17.208.357	26	0,0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000		0	0,0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	3.170.000	32	0,0
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil				
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	15.000.000	3.054.050	20	16,7
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				

Nama Program / Kegiatan	PLAPON ANGGARAN (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	15.000.000		0	25,0
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	15.000.000		0	30,0
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian				
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	15.000.000	9.838.500	66	30,0
JUMLAH	4.184.469.841	2.188.903.942	52,31,	14,,

10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.10
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		(Rp)	(%)	(%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	1.736.506.721	1.040.356.925	59,91	59,91

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		(Rp)	(%)	(%)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Melaksanakan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48.240.000	23.970.000	49,69	49,69
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000		-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000		-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000		-	-
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	10.000.000		-	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	25.000.000	9.500.000	38,00	38,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.430.150	64.258.317	54,26	54,26
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.800.000		-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.398.508	21.795.649	69,42	69,42
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	237.240.000	122.440.000	51,61	51,61
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	43.827.900	14.640.000	33,40	33,40

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		(Rp)	(%)	(%)
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.158.950	8.000.000	10,79	10,79
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000		-	-
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	45.000.000	10.864.200	24,14	24,14
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000	100.000.000	50,00	50,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	74.750.000		-	-
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	112.040.000		-	-

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		(Rp)	(%)	(%)
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	95.000.000	35.566.600	37,44	37,44
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	46.380.000		-	-
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	220.000.000	50.256.100	22,84	22,84
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	9.240.000	18,48	18,48
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK				
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	80.000.000	27.350.000	34,19	34,19
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		(Rp)	(%)	(%)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	74.750.000		-	-
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	234.800.000		-	-
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.280.000		-	-
JUMLAH	3.680.602.229	1.538.237.791	41,79	41,79

11. Dinas Ketahanan Pangan

Tabel 2.11
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.303.940.740	1.821.376.254	55,13	100,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.287.350,00	42.554.500,00	38,59	53,33
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.287.350,00	16.070.300,00	39,89	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	35.000.000,00	11.489.800,00	32,83	50,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	35.000.000,00	14.994.400,00	42,84	60,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.363.893.450,00	1.374.219.903,00	58,13	51,10

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.301.141.450,00	1.346.824.703,00	58,53	58,53
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	62.752.000,00	27.395.200,00	43,66	43,66
Administrasi Umum Perangkat Daerah	319.270.000,00	158.887.600,00	49,77	51,88
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.440.000,00	2.290.000,00	30,78	31,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.810.000,00	41.450.000,00	90,48	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.750.000,00	2.900.000,00	37,42	37,42
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	42.000.000,00	19.843.000,00	47,25	48,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216.270.000,00	92.404.600,00	42,73	43,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397.497.940,00	193.658.751,00	48,72	48,33
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.125.000,00	2.660.000,00	51,90	52,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.183.500,00	17.139.551,00	42,65	43,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	352.189.440,00	173.859.200,00	49,37	50,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.992.000,00	52.055.500,00	46,07	45,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	97.992.000,00	45.635.500,00	46,57	47,00
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	6.420.000,00	42,80	43,00
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	5.017.312.000,00	0,00	-	14,00
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.017.312.000,00	0,00	-	14,00
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	4.900.000.000,00	0,00	-	20,00
Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	117.312.000,00	0,00	-	8,00
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	235.450.000,00	28.793.750,00	12,23	26,50
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	114.867.000,00	10.423.350,00	9,07	15,00
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	114.867.000,00	10.423.350,00	9,07	15,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	26.592.000,00	11.656.500,00	43,83	51,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan kabupaten/Kota	26.592.000,00	11.656.500,00	43,83	51,00
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	93.991.000,00	6.713.900,00	7,14	13,50
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	31.641.000,00	3.948.700,00	12,48	15,00
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	62.350.000,00	2.765.200,00	4,43	12,00
Program Penanganan Kerawanan Pangan	109.880.000,00	18.790.400,00	17,10	17,65
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	68.792.000,00	11.693.200,00	17,00	18,00
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	41.088.000,00	7.097.200,00	17,27	17,30
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	41.088.000,00	7.097.200,00	17,27	17,30
Program Pengawasan Keamanan Pangan	101.374.800,00	14.630.200,00	14,43	21,67
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	101.374.800,00	14.630.200,00	14,43	21,67
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	47.672.800,00	12.362.200,00	25,93	35,00
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	11.191.800,00	0,00	-	10,00
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	42.510.200,00	2.268.000,00	5,34	20,00
JUMLAH	8.767.957.540	1.883.590.604	21,48	35,96

12. Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 2.12
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas Program Dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8.338.922.931	3.440.297.913		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA	6.845.076.031	3.073.309.705	44,90%	92,92%
<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	26.033.900	5.201.900	19,98%	20,75%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.634.800	1.974.900	20,50%	21,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.116.400	900.000	17,59%	20,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.040.400	832.000	20,59%	21,00%
Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7.242.300	1.495.000	20,64%	21,00%
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2.971.422.292	1.724.606.848	58,04%	58,08%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.902.304.492	1.695.579.948	58,42%	65,75%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	64.560.000	27.500.000	42,60%	58,75%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	4.557.800	1.526.900	33,50%	49,75%
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	283.517.350	190.040.448	67,03%	68,33%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	1.100.000	55,00%	60,00%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	24.500.000	-	0,00%	
Penyediaan bahan logistik Kantor	4.169.750	1.255.000	30,10%	35,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	3.911.700	19,56%	25,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	232.847.600	183.773.748	78,92%	85,00%
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	37.000.000	37.000.000	100,00%	100,00%

Prioritas Program Dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.000.000	37.000.000	100,00%	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	395.660.789	272.892.309	53,38%	55,50%
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	79.580.789	21.722.312	27,30%	30,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	316.080.000	251.169.997	79,46%	81,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.231.441.700	843.568.200	68,50%	69,00%
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	1.227.781.700	843.568.200	68,71%	69,00%
pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	3.660.000		0,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.900.000.000		0,00%	
Peningkatan pelayanan BLUD	1.900.000.000		0,00%	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	311.000.000	1.900.000	0,61%	5,00%
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	311.000.000	1.900.000	0,61%	5,00%
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	115.000.000	1.900.000	1,65%	5,00%
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	196.000.000	77.522.858	39,55%	39,75%
Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	196.000.000	77.522.858	39,55%	39,75%
Koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara,dan Laut	145.000.000	67.072.858	46,26%	49,75%
Koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	51.000.000	10.450.000	20,49%	29,75%

Prioritas Program Dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	285.850.000		0,00%	62,50%
<i>Pengelolaan keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota</i>	285.850.000	172.800.000	60,45%	62,50%
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	132.850.000	86.400.000	65,04%	67,00%
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	153.000.000	86.400.000	56,47%	58,00%
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	15.000.000	8.150.000	54,33%	55,00%
<i>Penyimpanan Sementara Limbah B3</i>	15.000.000	8.150.000	54,33%	55,00%
Verifikasi Lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan Administrasi dan Tekhnis Penyimpanan Sementara Limbah B3	15.000.000	8.150.000	54,33%	55,00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	40.000.000	5.970.000	14,93%	14,95%
<i>Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	40.000.000	5.970.000	14,93%	14,95%
Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	40.000.000	5.970.000	14,93%	14,95%
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	45.000.000	2.342.500	5,21%	5,25%
<i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</i>	45.000.000	2.342.500	5,21%	5,25%
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	45.000.000	2.342.500	5,21%	5,25%
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	50.000.000		0,00%	29,44%
<i>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kabupaten/Kota</i>	50.000.000	14.721.600	29,44%	29,44%

Prioritas Program Dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia pendidikan/Filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	50.000.000	14.721.600	29,44%	29,44%
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	16.999.000	2.996.700	17,63%	18,00%
<i>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/kota</i>	<i>16.999.000</i>	<i>2.996.700</i>	17,63%	18,00%
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/kota	16.999.000	2.996.700	17,63%	18,00%
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	533.997.900	268.106.150	50,21%	50,25%
<i>Pengelolaan Sampah</i>	<i>533.997.900</i>	268.106.150	50,21%	50,25%
Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/Kota	533.997.900	268.106.150	50,21%	50,25%
JUMLAH	8.338.922.931	3.440.297.913	41,26%	41,45%

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.13
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prioritas Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.286.179.198			
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	34.006.800			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.303.500	6.500.000	78,28	78,28
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.487.350	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	4.844.000	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.430.150	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.488.800	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.654.000	-	-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.799.000	-	-	-
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2.610.745.658			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.540.005.658	1.386.012.531	54,57	54,57
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70.740.000	35.370.000	50,00	50,00
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	10.000.000			
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	-	-	-
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	1.154.041.500			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	1.000.000	40,00	40,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	973.840.800	-	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.755.000	-	-	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.186.500	2.499.700	16,46	16,46

Prioritas Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	-	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.759.200	49.206.562	32,86	32,86
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	391.366.990			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.875.000	-	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.258.490	35.935.118	50,43	50,43
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	318.233.500	251.616.495	79,07	79,07
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.018.250			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.278.250	17.750.000	23,90	23,90
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.740.000	1.260.000	10,73	10,73
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	5.000.000			
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	5.000.000			
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	5.000.000	1.950.000	39,00	39,00
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	5.000.000			
Pelayanan Pencatatan Sipil	5.000.000			
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	5.000.000	1.925.000	38,50	38,50
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	10.000.000			
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	5.000.000			
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	5.000.000	1.975.000	39,50	39,50
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5.000.000			
Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	5.000.000	1.800.000	36,00	36,00
J u m l a h	4.306.179.198	1.794.800.406	41,68	62,03

14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 2.14
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	%	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.607.500	10.317.500	88,89	90
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.263.900	-	0,00	20
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.469.450	-	0,00	20
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.127.800	690.000	13,46	20
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.544.400	-	0,00	20
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.644.100	-	0,00	20
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.329.150	-	0,00	20
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.825.988.245	1.419.283.037	50,22	51
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	71.000.000	31.800.000	44,79	45
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.676.000	-	0,00	20
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.800.000	600.000	8,82	20
Administrasi Umum Perangkat Daerah		-		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	1.970.000	39,40	40
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.560.800	20.339.200	43,68	44
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.262.850	12.140.350	31,73	32

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	%	%
Penyediaan Bahan Bacaan Perundang-undangan	9.500.000	5.270.000	55,47	56
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.342.100	68.844.309	28,64	29
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	-	0,00	20
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.768.843	29.761.026	40,90	41
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.789.300	10.864.300	34,18	35
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	501.789.421	207.420.000	41,34	42
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96.646.000	31.226.925	32,31	33
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	130.649.000	31.369.152	24,01	25
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.428.200	-	0,00	20
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				
Fasilitasi Penyelenggaraan Admistrasi Pemerintahan Desa	2.408.454.000	553.344.576	22,98	23
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	50.000.050	22.535.050	45,07	46
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	25.000.000	15.035.900	60,14	61
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	48.169.900	7.481.650	15,53	20
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	100.000.000	40.328.500	40,33	41
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	850.000.000	351.932.030	41,40	42
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	25.000.000	10.263.924	41,06	42

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	%	%
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	51.830.100	48.727.200	94,01	95
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	450.000.000	165.624.500	36,81	37
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	100.000.000	52.184.400	52,18	53
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	300.000.000	139.267.800	46,42	47
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50.000.000	24.673.000	49,35	50
Jumlah	8.609.641.109	3.313.294.329	38,48	38

15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 2.15
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Prioritas Program Dan Kegiatan	Pelapon Anggaran (Rp.)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	11.118.145.633			
Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.118.145.633			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	5.357.417.633	2.398.440.901	44,77%	
Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.350.700	7.486.600	19,52%	33,33%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.298.900	1.646.900	14,58%	25,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.829.850	1.622.500	23,76%	50,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.707.650	1.498.500	19,44%	50,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.020.900	249.700	24,46%	50,00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.020.900	130.900	12,82%	50,00%
koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	10.472.500	2.338.100	22,33%	25,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.213.469.713	1.556.675.657	48,44%	58,35%
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.104.312.913	1.532.215.357	49,36%	60,27%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	108.930.300	24.460.300	22,46%	44,44%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	226.500	-	0,00%	0,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.019.600	2.667.750	38,00%	50,00%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang milik daerah pada SKPD	7.019.600	2.667.750	38,00%	50,00%

Prioritas Program Dan Kegiatan	Pelapon Anggaran (Rp.)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	-		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	247.927.100	83.475.096	33,67%	52,00%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.505.000	340.000	22,59%	50,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.500.000	38.300.000	88,05%	100,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.195.000	3.740.000	26,35%	41,18%
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undang	46.927.100	14.858.600	31,66%	52,15%
Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.800.000	26.236.496	18,50%	32,35%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah	1.707.151.370	723.589.248	42,39%	61,08%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	370.000	200.000	54,05%	75,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	38.055.000	20.417.548	53,65%	72,22%
Penyediaan Jasa Umum Kantor	1.668.726.370	702.971.700	42,13%	60,63%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah	113.499.150	24.546.550	21,63%	51,35%
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	70.680.050	11.350.000	16,06%	50,00%
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan	31.939.100	12.421.550	38,89%	55,56%
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	10.880.000	775.000	7,12%	22,22%
Urusan Wajib				
Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana				
Program Pengendalian Penduduk	657.600.000	151.649.900	23,06%	

Prioritas Program Dan Kegiatan	Pelapon Anggaran (Rp.)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
Pemanduan dan Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	20.000.000	-	0,00%	0,00%
Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI, dan SLTP/MTS, Jalur nonformal dan informal	20.000.000	-	0,00%	0,00%
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	637.600.000	151.649.900	23,78%	8600,00%
Penyusunan Profil Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan Keluarga	10.000.000	1.649.900	16,50%	100,00%
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Sistem Informasi Keluarga	64.200.000	-	0,00%	0,00%
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	155.400.000	-	0,00%	0,00%
Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	408.000.000	150.000.000	36,76%	50,60%
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.619.228.000	179.641.400	6,86%	
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	863.700.000	49.040.000	5,68%	0,00%
Advokasi Program KKBPK kepda Stakeholder dan Mitra Kerja	80.000.000	-	0,00%	0,00%
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000	21.250.000	14,17%	33,33%
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat koordinasi desa (Rakordes), Mini Lokakarya (Minilok)	182.000.000	27.790.000	15,27%	39,29%
Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	371.700.000	-	0,00%	0,00%

Prioritas Program Dan Kegiatan	Pelapon Anggaran (Rp.)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	-	0,00%	0,00%
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB PKB/PLKB)	662.000.000	3.486.800	0,53%	3,96%
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	238.000.000	-	0,00%	0,00%
Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakkan, Pelayanan dan pengembangan Program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana/penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	26.000.000	3.486.800	13,41%	32,14%
Penggerakan Kader institusi masyarakat (IMP)	398.000.000	-	0,00%	0,00%
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	697.028.000	127.114.600	18,24%	37,22%
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	29.700.000	-	0,00%	0,00%
Peningkatan Kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	611.028.000	120.799.000	19,77%	40,19%
Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	18.300.000	-	0,00%	0,00%
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	38.000.000	6.315.600	16,62%	39,02%
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	396.500.000	-	0,00%	0,00%
Integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	9.000.000	-	0,00%	0,00%
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	387.500.000	-	0,00%	0,00%

Prioritas Program Dan Kegiatan	Pelapon Anggaran (Rp.)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.483.900.000	707.250	0,03%	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.483.900.000	707.250	0,03%	0,01%
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	360.000.000	-	0,00%	0,00%
Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelolah dan Pelaksanaan (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.097.900.000	-	0,00%	0,00%
Promosi dan Sosialisasi kelompok kegiatannketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan konomi keluarga/UPPKS)	26.000.000	707.250	2,72%	20,00%
JUMLAH	11.118.145.633	2.730.439.451	24,56%	25,05%

16. Dinas Perhubungan

Tabel 2.16
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Perhubungan

Prioritas Program dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
DANA APBD KABUPATEN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.748.369.993			
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.761.000			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.581.800	3.600.000	24,69	80,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.953.800	2.400.000	60,70	100

Prioritas Program dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.225.400	2.400.000	74,41	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.292.639.898			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.236.429.898	1.543.929.240	47,70	98
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	56.210.000	28.170.000	50,12	50,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	139.025.000			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.030.000	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.995.000	0	0	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	70.396.730	70,40	56,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	457.000.000			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	457.000.000	420.400.000	91,99	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	816.685.695			
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	89.905.695	26.389.095	29,35	25,00
Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	726.780.000	253.920.000	34,94	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.258.400			
Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.092.800	0	0	0
Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.165.600	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	298.497.900			

Prioritas Program dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	96.999.900			
Pembangunan Prasarana Jalan di Kabupaten/Kota	96.999.900	0	0	0
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	14.998.000			
Pengembangan sarana dan prasarana Terminal	14.998.000	6.655.000	44,37	50,00
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	41.000.000			
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	41.000.000	12.500.000	30,49	30,47
Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	13.500.000			
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	13.500.000	0	0	0
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	132.000.000			
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	132.000.000	102.558.100	77,70	62,00
JUMLAH	5.046.867.893	2.473.318.165	49,01	35,47

17. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Tabel 2.17
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Prioritas Program dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.610.749.913,00	2.096.369.442,00	45,47%	55,48%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.000.000,00	22.100.900,00	35,65	46,67%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.400.000,00	11.100.000,00	77,08	80,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.500.000,00	5.700.000,00	76,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.000.000	800.900,00	8,90	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.300.000	4.500.000,00	71,43	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.391.000	-	0,00	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.851.000	-	0,00	0,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.558.000	-	0,00	0,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.316.897.513	1.393.239.311,00	60,13	41,67%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.243.277.513	1.356.607.561,00	60,47	50,00%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	66.620.000	33.831.750,00	50,78	50,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.000.000	2.800.000,00	40,00	40,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000	3.800.000,00	76,00	75,00%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	3.800.000,00	76,00	75,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.500.000	17.564.684,00	78,07	75,00%

Prioritas Program dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22.500.000	17.564.684,00	78,07	66,67%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.413.000.000	285.231.881,00	20,19	50,00%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	4.988.442,00	49,88	46,15%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.110.000.000	80.592.000,00	7,26	20,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	9.960.000,00	49,80	42,86%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	3.134.600,00	39,18	50,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	5.000.000,00	33,33	33,33%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	181.556.839,00	72,62	72,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	686.352.400	333.908.791,00	48,65	50,00%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000,00	100,00	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.452.400	47.058.796,00	53,20	50,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	596.900.000	285.849.995,00	47,89	50,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.000.000	40.523.875,00	38,59	50,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.000.000	28.353.875,00	33,36	33,33%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	12.170.000,00	60,85	66,67%
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.230.000.000	812.268.788,00	66,04	66,04%
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.230.000.000	812.268.788,00	66,04	66,04%
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	15.000.000	-	0,00	0,00%
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	150.000.000	119.650.000,00	79,77	66,67%
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	20.000.000	12.230.888,00	61,15	66,67%
Pelayanan Informasi Publik	20.000.000	-	0,00	0,00%

Prioritas Program dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
Layanan Hubungan Media	1.000.000.000	680.387.900,00	68,04	50,00%
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	25.000.000	-	0,00	0,00%
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3.680.000.000	351.434.193,00	9,55	24,24%
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.240.000.000	159.843.735,00	4,93	4,93%
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	25.820.400,00	32,28	50,00%
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.160.000.000	134.023.335,00	4,24	50,00%
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	440.000.000	191.590.458,00	43,54	43,55%
Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	8.472.242,00	16,94	0,00%
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	120.000.000	58.182.650,00	48,49	0,00%
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	50.000.000	25.533.000,00	51,07	0,00%
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	50.000.000	33.273.600,00	66,55	0,00%
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	60.000.000	32.715.600,00	54,53	0,00%
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	40.000.000	-	0,00	0,00%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	70.000.000	33.413.366,00	47,73	0,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	236.780.000	93.100.350,00	39,32	40,00%
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	236.780.000	93.100.350,00	39,32	40,00%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	95.000.000	20.490.250,00	21,57	21,33%

Prioritas Program dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	40.000.000	11.130.100,00	27,83	33,33%
Membangun Metadata Statistik Sektoral	86.780.000	61.480.000,00	70,85	100,00%
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	15.000.000	-		25,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	175.000.000	70.202.612,00	40,12	51,00%
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	51.988.612,00	34,66	30,00%
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	51.988.612,00	34,66	30,00%
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	18.214.000,00	72,86	72,00%
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	18.214.000,00	72,86	72,00%
JUMLAH	9.932.529.913	3.423.375.385,00	34,47%	47,35%

18. Dinas Koperasi dan UKM

Tabel 2.18
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	%	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.302.121.059	1.794.627.285	54,35%	76,32
Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja	24.804.150	15.613.056	62,95%	91,67
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.367.300	3.000.000	47,12%	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.414.750	3.114.750	91,21%	100,00

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	%	%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.004.100	3.114.000	77,77%	75,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.772.000	2.141.153	77,24%	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.016.400	1.243.153	41,21%	75,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	5.229.600	3.000.000	57,37%	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.853.516.344	1.546.252.284	54,19%	69,89
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.795.815.294	1.519.252.284,00	54,34%	73,12
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	57.701.050	27.000.000,00	46,79%	66,67
Administrasi Umum Perangkat Daerah	139.000.000	84.883.634	61,07%	72,27
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	950.000	19,00%	60,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.000.000	3.620.000	32,91%	75,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.000.000	80.313.634	65,30%	81,82
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	255.325.565	136.972.311	53,65%	72,78
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	500.000	50,00%	76,67
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	46.625.565	18.092.311	38,80%	66,67
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	207.700.000	118.380.000	57,00%	75,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.475.000	10.906.000	37,00%	75,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.475.000	10.906.000	37,00%	75,00
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	29.000.000	3.200.000	11,03%	40,00
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	29.000.000	3.200.000	11,03%	40,00
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan	29.000.000	3.200.000	11,03%	40,00

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	%	%
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	29.000.000	4.000.000	13,79%	40,00
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	29.000.000	4.000.000	13,79%	40,00
Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi	29.000.000	4.000.000	13,79%	40,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	29.000.000	6.442.600	22,22%	50,00
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	29.000.000	6.442.600	22,22%	50,00
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	29.000.000	6.442.600	22,22%	50,00
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	29.000.000	8.265.200	28,50%	75,00
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	29.000.000	8.265.200	28,50%	75,00
Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	29.000.000	8.265.200	28,50%	75,00
Jumlah	3.418.121.059	1.816.535.085	53,14%	56,26

19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 2.19
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Prioritas Program/Kegiatan/SubKegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota				
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.000.000	9.000.000	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.850.000	4.850.000	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.750.000	5.750.000	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.950.000	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.250.000	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.400.000	7.400.000	100,00	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.100.000	4.100.000	100,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.395.142.578	1.288.835.947	53,81	59,19
Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47.160.000	21.220.000	45,00	49,50
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.500.000	4.500.000	100,00	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	-	-	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	2.725.000	54,50	59,95
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	2.500.000	50,00	55,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.040.000	43.794.944	35,31	38,84

Prioritas Program/Kegiatan/SubKegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.541.218	60.124.919	38,66	42,52
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	1.400.000	28,00	30,80
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	654.186.000	408.330.000	62,42	68,66
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.000.000	4.925.000	98,50	98,50
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000	4.925.000	98,50	98,50
Program Pengembang Iklim Penanaman Modal				
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	50.000.000	8.500.000	17,00	18,70
Program Promosi Penanaman Modal				
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	95.000.000	79.907.800	84,11	84,95
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	4.733.200	6,76	7,44
Program Pelayanan Penanaman Modal				
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	56.470.000	36.858.104	65,27	65,27
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	10.000.000	4.879.800	48,80	49,29
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	35.000.000	12.994.100	37,13	38,98
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal				
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	15.000.000	2.442.600	16,28	17,91

Prioritas Program/Kegiatan/SubKegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
JUMLAH	3.796.339.796	2.024.696.414	53,33	58,67

20. Dinas Pemuda dan Olah Raga

Tabel 2.20
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (RP)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
URUSAN PEMERINTAH WAJIB YG TDK BERKAITAN DGN PELAYANAN DASAR	13.085.579.190			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	13.085.579.190			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	3.277.786.690			
<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>7.707.500</i>	<i>7.707.500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	7.707.500	7.707.500	100	100
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>2.689.321.050</i>	<i>1.448.999.939</i>	<i>53,88</i>	<i>53,88</i>
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.590.681.050	1.393.029.839	53,77	53,77
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	98.640.000	55.970.100	56,74	56,74
<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>5.000.000</i>	<i>2.424.600</i>	<i>48,49</i>	<i>48,49</i>
Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	5.000.000	2.424.600	48,49	48,49
<i>Adminisrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>115.000.000</i>	<i>66.194.500</i>	<i>57,56</i>	<i>57,56</i>
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	5.000.000	-	0,00	0,00
Penyediaan bahan logistik kantor	10.000.000	-	0,00	0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	25.000.000	13.032.000	52,13	52,13
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	75.000.000	53.162.500	70,88	70,88
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>380.758.140</i>	<i>197.999.495</i>	<i>52,00</i>	<i>52,00</i>
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	61.478.140	20.283.595	32,99	32,99

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (RP)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
Penyediaan jasa layanan umum kantor	319.280.000	177.715.900	55,66	55,66
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	80.000.000	53.040.600	66,30	66,30
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan	45.000.000	23.959.500	53,24	53,24
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	35.000.000	29.081.100	83,09	83,09
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN.	306.792.500			
<i>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</i>	226.792.500	120.421.396	53,10	53,10
Koordinasi, Sinkronisasi dan peyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten / Kota	226.792.500	120.421.396	53,10	53,10
Pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	80.000.000	-	0,00	
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota	80.000.000	-	0,00	0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	8.671.000.000	1.118.624.300		
<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	2.201.000.000	203.468.300	9,24	9,24
Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga Kabupaten/Kota	2.201.000.000	203.468.300	9,24	9,24
<i>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</i>	3.060.000.000	231.426.000	7,56	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Singel Event	510.000.000	178.692.400	35,04	35,04
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam penyelenggaraan Kejuaraan	2.550.000.000	52.733.600	2,07	2,07
<i>Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</i>	2.560.000.000	620.770.800	24,25	24,25

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (RP)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
<i>Pemusatan Pelatihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)</i>	10.000.000	-	0,00	0,00
Pembinaan dan pengembangan atlet berprsetasi Kabupaten/Kota	1.050.000.000	620.770.800	59,12	59,12
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten / Kota	1.500.000.000	-	0,00	0,00
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	850.000.000	62.959.200	7,41	7,41
Penyelenggaraan, pengembangan dan permasalahan festival dan olahraga rekreasi	150.000.000	56.700.000	37,80	37,80
Pemanfaatan Olahraga Tradisional Dalam Masyarakat	700.000.000	6.259.200	0,89	0,89
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	830.000.000	312.537.000	37,66	37,66
<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</i>	830.000.000	156.268.500	47,35	47,35
Pengembangan kapasitas SDM kepramukaan tingkat daerah	330.000.000	156.268.500	47,35	47,35
Penyediaan Prasarana dan Sarana Ke Pramukaan Tingkat Daerah	500.000.000			
JUMLAH	13.085.579.190	2.940.254.830	22,47	22,47

21. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tabel 2.21
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	Plafon Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		(Rp)	(%)	Realisasi (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.463.673.474	1.774.589.764		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.896.400	19.137.550		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.053.500	7.505.300	74,65	74,65
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.392.000	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.453.300	2.617.050	40,55	40,55
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.391.150	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.763.100	2.139.350	44,92	44,92

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	Plafon Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		(Rp)	(%)	Realisasi (%)
Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	8.268.250	5.325.850	64,41	64,41
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.575.100	1.550.000	33,88	33,88
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.558.533.482	1.343.589.929		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.488.034.882	1.306.511.329	52,51	52,51
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70.498.600	37.078.600	52,59	52,59
Administrasi Umum Perangkat Daerah	311.990.840	129.964.365		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.587.500	1.680.500	46,84	46,84
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.703.340	29.494.640	47,04	47,04
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.250.000	9.720.000	45,74	45,74
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	224.450.000	89.069.225	39,68	39,68
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	392.689.402	193.509.320		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.950.000	650.000	33,33	33,33
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	33.139.402	14.059.320	42,42	42,42
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	357.600.000	178.800.000	50,00	50,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	105.811.950	40.873.200		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.131.950	30.845.400	37,10	37,10
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.680.000	10.027.800	44,21	44,21
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	204.129.500	5.085.200		
Pelindungan, Pengembangan, pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	54.129.500	5.085.200	9,39	9,39
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	150.000.000			
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam daerah Kabupaten/kota	285.778.900	41.030.200		

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	Plafon Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		(Rp)	(%)	Realisasi (%)
Pelindungan, Pengembangan, pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	225.433.500	41.030.200	18,20	18,20
Pembiayaan Sumber daya manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	60.345.400	-	-	-
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/kota	517.221.500	-		
Pembinaan Sumberdaya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	517.221.500	-	-	-
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	43.621.500	1.400.000		
Perlindungan Cagar Budaya	43.621.500	1.400.000	3,21	3,21
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	16.729.969.300	288.565.271		
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	367.574.200	15.231.100		
Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	367.574.200	15.231.100	4,14	4,14
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/kota	16.337.795.100	262.682.471		
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	39.090.100	20.324.529	51,99	51,99
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	675.675.000	242.357.942	35,87	35,87
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	15.623.030.000		-	-
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	24.600.000	10.651.700		
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	24.600.000	10.651.700	43,30	43,30
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	76.341.950	41.123.300		
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	76.341.950	41.123.300		
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	48.267.300	34.413.600	71,30	71,30
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi pariwisata Kabupaten /Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	28.074.650	6.709.700	23,90	23,90
Jumlah	21.269.984.724	2.104.278.335	9,89	9,89

22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel 2.22
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program Dan Kegiatan	Pelapon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	5	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.391.216.377	1.531.053.679	45,15%	45,15%
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	31.997.150	8.983.700	28%	28,08%
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	6.960.950	3.637.000	52,25%	52,25%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.415.100	-	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.648.600	1.461.100	31,43%	31,43%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.016.100	-	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.145.300	-	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.240.300	2.140.300	40,84%	40,84%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.570.800	1.745.300	38,18%	38,18%
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2.937.382.155	1.336.839.259	45,51%	45,51%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.871.974.455	1.318.910.859	45,92%	45,92%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	62.839.300	15.960.000	25,40%	25,40%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	2.568.400	1.968.400	76,64%	76,64%
<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	2.820.400	1.620.400	57,45%	57,45%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.820.400	1.620.400	57,45%	57,45%
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	61.280.272	31.440.322	51,31%	51,31%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	500.000	50,00%	50,00%

Program Dan Kegiatan	Pelapon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	5	5
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.965.372	2.108.722	53,18%	53,18%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000	2.500.000	83,33%	83,33%
Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	500.000	20,00%	20,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.814.900	25.831.600	50,83%	50,83%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	328.911.400	140.769.998	42,80%	42,80%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.585.000	710.000	44,79%	44,79%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	52.809.000	17.000.000	32,19%	32,19%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.357.400	1.000.000	11,97%	11,97%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	266.160.000	122.059.998	45,86%	45,86%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.825.000	11.400.000	41,55%	41,55%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.825.000	9.900.000	41,55%	41,55%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000	1.500.000	30,00%	30,00%
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	237.000.000	73.953.720	31,20%	31,20%
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	8.670.000	28,90%	28,90%
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	8.670.000	43,35%	43,35%
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	10.000.000	-	0,00%	0,00%
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	207.000.000	65.283.720	31,54%	31,54%
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	96.000.000	6.365.200	6,63%	6,63%
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	12.000.000	400.000	3,33%	3,33%
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	99.000.000	58.518.520	59,11%	59,11%
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	14.383.140	-	0,00%	0,00%

Program Dan Kegiatan	Pelapon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	5	5
<i>Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	14.383.140	-	0,00%	0,00%
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	14.383.140	-	0,00%	0,00%
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	25.552.300	14.352.200	45,49%	45,49%
<i>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</i>	13.220.300	6.013.300	45,49%	45,49%
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	13.220.300	6.013.300	45,49%	45,49%
<i>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</i>	12.332.000	8.338.900	67,62%	67,62%
Akuisi, Pengelolaan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	12.332.000	8.338.900	67,62%	67,62%
JUMLAH	3.668.151.817	1.619.359.599	44,15%	44,15%

23. Dinas Perikanan

Tabel 2.23
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Perikanan

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	%	%
<i>Program Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>				
<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.351.250	1.848.800	55,17	55,17
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.756.100	2.756.100	100,00	100,00
<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	%	%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.547.799.243	2.458.280.237	69,29	58,33
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	57.000.000	22.100.000	38,77	38,77
<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.206.950	6.540.000	71,03	71,03
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000	36.037.000	40,04	40,04
<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.939.138	22.826.180	48,63	50,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	312.020.000	166.860.000	53,48	50,00
<i>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</i>				
<i>Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</i>				
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	344.000.000	24.082.700	7,00	7,00
<i>Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i>				
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	180.000.200	-	0,00	0,00
JUMLAH	4.593.072.881	2.741.331.017	59,68	51,00

24. Dinas Pertanian dan Peternakan

Tabel 2.24
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan

Program Dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan Keuangan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi %	(%)
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (pertanian/perkebunan)	18.806.036.995	8.597.361.332	45,72	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.000.000	0	-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	2.316.200	23,16	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.500.000	-	-	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA -SKPD	4.500.000	0	-	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA -SKPD	4.500.000	0	-	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	0	-	50,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.500.000	0	-	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.760.101.767	8.205.823.655	46,20	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.674.781.767	8.178.081.155	46,27	60,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	82.320.000	26.895.000	32,67	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000	847.500	28,25	50,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000	217.000	4,34	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	217.000	4,34	50,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	217.500.000	38.592.197	17,74	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	3.782.000	37,82	50,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000	5.162.500	68,83	70,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.000.000	10.350.000	29,57	35,00

Program Dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan Keuangan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi %	(%)
1	2	3	4	5
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.000.000	19.297.697	11,70	40,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	723.952.028	352.728.480	48,72	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.247.528	33.008.480	44,46	50,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	649.704.500	319.720.000	49,21	50,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.483.200	-	-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.443.200	-	-	0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	11.600.000	-	-	0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.440.000	-	-	0,00
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	655.000.000	84.377.650	12,88	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	280.000.000	15.075.750	5,38	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	135.000.000	-	-	53,00
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	145.000.000	15.075.750	10,40	100,00
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	225.000.000	38.446.150	17,09	
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan / Tanaman	25.000.000	13.150.250	52,60	50,00
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik Hewan/Tanaman	150.000.000	7.156.000	4,77	0,00
Pemanfaatan SDG Hewan / Tanaman	50.000.000	18.139.900	36,28	50,00
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	30.855.750	30,86	
Pengendalian Penyediaan Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	100.000.000	30.855.750	30,86	50,00
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota Lain	50.000.000	-	-	

Program Dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan Keuangan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi %	(%)
1	2	3	4	5
Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Provinsi Lain	50.000.000	3.191.300	6,38	0,00
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.836.073.000	-	-	
Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	3.836.073.000	-		
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.075.000.000	2.135.000	0,20	0,00
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.761.073.000	94.298.500	3,42	0,00
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	225.000.000	91.585.000	40,70	
Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kab / Kota	225.000.000	91.585.000	40,70	
Pembebasan Penyakit Hewan Menular	225.000.000	91.585.000	40,70	50,00
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	50.000.000	9.397.000	18,79	
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota	50.000.000	9.397.000	18,79	
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	50.000.000	9.397.000	18,79	50,00
Program Penyuluhan Pertanian	2.568.423.000	955.450.000	37,20	
Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.568.423.000	955.450.000	37,20	
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2.057.423.000	955.450.000	46,44	50,00
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa	161.000.000			
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	350.000.000	136.800.000		100,00
Jumlah	26.140.532.995	9.738.170.982	37,25	22,55

25. Dinas Perkebunan

Tabel 2.25
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Perkebunan

Prioritas Program Dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
Perencanaan, Penanganan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.050.500	4.937.200	54,55	55,05
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.853.000	2.008.900	41,40	50,02
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.684.100	2.547.300	29,33	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.958.600	3.943.600	99,62	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.286.500	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	7.440.600	-	-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.118.200	1.124.300	27,30	30,15
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.747.560.388	2.019.383.351	53,89	53,89
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70.300.000	32.250.000	45,87	56,93
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	4.503.100	2.928.100	65,02	78,35
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.609.600	8.787.600	44,81	54,80
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Listrik	33.917.300	16.820.000	49,59	49,59
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.398.500	9.922.300	42,41	42,41
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-undangan	28.020.000	14.750.000	52,64	52,64
Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.597.950	46.243.026	34,10	34,10
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

Prioritas Program Dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.728.480	16.820.057	41,30	41,30
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	500.160.000	237.791.300	47,54	47,54
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	109.162.600	31.290.380	28,66	28,66
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.127.700	17.733.210	24,93	24,93
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.000.000	5.030.000	19,35	55,00
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	79.534.400	9.648.465,00	12,13	56,61
Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten /Kota				
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	400.000.000	82.158.900	20,54	22,00
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				
Pengembangan Prasarana Pertanian				
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	75.000.000	24.997.550	33,33	33,33
Pembangunan Prasarana Pertanian				
Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.650.000.000	16.266.300	0,99	1,04
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana				
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Holtikultura dan Perkebunan	119.998.250	25.526.400	21,27	32,90
Program Perizinan Usaha Pertanian				

Prioritas Program Dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah				
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	75.000.000	31.210.500	41,61	41,61
Program Penyuluhan Pertanian				
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	26.958.600	-	-	-
Jumlah	7.278.968.368	2.664.118.739	36,60	43,45

26. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 2.26
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keunagan		Fisik
		(Rp)	(%)	(%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.947.763.002	2.368.145.293	47,86	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.954.564	15.453.600	37,73	37,73
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.383.584	9.383.400	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.032.552	1.800.000	35,77	35,77
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.000.008	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.105.220	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4.445.728	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.717.080	-	0,00	0,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keunagan		Fisik
		(Rp)	(%)	(%)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.270.392	4.270.200	100,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.457.378.833	1.896.452.511	54,85	0,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.383.807.237	1.866.001.011	55,15	55,15
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	68.880.000	27.600.000	40,07	40,07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4.691.596	2.851.500	60,78	60,78
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.000.000	1.199.800	20,00	20,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000	1.199.800	20,00	20,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	246.305.740	78.619.615	31,92	31,92
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000	-	0,00	0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.500.000	-	0,00	0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.000.000	9.616.900	24,04	24,04
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30.000.000	1.293.500	4,31	4,31
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.805.740	67.709.215	40,84	40,84
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	612.123.865	292.218.800	47,74	0,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	-	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.743.865	19.613.400	36,49	36,49
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	556.880.000	272.605.400	48,95	48,95

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keunagan		Fisik
		(Rp)	(%)	(%)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.000.000	32.679.497	22,54	22,54
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.000.000	32.679.497	24,21	24,21
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	-	0,00	0,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	260.000.000	11.025.350	4,24	
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	260.000.000	11.025.350	4,24	4,24
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	200.000.000	-	0,00	0,00
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	60.000.000	11.025.350	18,38	18,38
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	60.000.000	10.862.600		
Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	60.000.000	10.862.600	18,10	18,10
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	20.000.000	1.250.000	6,25	6,25
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	40.000.000	9.612.600	24,03	24,03
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	60.000.000	-		
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	60.000.000	29.633.520	49,39	49,39
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	50.000.000	23.258.520	46,52	46,52
Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	10.000.000	6.375.000	63,75	63,75

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keunagan		Fisik
		(Rp)	(%)	(%)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	40.000.000	-	0,00	
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	40.000.000	-	0,00	0,00
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	40.000.000	-	0,00	0,00
URUSAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI	20.000.000	-	0,00	
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	-	0,00	0,00
Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	20.000.000	-	0,00	0,00
TOTAL	4.947.763.002	2.368.145.293	47,86	47,86

27. Sketariat Daerah

Tabel 2.27
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Sekretariat Daerah Kab. Musi Rawas

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN (Rp)	Realisasi			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
		Keuangan		Fisik	
		Rp	%	%	
1	2	3	4	5	6
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	166.600.000	85.345.980	51,23%	29%	Bagian Perencanaan dan Keuangan

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN (Rp)	Realisasi			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
		Keuangan		Fisik	
		Rp	%	%	
1	2	3	4	5	6
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.500.000	5.432.000	43,46%	0%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.900.000	6.873.000	46,13%	0%	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	3.752.200	37,52%	0%	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	11.000.000	4.430.000	40,27%	0%	
Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Realisasi Kinerja SKPD	19.000.000	11.478.100	60,41%	100%	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.691.800	5.237.200	48,98%	0%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.582.178.489	7.249.771.400	57,62%	57%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	593.270.000	256.315.800	43,20%	50%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran	11.725.900	4.638.300	39,56%	25%	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	90.147.000	33.030.300	37%	25%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
Total Persentasi Realisasi	13.522.013.189	7.666.304.280	56,69%	25,97%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	190.100.000	152.742.200	80,35%	79%	Bagian Umum
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	56.000.000	-	0%	0%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200.000.000	111.245.000	55,62%	56%	Bagian Umum

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN (Rp)	Realisasi			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
		Keuangan		Fisik	
		Rp	%	%	
1	2	3	4	5	6
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	447.000.000	85.600.000	19%	100%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250.200.000	63.245.000	25,28%	25%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000	9.975.000	10%	10%	
				0%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	250.000.000	109.739.000	44%	44%	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	250.000.000	132.500.000	53,00%	20%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.800.000	507.770.400	50,74%	42,24%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	775.000.000	-	0%	0%	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.100.000.000	8.492.400	0%	0%	
Pengadaan Mebel	700.000.000	30.929.800	4%	3%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	4.000.000	40%	100%	Bagian Umum
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.443.703.875	637.418.240	44,15%	100%	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	750.000.000	318.068.000	42,41%	42,42%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.529.400.000	1.726.489.996	38,12%	100%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.400.000.000	684.112.000	48,87%	100%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	1.750.000.000	862.125.000	49,26%	100%	

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN (Rp)	Realisasi			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
		Keuangan		Fisik	
		Rp	%	%	
1	2	3	4	5	6
Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
Pemeliharaan Mebel	100.000.000	46.000.000	46,00%	38%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	430.000.000	212.500.000	49,42%	50%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400.000.000	145.000.000	36,25%	100%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	379.000.000	155.530.000	41,04%	100%	
Administrasi Keuangan dan Operator Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	199.965.280	95.115.920	47,57%	100%	Bagian Umum
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	109.400.000	-	0%	0%	
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	15.000.000	5.525.000	37%	0%	
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	150.000.000	25%	25%	
Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	3.576.722.600	1.400.247.245	39,15%	25%	Bagian Umum
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.078.600.000	423.507.000	39,26%	32,88%	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	580.000.000	127.630.000	22,01%	21,70%	
Total Persentasi Realisasi	24.670.891.755	8.205.507.201	33,26%	47,14%	
Penataan Organisasi					
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	332.070.950	112.248.200	33,80%	0%	Bagian Organisasi

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN (Rp)	Realisasi			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
		Keuangan		Fisik	
		Rp	%	%	
1	2	3	4	5	6
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	247.136.100	62.647.600	25,35%	0%	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	285.089.000	82.016.100	28,77%	0%	
Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana	61.963.100	15.683.400	25%	0%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	43.740.850	28.913.000	66%	0%	
Total Persentasi Realisasi	970.000.000	301.508.300	31,08%	0%	
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Fasilitasi Keprotokolan	1.500.000.000	554.160.770	36,94%	38,33%	
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	525.000.000	163.385.007	31,12%	25%	
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	700.000.000	197.064.844	28,15%	0%	
Total Persentasi Realisasi	2.725.000.000	914.610.621	33,56%	31,72%	
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					
Administrasi Tata Pemerintahan					
Penataan Administrasi Pemerintahan	400.000.000	189.908.700	47,48%	60%	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	330.000.000	94.507.200	28,64%	55%	
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	424.400.000	95.938.100	22,61%	50%	
Fasilitas Kerja Sama Daerah					Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	100.600.000	41.123.992	40,88%	65%	
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	55.000.000	15.199.400	0%	50%	
Total Persentasi Realisasi	1.310.000.000	436.677.392	33,33%	47,69%	
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					
Fasilitasi Pengolaan Bina Mental Spiritual	20.028.514.000	6.758.678.700	33,75%	67%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	75.000.000	-	0%	0%	

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN (Rp)	Realisasi			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
		Keuangan		Fisik	
		Rp	%	%	
1	2	3	4	5	6
Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	75.000.000	-	0%	0%	
Total Persentasi Realisasi	20.178.514.000	6.758.678.700	33,49%	42,79%	
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum					Bagian Hukum
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	203.154.000	57.183.000	28,15%	59,38%	
Fasilitasi Bantuan Hukum	563.078.000	173.268.500	30,77%	6,67%	
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	683.768.000	246.198.000	36,01%	40%	
Total Persentasi Realisasi	1.450.000.000	476.649.500	32,87%	28,44%	
Program Perekonomian dan Pembangunan					
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	150.000.000	46.182.750	30,79%	25%	Bagian Perekonomian dan SDA
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	175.000.000	61.121.250	34,93%	25%	
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	88.000.000	30.877.800	35,09%	50%	
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam					
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	134.000.000	72.261.604	53,93%	50%	Bagian Perekonomian dan SDA
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	53.000.000	23.447.524	44,24%	100%	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	50.000.000	13.522.500	27,05%	50%	
Total Persentasi Realisasi	650.000.000	247.413.428	38,06%	50%	
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan					
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	916.780.000	285.672.403	31,16%	33%	Bagian Administrasi Pembangunan
				70%	
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	116.610.000	58.656.450	50,30%	50%	

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN (Rp)	Realisasi			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
		Keuangan		Fisik	
		Rp	%	%	
1	2	3	4	5	6
Pengelola Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	116.610.000	49.243.850	42,23%	50%	
Total Persentasi Realisasi	1.150.000.000	393.572.703,00	34,22%	50,83%	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	230.000.000	121.511.700	53%	50%	
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	220.000.000	65.238.700	30%	25%	
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	230.000.000	28.867.000	13%	0%	
Total Persentasi Realisasi	680.000.000	215.617.400	32%	19%	
	67.306.418.944	25.616.539.525	38,06%	34,33%	

28. Sekretariat DPRD

Tabel 2.28
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Sekretariat DPRD

Prioritas Program Dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Penyerapan Keuangan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.798.806.132	17.640.760.380	35,42	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.922.875.961	1.617.077.764	32,85	4,08
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	382.506.250	0	0,00	50,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.846.822.000	499.588.500	27,05	10,20
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.750.000.000	0	0,00	50,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.611.714.800	721.624.277	27,63	8,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	764.844.300	92.362.000	12,08	4,00

Prioritas Program Dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Penyerapan Keuangan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	33.740.742.821	13.803.234.039	40,91	50,00
Layanan Administrasi DPRD	2.779.300.000	906.873.800	32,63	50,00
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	46.269.257.699	14.894.789.827	32,19	
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	7.261.829.120	2.878.159.382	39,63	6,25
Pembahasan Kebijakan Anggaran	10.780.958.900	151.419.800	1,40	50,00
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2.930.047.400	1.864.250.894	63,63	50,00
Peningkatan Kapasitas DPRD	5.892.458.100	563.593.600	9,56	18,75
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.090.098.750	1.087.634.800	52,04	50,00
Fasilitasi Tugas DPRD	17.313.865.429	8.349.731.351	48,23	50,00
JUMLAH	96.068.063.831	32.535.550.207	33,87	14,65

29. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tabel 2.29
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Prioritas Program dan Kegiatan	Plafon Anggaran	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	4.732.992.232	2.371.636.473	50,11%	51,95%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.209.000	16.366.000	23,99%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.199.500	4.619.000	50,21%	78,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.742.500	1.608.000	18,39%	53,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.178.000	1.908.000	26,58%	35,50%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.049.000	-	0,00%	57,25%

Prioritas Program dan Kegiatan	Plafon Anggaran	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	11.505.000	2.781.000	24,17%	35,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.535.000	5.450.000	24,18%	41,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.393.112.536	1.889.933.497	55,70%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.259.948.336	1.832.363.297	56,21%	56,21%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	110.047.400	49.276.400	44,78%	44,78%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	23.116.800	8.293.800	35,88%	40,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.136.900	600.000	6,57%	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.136.900	600.000	6,57%	43,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.364.000	940.000	4,20%	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22.364.000	940.000	4,20%	13,80%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	568.675.420	203.476.644	35,78%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.508.720	-	0,00%	0,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.385.000	-	0,00%	0,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.124.500	1.000.000	4,52%	4,52%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.118.550	-	0,00%	0,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	90.000.000	50.000.000	55,56%	67,50%

Prioritas Program dan Kegiatan	Plafon Anggaran	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	398.538.650	152.476.644	38,26%	51,50%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	520.900.526	240.647.282	46,20%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.430.000	-	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.650.199	31.492.455	36,34%	36,34%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	432.820.327	209.154.827	48,32%	48,32%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.593.850	19.673.050	13,06%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.568.000	7.482.550	10,17%	10,17%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.955.850	7.420.500	18,57%	18,57%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.070.000	4.770.000	39,52%	45,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	-	0,00%	0,00%
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	817.739.000	208.373.148	25,48%	49,02%
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	423.976.750	158.920.088	37,48%	
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	89.166.200	-	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Konsultasi Publik	35.826.500	35.735.127	99,74%	99,80%
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	38.921.450	32.237.350	82,83%	97,50%
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	96.570.150	58.177.699	60,24%	98,00%
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	23.553.300	12.953.300	55,00%	97,50%

Prioritas Program dan Kegiatan	Plafon Anggaran	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	139.939.150	19.816.612	14,16%	38,00%
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	114.472.400	10.000.000	8,74%	
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	114.472.400	10.000.000	8,74%	20,00%
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	279.289.850	39.453.060	14,13%	
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	62.312.950	25.408.600	40,78%	57,50%
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	216.976.900	14.044.460	6,47%	45,00%
PROGRAM KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.446.359.550	309.187.508	21,38%	33,48%
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	485.341.550	139.113.942	28,66%	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJP, RPJMD dan RKPD)	70.576.000	51.357.918	72,77%	78,75%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	30.000.000	14.208.400	47,36%	54,60%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	30.000.000	9.344.400	31,15%	45,00%

Prioritas Program dan Kegiatan	Plafon Anggaran	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	61.754.000	32.288.390	52,29%	63,15%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJP, RPJMD dan RKPD)	30.000.000	18.537.234	61,79%	75,35%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	46.000.000	-	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	30.000.000	8.918.400	29,73%	40,00%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	187.011.550	4.459.200	2,38%	22,00%
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	465.368.000	79.353.712	17,05%	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJP, RPJMD dan RKPD)	57.750.000	10.707.900	18,54%	34,00%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	52.000.000	12.304.600	23,66%	36,50%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	63.000.000	6.300.000	10,00%	21,00%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	292.618.000	50.041.212	17,10%	27,00%
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	495.650.000	90.719.854	18,30%	

Prioritas Program dan Kegiatan	Plafon Anggaran	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	25.000.000	1.830.800	7,32%	12,25%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	293.927.500	56.688.202	19,29%	32,50%
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	26.722.500	-	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	25.000.000	-	0,00%	0,00%
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	125.000.000	32.200.852	25,76%	43,65%
	6.997.090.782	2.889.197.129	41,29%	47,79%

30. Badan Penelitian dan Pengembangan

Tabel 2.30
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Badan Penelitian dan Pengembangan

Prioritas Program Dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.301.211.202	1.529.002.614	46,32%	47,31%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.920.434.502	1.467.346.310	50,24%	54,63%

Prioritas Program Dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.027.200	2.657.100	52,85%	75,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.027.200	2.657.100	52,85%	75,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.439.393.464	1.238.386.513	50,77%	57,27%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.390.883.464	1.217.676.513	50,93%	60,00%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48.510.000	20.710.000	42,69%	54,55%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.212.900	0	0,00%	35,00%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.212.900	0	0,00%	35,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	147.991.100	81.865.300	55,32%	56,25%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.650.000	0	0,00%	70,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.568.300	5.600.000	21,90%	80,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	0	0,00%	15,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.772.800	76.265.300	69,48%	60,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.817.738	110.023.197	42,02%	45,23%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.177.738	27.054.197	40,27%	45,45%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	194.640.000	82.969.000	42,63%	45,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.992.100	34.414.200	56,42%	59,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.232.300	16.869.200	52,34%	55,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.759.800	17.545.000	61,01%	63,00%
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	380.776.700	61.656.304	16,19%	40,00%
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	380.776.700	61.656.304	16,19%	40,00%

Prioritas Program Dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	126.982.700	20.387.074	16,06%	40,00%
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	126.988.100	17.883.500	14,08%	40,00%
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	126.805.900	23.385.730	18,44%	40,00%
JUMLAH	3.301.211.202	1.529.002.614	46,32%	47,31%

31. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 2.40
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PELAPON ANGGARAN (Rp.)	Penyerapan		
		Capaian target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
KEUANGAN	352.217.312.898,00		-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.259.921.360,00		-	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	180.000.000,00		-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.091.400	6.647.700,00	38,89	25,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.166.350		-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.928.350	4.746.000,00	43,43	33,33
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.477.350	5.577.350,00	74,59	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8097500	3.466.000,00	42,80	33,33
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	14.055.000	11.055.000,00	78,66	66,67

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PELAPON ANGGARAN (Rp.)	Penyerapan		
		Capaian target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.184.050	55.327.350,00	48,88	50,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.381.216.340,00		-	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38.916.964.783	10.115.839.396,00	25,99	57,14
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	455.706.150	118.402.500,00	25,98	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.545.407	2.693.000,00	31,51	46,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000,00		-	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00	1.818.750,00	18,19	50,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	158.000.000,00		-	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	108.000.000,00		-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00		-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	505.000.000,00		-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	8.088.500,00	53,92	50,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	15.024.000,00	50,08	44,44
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000,00	10.983.000,00	54,92	50,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.000.000,00	22.865.250,00	28,58	50,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan	30.000.000,00	5.910.000,00	19,70	50,00
Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.000.000,00	129.886.998,00	39,36	53,57
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	770.705.020,00		-	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,00	1.200.000,00	17,14	50,00
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	120.447.020,00	63.570.740,00	52,78	50,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	12.000.000,00	30,00	50,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PELAPON ANGGARAN (Rp.)	Penyerapan		
		Capaian target (Rp)	Reali sasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	603.258.000,00	257.910.000,00	42,75	50,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	255.000.000,00		-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	220.000.000,00	92.829.167,00	42,20	50,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000,00	16.975.000,00	48,50	50,00
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			#DIV/0!	#DIV/0!
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	310.057.391.538,00		-	-
Korrdinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah	2.035.000.000,00		-	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	110.000.000,00	19.119.450,00	17,38	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	125.000.000,00	28.562.500,00	22,85	-
Koordinasi dan Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	100.000.000,00	18.771.100,00	18,77	-
Koordinasi dan Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	50.000.000,00	7.377.000,00	14,75	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	250.000.000,00	28.838.700,00	11,54	-
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	300.000.000,00	77.537.600,00	25,85	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	150.000.000,00	51.962.700,00	34,64	40,00
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	50.000.000,00	31.038.200,00	62,08	-
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	900.000.000,00	280.644.550,00	31,18	50,00
Korrdinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	450.000.000,00		-	

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PELAPON ANGGARAN (Rp.)	Penyerapan		
		Capaian target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Korrdinasi , Fasilitasi, asistensi, Sinkronisasi, Suprvisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	250.000.000,00	102.952.707,00	41,18	50,00
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	200.000.000,00	29.772.405,00	14,89	50,00
Korrdinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah	700.000.000,00		-	
Korrdinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	90.000.000,00	69.781.550,00	77,54	58,33
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	200.000.000,00	144.647.879,00	72,32	40,82
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Petanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	200.000.000,00	45.269.080,00	22,63	75,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	90.000.000,00	14.956.000,00	16,62	-
Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	50.000.000,00	15.442.000,00	30,88	50,00
Pembinaan akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	70.000.000,00	51.409.200,00	73,44	100,00
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	306.372.391.538,00		-	
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	271.014.312.200	104.699.871.900	38,63	60,00
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	16.311.011.400		-	-
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	19.047.067.938			

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PELAPON ANGGARAN (Rp.)	Penyerapan		
		Capaian target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	500.000.000,00		-	
Implementasi dan Pemeliharaan sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	500.000.000,00	67.835.000,00	13,57	50,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	900.000.000,00		-	
Pengelolaan Barang Milik Daerah	900.000.000,00		-	
Penyusunan Standar Harga	60.219.200,00	6.989.700,00	11,61	100,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	13.172.300,00	1.305.300,00	9,91	0,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah	76.900.900,00	25.322.600,00	32,93	41,67
Inventarisasi Barang Milik Daerah	90.000.000,00	37.928.300,00	42,14	25,00
Penilaian Barang Milik Daerah	86.307.000,00		-	0,00
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	77.916.000	15.547.000,00	19,95	0,00
Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	340.263.500,00	19.135.000,00	5,62	34,80
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	155.221.100,00	56.123.664,00	36,16	50,00
	352.217.312.898,00	116.910.956.786	33,19	40,61

32. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Tabel 2.41
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.200.100	65.138.498	54,19	54,19
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.000.000	13.351.000	44,50	44,50
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30.000.000	4.975.000	16,58	16,58
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.200.100	46.812.498	77,76	77,76
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.326.204.959	2.076.530.864	28,34	28,34
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.225.484.959	2.048.110.864	28,35	28,35
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75.720.000	19.450.000	25,69	25,69
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000	8.970.000	35,88	35,88
Administrasi Umum Perangkat Daerah	195.000.000	76.576.345	39,27	39,27
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	2.650.000	26,50	26,50
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.000.000	13.782.000	25,06	25,06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	1.500.000	15,00	15,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000	58.644.345	48,87	48,87
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	523.963.520	274.929.746	52,47	52,47
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.003.520	30.419.746	47,53	47,53
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	5.010.000	50,10	50,10
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	449.960.000	239.500.000	53,23	53,23

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.000.000	19.340.400	28,87	28,87
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.000.000	8.959.150	40,72	40,72
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000	10.381.250	23,07	23,07
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	360.000.000	119.838.400	33,29	33,29
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	65.000.000	12.600.400	19,39	19,39
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	35.000.000	15.071.600	43,06	43,06
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	65.000.000	32.618.500	50,18	50,18
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	55.000.000	14.237.300	25,89	25,89
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	65.000.000	23.708.200	36,47	36,47
Penagihan Pajak Daerah	75.000.000	21.602.400	28,80	28,80
JUMLAH	8.592.368.579	2.632.354.253	30,64	30,64

33. Inspektorat

Tabel 2.42
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Inspektorat

Prioritas Program/Kegiatan/SubKegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	PENYERAPAN		
		Capaian Target (Rp.)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / kota				
Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	15.317.200	3.810.000	24,87	60

Prioritas Program/Kegiatan/SubKegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	PENYERAPAN		
		Capaian Target (Rp.)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.304.000	975.000	13,35	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.118.200	600.000	6,58	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.473.200	1.275.000	23,30	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.598.000	600.000	7,90	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	12.573.000	3.620.000	28,79	50
				50
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.991.900	570.000	11,42	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.074.564.327	3.938.549.142	55,67	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	99.917.000	44.893.998	44,93	44
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	27.295.000		0,00	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	8.086.100	929.028	11,49	50
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	16.000.500	4.603.753	28,77	50
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	25.770.100	12.665.800	49,15	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45.750.000		0,00	
Monitoring dan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	24.346.500	1.974.885	8,11	100
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	891.899.500	244.879.517	27,46	100
				33
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40.075.000		0,00	15
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	80.000.000		0,00	23
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.964.800	3.790.000	19,98	20
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	179.300.000		0,00	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	159.405.500	28.670.000	17,99	20
	87.531.300	19.550.000	22,33	50

Prioritas Program/Kegiatan/SubKegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	PENYERAPAN		
		Capaian Target (Rp.)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan				68
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	41.650.000	10.430.000	25,04	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	403.807.000	210.901.681	52,23	52
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	389.207.000	85.462.440	21,96	100 22
Pengadaan Mebeler	39.800.000		0,00	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya	30.000.000		0,00	0 0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Penyediaan Jasa Surat menyurat	4.840.000	2.000.000	41,32	75 50
Penyediaan Jasa Komonikasi Sumber daya Air dan Listrik	196.615.500	42.791.123	21,76	50
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	368.955.240	172.328.000	46,71	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atatu Kendaraan Dinas Jabatan	95.089.400	10.389.687	10,93	100 100 100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perizinan Dinas operasional Lapangan	334.885.450	86.721.876	25,90	33 33 67 33
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.390.000	8.500.000	17,57	22
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.000.000		0,00	0
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN INTERNAL				
Penyelenggaraan Pengawasan Internal				
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.582.549.700	498.255.620	31,48	60
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	959.616.000	366.254.900	38,17	58

Prioritas Program/Kegiatan/SubKegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	PENYERAPAN		
		Capaian Target (Rp.)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
Reviu Laporan Kinerja	46.640.000	13.001.400	27,88	50
				50
Reviu Laporan Keuangan	85.147.500	61.219.500	71,90	100
Pengawasan Desa	966.375.000	264.494.200	27,37	57
Kerja Sama Pengawasan Internal	195.267.000	96.387.840	49,36	50
Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Pemeriksaan APIP	332.193.000	75.850.200	22,83	22
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	205.660.000	5.770.500	2,81	50
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	591.000.000	218.897.246	37,04	37
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan				
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	275.688.000	109.996.200	39,90	50
Pendampingan dan Asistensi				
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	142.500.000	62.340.000	43,75	44
Pendampingan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	270.000.000	81.735.600	30,27	32
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi	241.802.000	118.748.493	49,11	50
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penegakan Integritas	316.939.250	92.300.234	29,12	68
JUMLAH	17.075.898.167	7.006.732.863	41,03	67,53

34. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tabel 2.43
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Prioritas Program Dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.762.523.891	2.220.814.696	46,63	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	6.347.200	42,31	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	3.220.200	32,20	50,00

Prioritas Program Dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	3.127.000	62,54	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.781.670.291	1.929.814.268	51,03	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.711.530.291	1.900.859.268	51,21	57,14
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	64.800.000	26.500.000	40,90	41,67
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.340.000	2.455.000	45,97	50,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.500.000	-	-	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.500.000	-	-	25,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	-	-	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100.000.000	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	401.419.000	90.331.424	22,50	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	3.925.000	26,17	33,33
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	-	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.330.000	8.695.600	50,18	58,33
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	13.465.800	44,89	50,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	74.089.000	24.880.000	33,58	50,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	39.365.024	15,75	37,50
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	341.094.000	145.431.804	42,64	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	630.680	31,53	50,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.246.500	47.143.500	50,02	50,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	244.847.500	97.657.624	39,89	50,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.840.600	48.890.000	40,80	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	16.470.000	32,94	66,67

Prioritas Program Dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.010.600	22.670.000	56,66	75,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.830.000	9.750.000	32,69	33,33
Program Kepegawaian Daerah	1.942.000.000	311.462.743	16,04	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	417.000.000	101.865.674	24,43	
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	10.000.000	-	-	-
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	250.000.000	59.513.334	23,81	89,92
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	30.000.000	9.271.800	30,91	48,50
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	127.000.000	33.080.540	26,05	42,70
Mutasi dan Promosi ASN	1.395.000.000	198.825.220	14,25	
Pengelolaan Mutasi ASN	140.000.000	31.745.591	22,68	46,40
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	155.000.000	55.940.290	36,09	57,50
Pengelolaan Promosi ASN	1.100.000.000	111.139.339	10,10	153,13
Pengembangan Kompetensi ASN	55.000.000	7.729.849	14,05	
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	30.000.000	7.729.849	25,77	22,00
Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	25.000.000	-	-	-
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	75.000.000	3.042.000	4,06	
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	25.000.000	-	-	-
Pembinaan Disiplin ASN	50.000.000	3.042.000	6,08	25,00
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.137.649.000	177.976.130	15,64	
Pengembangan Kompetensi Teknis	591.834.000	114.327.267	19,32	
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	208.834.000	63.463.747	30,39	31,00
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	383.000.000	50.863.520	13,28	13,33

Prioritas Program Dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	545.815.000	63.648.863	11,66	
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	213.000.000	-	-	-
Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	332.815.000	63.648.863	19,12	50,00
JUMLAH	7.842.172.891	2.710.253.569	34,56	42,87

35. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 2.44
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	PENYERAPAN		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
KABUPATEN MUSI RAWAS				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.723.200	2.725.100	25,41	28,57
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	5.750.900	5.750.900	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	6.846.700	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	4.687.700	4.687.700	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	5.069.600	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Lap. Kinerja dan Ikhtas Realisasi kerja SKPD	8.818.800	3.709.850	42,07	42,07

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	PENYERAPAN		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.879.500	1.405.200	28,80	28,80
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.389.216.889	1.388.691.775	58,12	64,29
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.091.100	20.774.100	51,82	58,33
Koordinasi dan Penyusunan Lap.Keuangan Bulanan/TW/Semester SKPD	5.345.100	1.802.600	33,72	33,72
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.725.400	1.210.000	9,51	9,51
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.487.000	6.313.000	54,96	62,50
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.915.000	31.150.000	97,60	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.841.500	736.000	19,16	33,33
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	2.400.000	20,00	20,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275.000.000	77.382.944	28,14	30,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	600.000	20,00	20,00
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	56.710.116	17.687.481	31,19	33,33
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	315.287.800	148.463.800	47,09	50,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	132.010.400	6.314.500	4,78	15,38
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.020.000	11.450.000	49,74	57,14
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
Perumusan Kebijakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
Pelaksanaan kebijakan diBidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara Karakter bangsa,Pembauran kebangsaan,Bhineka Tunggal ika dan Sejarah Kebangsaan	918.010.600	189.894.100	20,69	90,80

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	PENYERAPAN		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	162.244.200	-	0,00	0,00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik				
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pilkada serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	51.549.900	13.948.200	27,06	33,33
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, PILKADA serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	180.578.150	-	0,00	0,00
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu Pilkada serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100.000.000	-	0,00	0,00
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan dan Partai Politik, Pilkada serta Pemantauan Situasi politik	1.130.670.800	87.008.670	7,70	10,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	PENYERAPAN		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				
Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan dibidang pendaftaran Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Dearah	75.000.000	8.543.800	11,39	14,29
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	138.737.100	36.566.800	26,36	33,33
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA				
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	417.297.500	280.342.090	67,18	75,00
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatassan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penangan Konflik di Daerah	108.988.900	46.824.600	42,96	50,00
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	298.714.800	75.445.319	25,26	41,67
JUMLAH	6.940.218.655	2.471.828.529	35,62	37,20

36. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 2.45
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Nama Program / Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	867.226.569	411.767.714	47,48	50,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.800.000	23.400.000	50,00	50,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.967.742	6.468.840	54,05	41,67
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	664.920.000	317.718.708	47,78	50,00
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				-
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				-
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	334.984.400	160.157.800	47,81	50,00
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	400.000.000	47.967.500	11,99	32,00
JUMLAH	2.325.898.711	967.480.562	41,60	46,86

37. Kecamatan STL Ulu Terawas

Tabel 2.46
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan STL Ulu Terawas

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.678.473.712	906.357.507	54,00	54,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.370.395.512	780.921.854	56,99	56,99
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1.315.025.112	753.754.854	57,32	64,32
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	55.370.400	27.167.000	49,06	49,06
Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.229.200	37.495.200	35,63	35,63
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.138.200	8.138.200	100,00	100,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.616.000	10.682.000	84,67	84,67
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.000.000	0	0,00	25,00
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	64.475.000	18.675.000	28,96	50,92
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.240.200	71.563.124	46,10	46,10
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.716.500	1.843.124	21,15	21,15
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	146.523.700	69.720.000	47,58	47,58
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.608.800	16.377.329	34,40	34,40
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	35.708.800	16.377.329	45,86	45,86
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	11.900.000	0	0,00	0,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	35.522.500	35.522.500	100,00	100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.522.500	35.522.500	100,00	100,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	35.522.500	35.522.500	100,00	100,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	244.681.100	77.101.100	31,51	31,51
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	21.241.100	21.241.100	100,00	100,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.241.100	21.241.100	100,00	100,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	223.440.000	55.860.000	25,00	25,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	223.440.000	55.860.000	25,00	50,00
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	50.196.200	6.901.200	13,75	13,75
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	50.196.200	6.901.200	13,75	13,75
Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.196.200	6.901.200	13,75	14,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	126.677.400	20.432.400	16,13	16,13
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	126.677.400	20.432.400	16,13	16,13
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	62.400.000	0	0,00	0,00
Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional	64.277.400	20.432.400	31,79	100,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.098.250	0	0,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.098.250	0	0,00	
Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	35.098.250	0	0,00	0,00
JUMLAH	2.170.649.162	1.046.314.707	48,20	50,15

38. Kecamatan Selangit

Tabel 2.47
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Selangit

Prioritas Program dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	%
2	3	4	5	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.137.627.564	1.000.368.253	46,80	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.874.322.496	920.638.253	49,12	43,82
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.808.322.496	900.178.253	49,78	43
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	66.000.000	20.460.000	31,00	50
Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.889.000	9.000.000	14,09	6,25
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.639.000	-	-	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.500.000	-	-	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000	-	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.750.000	9.000.000	25,17	50
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.969.700	70.730.000	49,13	50,34
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.067.700	2.730.000	67,11	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	139.902.000	68.000.000	48,61	50
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.446.368	-	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.144.000	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.302.368	-	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35.045.600	35.045.600	100,00	

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.045.600	35.045.600	100,00	100,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	35.045.600	35.045.600	100,00	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	441.000.000	77.170.000	17,50	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	441.000.000	77.170.000	17,50	44,55
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan Selangit)	200.000.000	-	-	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	241.000.000	77.170.000	32,02	45
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	53.320.228	43.320.228	81,25	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	53.320.228	43.320.228	81,25	100,00
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	43.320.228	43.320.228	100,00	100
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	10.000.000	-	-	-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.100.000	12.100.000	100,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.100.000	12.100.000	100,00	100,00
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	12.100.000	12.100.000	-	100
JUMLAH	2.679.093.392	1.168.004.081	43,60	66%

39. Kecamatan Sumber Harta

Tabel 2.48
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Sumber Harta

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Kecamatan Sumber Harta				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.100.807.937	719.709.051	65,38	35,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.040.849.637	704.001.051	67,64	35,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	59.958.300	15.708.000	26,20	69,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.794.400		0,00	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	12.794.400		0,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.135.900	14.633.300	33,92	33,92
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.385.900	8.913.300	48,48	75,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	5.720.000	31,78	75,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.750.000		0,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.885.000	88.323.068	47,77	47,77
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	9.685.000	1.323.068	13,66	45,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	175.200.000	87.000.000	49,66	45,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.384.250	1.999.395	14,94	80,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.384.250	1.999.395	14,94	80,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.212.800	0	0	0,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.212.800	0	0	100,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	18.312.950	3.490.700	19,06	86,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18.312.950	3.490.700	19,06	86,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	241.647.000	89.755.100	37,14	38,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	241.647.000	89.755.100	37,14	38,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	48.560.600	0	0	61,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	48.560.600	0	0	61,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Derah	113.202.400	13.944.600	12,32	12,32
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinika Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	61.157.800	0	0	0,00
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	52.044.600	13.944.600	26,79	85,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional				
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa				
Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.998.800	0	0	0
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	14.998.800	0	0	0,00
JUMLAH	1.806.942.037	931.855.214	51,571%	76,00

40. Kecamatan Tugumulyo

Tabel 2.49
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Tugumulyo

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Kecamatan Tugumulyo				
Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	2.383.171.483	1.355.791.749	56,89	56,89
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.048.162.625	1.260.357.374	61,54	61,54
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.964.442.625	1.236.703.874	62,95	57,14
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	83.720.000	23.653.500	28,25	75,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.000.000	0	0,00	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11.000.000	0	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.248.600	19.689.500	24,23	24,23
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.500.000	0	0,00	0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.248.600	7.980.000	29,29	100,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	7.209.500	28,84	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.500.000	4.500.000	27,27	13,73
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.885.008	70.972.375	32,57	32,57
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.125.008	7.092.375	27,15	16,67
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.760.000	63.880.000	33,31	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.875.250	4.772.500	19,19	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.875.250	4.772.500	19,19	100,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	17.605.800	17.505.800	99,43	100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.605.800	17.505.800	99,43	100,00
Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	17.605.800	17.505.800	99,43	100,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	370.000.000	91.406.525	24,70	38,89
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20.000.000	4.500.000	22,50	38,89
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000	4.500.000	22,50	38,89
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	350.000.000	86.906.525	24,83	100,00
Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan	350.000.000	86.906.525	24,83	100,00
Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	30.000.000	0	0,00	0,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.000.000	0	0,00	0,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.000.000	0	0,00	0,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	43.080.000	18.080.000	41,97	100,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	(%)	%
1	2	3	4	5
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	43.080.000	18.080.000	41,97	100,00
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	43.080.000	18.080.000	41,97	100,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.127.000	0	0,00	0,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.127.000	0	0,00	0,00
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	12.127.000	0	0,00	0,00
JUMLAH	2.855.984.283	1.482.784.074	51,92	56,34

41. Kecamatan Purwodadi

Tabel 2.50
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Purwodadi

Prioritas Program Dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
KECAMATAN PURWODADI				
Program dan Kegiatan Pada Setiap SKPD				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.898.343.892	1.297.456.917	44,77%	37,18%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.571.235.092	1.199.457.894	46,65%	49,40%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.519.875.092	1.179.807.894	46,82%	57,14%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.360.000	19.650.000	38,26%	41,67%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	88.064.900	35.289.600	40,07%	34,61%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.325.000	2.499.000	46,93%	46,93%

Prioritas Program Dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	0	0,00%	0,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.739.900	20.060.600	56,13%	56,13%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	3.250.000	27,08%	30,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	9.480.000	31,60%	40,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.251.450	53.250.748	25,94%	37,50%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.331.450	8.250.748	35,36%	41,67%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.920.000	45.000.000	24,74%	33,33%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.792.450	9.458.675	27,99%	30,76%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.632.450	9.458.675	36,90%	46,82%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.160.000	0	0,00%	14,71%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.047.200	16.047.200		100,00%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.047.200	16.047.200	100,00%	100,00%
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16.047.200	16.047.200	100,00%	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	884.289.534	107.770.126		28,00%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	76.215.000	9.885.000	12,97%	15,74%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	76.215.000	9.885.000	12,97%	15,74%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	808.074.534	97.885.126	12,11%	24,51%

Prioritas Program Dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	400.000.000	-	0,00%	0,00%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	408.074.534	97.885.126	23,99%	24,51%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	128.905.700	15.366.500		20,00%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	128.905.700	15.366.500	11,92%	20,00%
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	91.339.200	0	0,00%	0,00%
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30.366.500	15.366.500	50,60%	60,00%
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	7.200.000	0	0,00%	0,00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	23.664.200	11.000.000	46,48%	62,50%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.664.200	11.000.000	46,48%	62,50%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.764.200	0	0,00%	25,00%
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	17.900.000	11.000.000	61,45%	100%
JUMLAH	3.951.250.526	1.447.640.743	36,64%	52,12%

42. Kecamatan Muara Beliti

Tabel 2.51
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Muara Beliti

Prioritas Program Dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.752.585.920	766.159.509	43,72	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.521.101.350	661.107.331	43,46	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.474.181.350	638.147.331	43,29	0,29%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.920.000	22.960.000	48,93	0,17%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.391.200	27.900.000	40,79	
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	6.414.300	2.500.000	38,98	0,20%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000	9.000.000	100,00	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.872.900	2.400.000	30,48	0,20%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	4.000.000	40,00	0,17%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.104.000	10.000.000	28,49	0,18%
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	2.000.000	-	0,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	-	0,00	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.413.220	64.752.178	48,17	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.348.620	6.352.178	41,39	0,17%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.064.600	58.400.000	49,05	0,17%
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	26.680.150	12.400.000	46,48	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.180.150	10.400.000	49,10	0,17%

Prioritas Program Dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.500.000	2.000.000	36,36	-
<i>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</i>	26.116.000		0,00	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	26.116.000	26.116.000	100,00	
<i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	26.116.000	26.116.000	100,00	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	266.490.150	176.137.168	66,10	
<i>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</i>	266.490.150	176.137.168	66,10	
<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	25.486.700	-	0,00	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	241.003.450	176.137.168	73,08	0,35%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	90.130.100	27.026.900	29,99	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	90.130.100	27.026.900	29,99	
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ikan pemerintahan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	42.897.400	-	0,00	-
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	37.232.700	27.026.900	72,59	0,50%
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	10.000.000	-	0,00	-

Prioritas Program Dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25.300.000	24.000.000	94,86	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.300.000	24.000.000	94,86	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	25.300.000	24.000.000	94,86	100%
JUMLAH	2.160.622.170	1.010.439.577	46,77	49,50%

43. Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut

Tabel 2.52
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut

Prioritas Program dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	-		0%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	-		-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.000.413.517	511.498.931	51,13	51%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	959.493.517	501.268.931	52,24	33%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.920.000	10.230.000	25,00	25%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.425.000	29.550.000	32,32	32%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.500.000	9.550.000	44,42	33%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.925.000	20.000.000	44,52	50%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	-	-	0%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000	-	-	0%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.688.308	21.285.760	22,24	22%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.608.308	285.760	2,69	17%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85.080.000	21.000.000	24,68	17%

Prioritas Program dan Kegiatan	Plapon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.855.750	7.200.000	9,62	10%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.855.750	7.200.000	9,62	14%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	27.566.500	27.566.500	100,00	100%
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	27.566.500	27.566.500	100,00	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	72.330.500	32.300.000	44,66	45%
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	30.030.500	-	-	0%
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	32.300.000	32.300.000	100,00	100%
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	10.000.000	-	-	0%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40.700.000	40.700.000	-	100%
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	40.700.000	40.700.000		100%
JUMLAH	1.412.979.575	670.101.191	47,42	47%

44. Kecamatan Jayaloka

Tabel 2.53
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Jayaloka

Prioritas Program dan Kegiatan	Plapon Anggaran	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp.)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
KECAMATAN JAYALOKA				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.083.991.093	1.014.747.465	48,69	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.763.445.706	899.220.670	50,99	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.716.285.706	879.570.670	51,25	41,67
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	47.160.000	19.650.000	41,67	50,00
Kegiatan Penujang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	-	-	
Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	-	-	-
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.800.000	31.549.600	36,35	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.800.000	3.550.000	32,87	25,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.000.000	22.999.600	53,49	50,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	5.000.000	27,78	100,00
Penyelenggaraan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Jayaloka)	15.000.000	-	-	-
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.111.887	70.093.745	49,32	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	3.000.000	50,00	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	3.651.887	1.093.745	29,95	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.460.000	66.000.000	49,83	50,00
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.633.500	13.883.450	19,38	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.633.500	13.883.450	19,38	25,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	35.366.500	35.366.500	100,00	

Prioritas Program dan Kegiatan	Plapon Anggaran	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp.)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.366.500	35.366.500	100,00	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait (Musrenbang)	35.366.500	35.366.500	100,00	100,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	415.000.000	69.080.000	16,65	
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.000.000	15.000.000	100,00	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.000.000	15.000.000	100,00	100,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	400.000.000	54.080.000	13,52	
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	200.000.000	54.080.000	27,04	100,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	-	-	-
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95.000.000	55.000.000	57,89	
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	95.000.000	55.000.000	57,89	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhinika Tunggal Ika serta pemerintahan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Hari Besar Nasional)	40.000.000	-	-	-
Pembinaan Kerukunan Antar suku dan umat beragama, Ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, Regional dan Nasional	55.000.000	55.000.000	100,00	100,00
JUMLAH	2.629.357.593	1.174.193.965	44,66	34,05

45. Kecamatan Suka Karya

Tabel 2.54
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Suka Karya

Prioritas Program dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi %	(%)
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.273.081.451	574.456.297	45	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.111.461.856	504.881.497	45,4	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.070.541.856	484.421.497	45,3	50
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	40.920.000	20.460.000	50,00	50
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.400.000	12.390.000	39,46	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerapan Bangunan Kantor	5.500.000	5.500.000	100	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.900.000	6.890.000	27	42
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.560.495	53.900.700	44,7	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.266.195	-	0,00	42
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.294.300	53.900.700	47,16	42
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.659.100	3.284.100	34,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.659.100	3.284.100	34,00	42
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	18.031.000	16.691.000	92,57	
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.031.000	16.691.000	92,57	
Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.031.000	16.691.000	92,57	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	16.356.200	-	0,00	

Prioritas Program dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi %	(%)
1	2	3	4	5
Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	16.356.200	-	0,00	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.356.200	-	0,00	42
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	46.712.500	16.500.000	35,32	
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	46.712.500	16.500.000	35,32	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinnika Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20.208.000	-	0,00	0
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	16.500.000	16.500.000	100,00	100
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	10.004.500		0,00	0
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.043.500	10.043.500	0,0	
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pmbinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.043.500	10.043.500	0,0	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10.043.500	10.043.500	0,00	0
JUMLAH	1.364.224.651	617.690.797	45,3	47

46. Kecamatan Muara Kelingi

Tabel 2.55
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Muara Kelingi

Prioritas Program Dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.173.028.436			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.330.766.846			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	2.289.846.846	1.223.360.698	53,43	64,29
Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan	40.920.000	10.230.000	25,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.918.900			-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6.639.000	-	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.000.000	-	-	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.539.900	-	-	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000	-	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.740.000	3.600.000	10,07	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	196.488.590			-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.008.740	908.542	22,66	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192.479.850	61.000.000	31,69	15,15
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.508.400			-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.582.800	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.925.600	-	-	-
PROGRAM PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35.045.500			-

Prioritas Program Dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	(%)
1	2	3	4	5
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.045.500			-
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan perangkat Daerah Vertikal terkait	35.045.500	18.800.000	53,64	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	441.000.200	-	-	-
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	441.000.200	-	-	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	-	-	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	241.000.200	61.245.686	25,41	41,67
PROGRAM PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAH UMUM	53.300.000			-
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	53.300.000			-
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	43.300.000	33.250.000	76,79	100,00
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintah Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	10.000.000	-	-	-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	17.000.000	-		
Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	17.000.000	-		
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	17.000.000	17.000.000	100,00	100,00
JUMLAH	3.173.028.436	1.429.394.926	45,05	54,77

47. Kecamatan Tuah Negeri

Tabel 2.56
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Tuah Negeri

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.518.058.678	701.758.316		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.265.098.678	695.460.196	135,07	40,33
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN K Kecamatan Tuah Negeri)	1.224.178.678	675.435.196	55,17	37,75
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.920.000	17.050.000	41,67	55,56
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.000.000	-	-	
Bimbingan teknis Inflementasi Peraturan perundang-undangan	3.000.000	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.782.500	1.487.500	19,11	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.782.500	1.487.500	19,11	50,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.202.500	610.620	69,39	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.202.500	610.620	28	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	207.000.000	86.250.000	41,67	43,45
Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.975.000	4.200.000	12,74	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.975.000	4.200.000	12,74	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	34.159.500	34.159.500	100,00	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.159.500	34.159.500	100,00	
Koordinasi/ Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	34.159.500	34.159.500	100,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	48.964.500	38.964.500	79,58	

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	48.964.500	38.964.500	79,58	
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	48.964.500	38.964.500	79,58	-
JUMLAH	1.601.182.678	774.882.316	48,39	40,33

48. Kecamatan Muara Lakitan

Tabel 2.57
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Muara Lakitan

Prioritas Program/Kegiatan/SubKegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	PENYERAPAN		
		Keuangan		%
		(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5
KECAMATAN MUARA LAKITAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.204.938.610	1.033.983.781		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	0		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000	0	0,00	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000	0	0,00	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.500.000	0	0,00	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	0	0,00	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.862.878.662	950.998.249		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.791.318.662	931.556.349	52,00	64,29
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	70.000.000	19.441.900	27,77	100,00

Prioritas Program/Kegiatan/SubKegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	PENYERAPAN		
		Keuangan		%
		(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.560.000	0	0,00	50,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.134.000	0		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.134.000	0	0,00	50,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.800.000	0		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.800.000	0	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.500.000	11.000.000		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000	0	0,00	75,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	3.000.000	25,00	50,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.500.000	8.000.000	17,20	4,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	241.428.698	71.985.532		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.588.698	2.305.532	18,31	1,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228.840.000	69.680.000	30,45	33,33
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.197.250	0		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.667.250	0	0,00	0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.530.000	0	0,00	0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35.000.000	30.000.000		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.000.000	30.000.000		
Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.000.000	30.000.000	100	100

Prioritas Program/Kegiatan/SubKegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	PENYERAPAN		
		Keuangan		%
		(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000	0	0,00	0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	430.900.000	70.722.000		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30.900.000	6.000.000		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.900.000	6.000.000	19,42	52,63
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	400.000.000	64.722.000		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	0	0,00	0,00
Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan	200.000.000	64.722.000	32,36	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.300.000	0		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.300.000	0		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.300.000	0	0,00	0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	80.000.000	20.000.000		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	80.000.000	20.000.000		
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50.000.000	0	0,00	0,00

Prioritas Program/Kegiatan/SubKegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	PENYERAPAN		
		Keuangan		%
		(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	10.000.000	0	0,00	0,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.100.000	12.100.000		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.100.000	12.100.000		
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	12.100.000	12.100.000	100,00	100,00
JUMLAH	2.766.238.610	1.166.805.781	42,18	47,21

49. Kecamatan Megang Sakti

Tabel 2.58
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Megang Sakti

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp.)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.793.516.099	1.527.718.076	54,69	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.356.180.499	1.334.229.526	103,10	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.300.620.499	1.308.549.526	56,88	100,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	55.560.000	25.680.000	46,22	46,22
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000	-	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	-	-	-

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp.)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.759.100	52.184.800		-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.375.000	4.185.000	77,86	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.827.500	12.530.000	50,47	50,47
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	5.000.000	50,00	50,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.556.600	30.469.800	65,45	65,45
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.546.200	124.463.750	42,84	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.600.000	6.600.000	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.666.200	4.363.750	37,41	37,41
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	272.280.000	113.500.000	41,69	41,69
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.030.300	16.840.000	42,07	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.030.300	16.840.000	42,07	42,07
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35.780.000	35.780.000	100,00	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.780.000	35.780.000	100,00	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	35.780.000	35.780.000	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	487.781.000	161.613.700	33,13	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.500.000	9.000.000	40,00	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.500.000	9.000.000	40,00	100,00

Prioritas Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp.)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	465.281.000	152.613.700	32,80	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	465.281.000	152.613.700	32,80	32,80
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	97.300.000	29.800.000	30,63	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	97.300.000	29.800.000	30,63	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	55.500.000		-	-
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	31.800.000	29.800.000	93,71	100,00
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	10.000.000			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.100.000	25.270.000		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.100.000	25.270.000		
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	28.100.000	25.270.000		100,00
JUMLAH	3.442.477.099	1.780.181.776	51,71	53,30

50. Kecamatan BTS Ulu

Tabel 2.59
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan BTS Ulu

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
KECAMATAN BTS ULU				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.198.085.386	943.938.609		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.063.700	0		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000	0	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.063.700	0	0,00%	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.912.527.594	872.913.609		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.840.583.094	853.643.609	46,38%	64,29%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	70.000.000	19.270.000	27,53%	75,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.944.500	0	0,00%	25,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.500.000	11.025.000		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000	3.025.000	25,21%	50,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.500.000	0	0,00%	0,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000	8.000.000	20,00%	29,41%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.850.042	60.000.000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.290.042	0	0,00%	50,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.560.000	60.000.000	33,05%	33,33%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.144.050	0		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.144.050	0	0,00%	0,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.000.000	30.000.000		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.000.000	30.000.000		
Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.000.000	30.000.000	100,00%	100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	530.000.000	103.484.200		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30.000.000	4.300.000		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.000.000	4.300.000	14,33%	38,89%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	500.000.000	99.184.200		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	0	0,00%	0,00%
Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan	300.000.000	99.184.200	33,06%	100,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	72.500.000	17.500.000		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	72.500.000	17.500.000		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Penyerapan		
		Capaian Target (Rp)	Realisasi (%)	%
1	2	3	4	5
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	45.000.000	0	0,00%	0,00%
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	17.500.000	17.500.000	100,00%	100,00%
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	10.000.000	0	0,00%	0,00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17.000.000	17.000.000		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.000.000	17.000.000		
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	17.000.000	17.000.000	100,00%	100,00%
JUMLAH	2.847.585.386	1.111.922.809	39,05%	45,57%

Penilaian RKPD dilakukan dengan menghitung realisasi sampai dengan bulan Juni 2023. Dari hasil evaluasi didapatkan bahwa dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 539.929.692.815,- atau sebesar 20,05% termasuk dalam kategori **rendah**. Target indikator sasaran sampai dengan bulan Juni sebesar 50,00%, sedangkan realisasi fisik capaian sebesar 29,16% termasuk dalam kategori **rendah**.

Penyebab rendahnya realisasi dan keuangan :

1. Adanya penyesuaian terhadap Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/ 2114/ SJ Hal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2022 yang menyebabkan terhambatnya penyerapan realisasi fisik dan keuangan.

2. Adanya Surat dari Kementerian Kesehatan Nomor: PR.01.01/ 1/ 2837/ 2022 dan Surat Kementerian Kesehatan Nomor KN.02.07/ I/ 1090/ 2022 yang menghimbau penundaan sementara pengadaan DAK Fisik bidang Kesehatan.
3. Adanya pergeseran anggaran yang menyebabkan proses pelaksanaan Program/ Kegiatan menjadi terhambat dan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
4. Terlambatnya penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan DAK yang menyebabkan terlambatnya proses pelaksanaan program/kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah.
5. Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang terlambat menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan lebih awal sehingga penyerapan anggaran tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.
6. Kurangnya koordinasi dan komitmen dari Kepala OPD sebagai pelaksana program/kegiatan terhadap pelaporan yang tepat waktu menyebabkan proses penyerapan menjadi lambat dan upaya percepatan yang direkomendasikan oleh Tim Percepatan tidak dapat terlaksana dengan baik.
7. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang belum tepat pada Perangkat Daerah menyebabkan ketelitian dan penempatan program/ Kegiatan tidak terlaksana dengan baik dan tidak sesuai dengan target Organisasi Perangkat Daerah.

2.3 Target dan Realisasi Capaian Indikator Makro daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Tabel 2.60
Target dan Realisasi Capaian Indikator Makro Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

No	Uraian	Target tahun 2022	Realisasi Tahun 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	4.5%-5.5%	4,06
2	PDRB (ADHB menurut LU/ Milyar Rupiah)	21.232.694.703.000	22.342.116,54
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67.5	67,78
4	Kemiskinan	13.2	13,34
,5	Tingkat Pengangguran	3.21	1,92

Pembangunan Manusia yang tinggi mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi mempengaruhi kualitas pembangunan manusia (Findi dan Ezkianto, 2013). Pada tahun 2022, pembangunan manusia masuk pada level sedang dengan nilai IPM 67,78. Capaian ini diperoleh karena meningkatnya komponen kesehatan, pendidikan dan perekonomian di Kabupaten Musi Rawas. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas mencapai 4.06% dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 1.92%. Perbandingan Pertumbuhan ekonomi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Musi Rawas termasuk dalam kategori yg baik jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Selatan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu sejalan dengan tingginya kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. Selain itu permasalahan yang tidak kalah penting adalah mengenai kemiskinan dan ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin kesenjangan pendapatan di suatu wilayah menjadi rendah (Pangkiro, 2016). Dari 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Rawas termasuk dalam kategori sedang.

BAB III

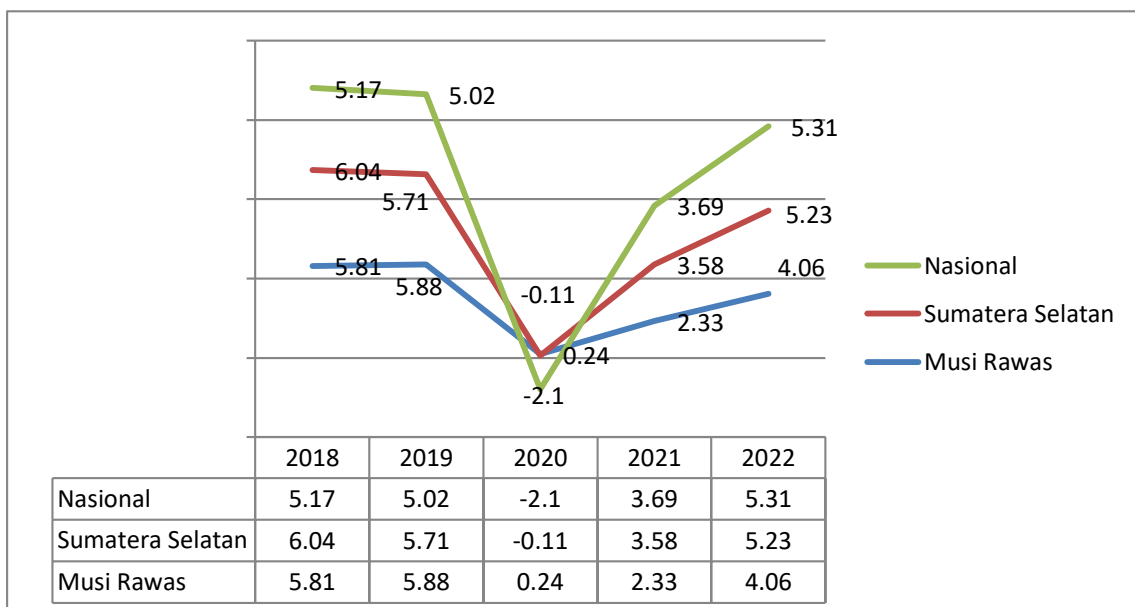
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kondisi Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB

Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) sampai saat ini masih dipakai untuk memantau perbaikan ekonomi suatu daerah karena faktor perubahan harga (inflasi) telah dikeluarkan. Pertumbuhan Ekonomi tahun 2018-2022 dan target tahun 2023 tergambar dalam grafik berikut:

Grafik 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2018- 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas, 2021, (data diolah)

Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh sebesar 4,5%-5,5% dan Target Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan diperkirakan tumbuh sebesar 5,8%-6,5%. Dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi

Rawas diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5,5%. Pada Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2023 Pertumbuhan Ekonomi tetap diperkirakan akan menjadi 5,5 %.

Grafik 3.2

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022



Sumber : Bappeda (Data diolah), 2023

Struktur ekonomi suatu daerah menjadi indikator penentu apakah daerah tersebut didominasi oleh sektor primer, sekunder ataupun tersier. Sektor primer adalah sektor yang masih banyak mengandalkan peran sumber daya alam dalam proses produksi, yaitu : sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder adalah sektor yang sudah tidak terlalu mengandalkan peran sumber daya alam lagi, tapi lebih banyak mengandalkan kemajuan teknologi dan peran sumber daya manusia, yaitu sektor industri pengolahan, listrik, air, dan konstruksi. Sedangkan sektor tersier adalah adalah sektor yang bisa dikatakan sudah tidak mengandalkan sumber daya alam lagi, yaitu sektor perdagangan, pengangkutan dan telekomunikasi, bank dan lembaga keuangan lain, dan sektor jasa-jasa.

Selama Tahun 2022 kegiatan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas telah mampu menciptakan total nilai PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha sebesar Rp 22,342.116,54 dan diasumsikan akan mencapai Rp.23.570.826,88 pada tahun 2023.

Data struktur ekonomi Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

PDRB Kabupaten Musi Rawas ADHB = 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2020 (Juta rupiah) dan Target 2023

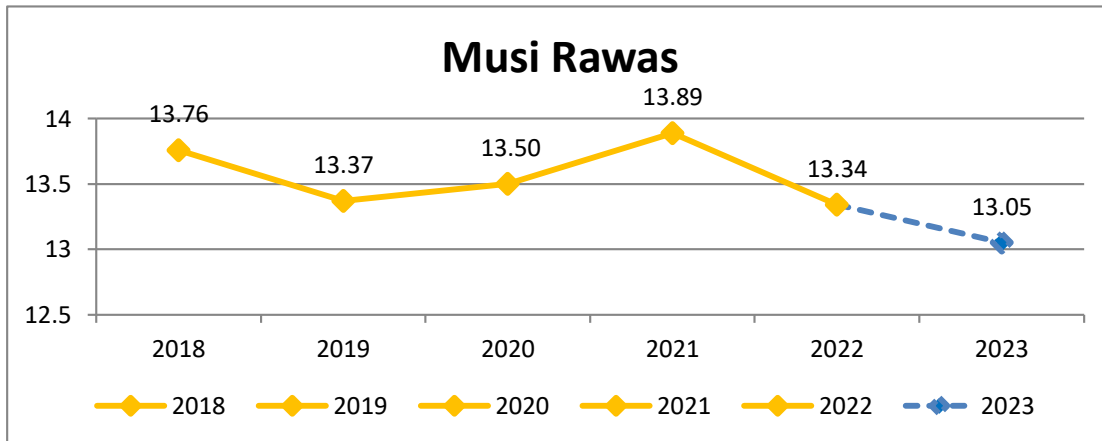
Lapangan Usaha	Realisasi					Proyeksi
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.284.639,28	5.585.375,04	5.818.982,10	6.094.957,29	6,573.758,25	6.935.316,80
Pertambangan dan Penggalian	5.520,962,45	6.206,843,88	5.886.766,23	6.377.853,58	7,162.013,89	7.555.920,55
Industri Pengolahan	2.414.212,77	2.603.341,83	2.705.274,88	2.885.814,13	3,071.554,96	3.240.437,78
Pengadaan Listrik dan Gas	4,810.59	4.958,02	5,738.86	6.242,4	6.781,32	7.152,90
Pengadaan Air, Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,367.78	1,473.54	1,579.05	1.605,61	1.661,58	1.751,30
Konstruksi	1.042.682,62	1.120.880,14	1.109.628,87	1.153.041,72	1.211.417,84	1.278.038,61
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.525.122,32	1.699.157,91	1.793.014,11	1.901.675,17	2,188.097,54	2.308.434,95
Transportasi dan Pergudangan	82,104,70	91,072,73	88,033,87	89.987,64	100.838,19	106.386,20
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	57,840,70	65,884,49	66,708,06	68.438,19	75.944,04	80.116,70
Informasi dan Komunikasi	56,262,19	62,061,62	72,692,32	79.580,12	86.634,25	91.394,65
Jasa Keuangan dan Asuransi	116.715,73	122.559,71	123,801,88	127.611,77	133.587,82	140.926,90
Real Estate	240,438,82	268,382,50	274.167,20	285.832,73	301.066,73	317.618,30
Jasa Perusahaan	3,135,02	391.040,49	3,951,64	4.284,99	4.542,99	4.789,70
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	382,058,68	391,00	407,300,23	414.431,94	436.120,94	460.106,60
Jasa Pendidikan	465.096,93	509.331,42	527,467,94	555.730,29	597.828,29	630.710,65
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	120,326,19	131,608,32	146,796,74	555.730,29	169.945,84	179.286,70
Jasa lainnya	177,230,00	195,234,01	205,447,45	210.777,07	220.322,07	232.437,60
PDRB Dengan Migas	17.495.006,76	19.062.784,30	19.237.351,36	20.415.494,66	22,342.116,54	23.570.826,88

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas (2018-2022)
Proyeksi 2023-2024 (data diolah)

c. Kemiskinan

Angka kemiskinan Kabupaten Musi Rawas masih jauh di bawah Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional, pencapaian pada tahun 2022 sebesar 13,34% hal ini berarti jumlah penduduk miskin di Kabupaten Musi Rawas bertambah 0,55% dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 13,89% dan diproyeksikan akan turun menjadi 13,05% pada tahun 2023.

Grafik 3.3
 Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas
 Tahun 2018-2022 dan Target Tahun 2023



Sumber: BPS

Mencermati kondisi capaian angka kemiskinan terakhir yang mengalami penurunan, maka pada Perubahan RKPД Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 angka kemiskinan Kabupaten Musi Rawas tahun 2022 yang semula ditargetkan 13,05% diperkirakan tetap menjadi 13,05%.

Grafik 3.4
 Perubahan Proyeksi Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas
 Tahun 2023



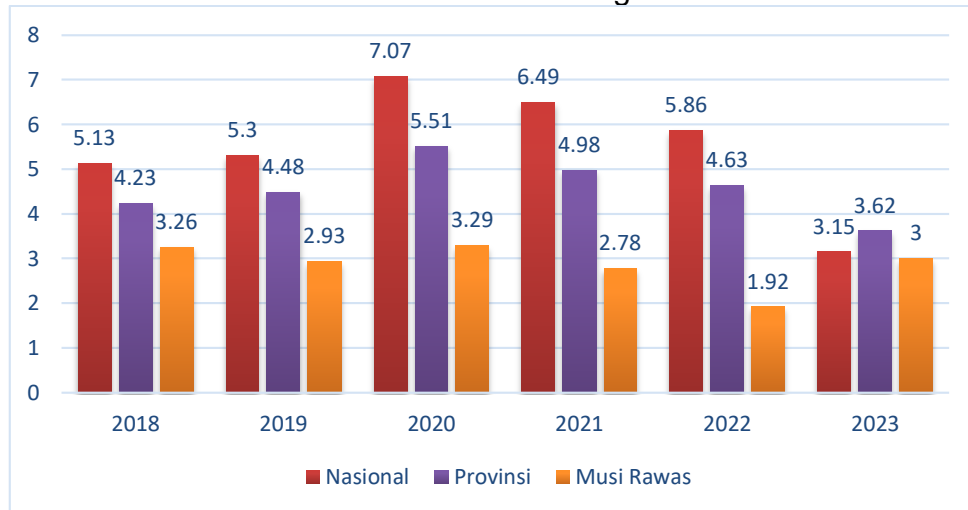
Sumber : Bappeda (Data diolah), 2023

d. Pengangguran

Salah satu permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia termasuk di Kabupaten Musi Rawas adalah pengangguran yang cukup tinggi. Di negara-negara berkembang umumnya tingkat pengangguran yang tinggi utamanya di

pedesaan belum dianggap masalah serius, karena masih adanya sektor alternatif (pertanian). Padahal jika dicermati, akibat yang ditimbulkan dari tingginya angka pengangguran ini sangat kompleks, bahkan bisa mengakibatkan terganggunya stabilitas kamtibmas di suatu daerah.

Grafik 3.5
Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi dan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020-2022 dan target Tahun 2023



Sumber: BPS, RPJMD Musi Rawas 2016-2021

Sementara itu, untuk tingkat pengangguran di Musi Rawas pada tahun 2022 mencapai 1,92 % yang sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 2,78% yang berarti mengalami penurunan sebesar 0,86%. Pada RKPD Perubahan tahun 2023 tingkat pengangguran di Kabupaten Musi Rawas yang pada awalnya diproyeksikan sebesar 3,15% mengalami perubahan yaitu sebesar 3,15%, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada Grafik berikut ini:

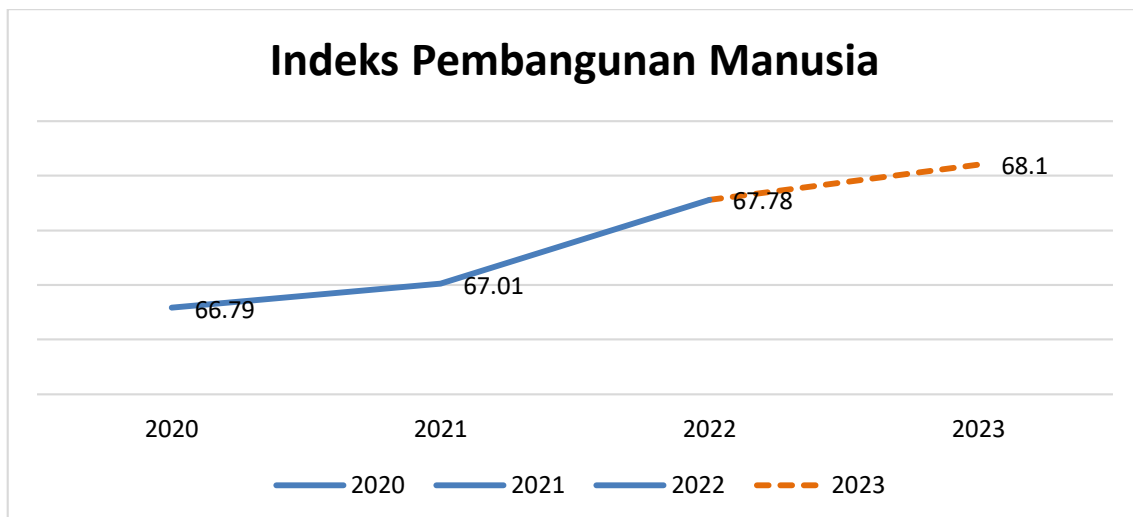
Grafik 3.6
Perubahan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka
Tahun 2023



Sumber : Bappeda (Data diolah), 2023

e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Grafik 3.7
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020-
2022 dan Target Tahun 2023



Capaian IPM Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2020 sebesar 66,79 dan meningkat pada tahun-tahun berikutnya dengan capaian 67,01 pada tahun 2021 dan 67,78 pada tahun 2022, dan ditargetkan sebesar 68.1 pada tahun 2023.

Grafik 3.8
Perubahan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Tahun 2023



Sumber : Bappeda (Data diolah), 2023

3.2 Kerangka Keuangan Daerah

Rancangan kerangka keuangan menggambarkan kondisi dan analisis keuangan daerah serta prospek pendanaan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023. Kerangka keuangan daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 memberikan gambaran pendanaan pembangunan yang dilaksanakan melalui langkah-langkah kebijakan untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2023.

a. Pendapatan Daerah

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya, baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Pencermatan terhadap kondisi perekonomian terakhir di Kabupaten Musi Rawas yang diakibatkan oleh pandemi Corona Virus Disease 19 menunjukkan adanya penurunan kondisi ekonomi yang berdampak kepada besaran retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bisa dipungut oleh daerah. Untuk itu perlu dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber PAD.

Tabel 3.2
Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan
Proyeksi Struktur Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2023

No	Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023	REALISASI APBD TA.2023 TW II	Proyeksi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Bertambah/ (Berkurang)
1	Pendapatan Asli Daerah	299.824.835.942	29.957.982.425,58	299.824.835.942	-
1.1	Pajak Daerah	185.293.398.374	9.107.728.314	185.293.398.374	-
1.2	Retribusi Daerah	5.177.281.000	1.206.106.600	5.177.281.000	-
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.000.000.000	8.890.746.489,51	8.000.000.000	-
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	101.354.156.568	10.753.401.022,07	101.354.156.568	-
2	Pendapatan Transfer	1.161.614.144.340	673.774.457.216	1.638.576.535.571	476.962.391.231
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.079.794.305.000	667.433.499.830	1.447.033.607.805	367.239.302.805
2.2	Transfer Antar Daerah	81.819.839.340	6.340.957.386	191.542.927.766	109.723.088.426
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	0		1.200.000.000	1.200.000.000
3.1	Hibah	-		1.200.000.000	1.200.000.000
3.2	Dana Darurat	-		-	
3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0			
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.461.438.980.282	703.732.439.641,58	1.939.601.371.513	478.162.391.231

Sumber : BPKAD Kabupaten Musi Rawas, 2023

b. Belanja Daerah

Pengalokasian belanja daerah oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas tahun 2023 disesuaikan dengan asumsi ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, prioritas kebutuhan pembangunan dan mengikuti ketentuan perundangan berlaku. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Bupati Musi Rawas. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Belanja

Anggaran yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dengan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Berikut ini pelaksanaan terkait dengan efisiensi dan efektifitas belanja daerah :

- Memperbaiki komposisi dan efisiensi belanja dengan peningkatan efisiensi belanja dengan penajaman nomenklatur belanja (jelas peruntukannya, penyederhanaan jenis program dan kegiatan dan menghindari duplikasi.
- Memperkenalkan pembangunan dengan pendekatan holistic, tematik, terintegrasi, serta spasial untuk meningkatkan kualitas belanja
- Menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, Perangkat Daerah maupun program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran.
- Pengurangan persentase belanja operasional dan peningkatan persentase belanja langsung

2. Prioritas Anggaran

Prioritas penggunaan anggaran tahun 2023 diarahkan untuk mendanai kegiatan dalam memenuhi tema pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 yaitu **Peningkatan Infrastruktur untuk Musi Rawas MANTAB**. Terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dasar khususnya infrastruktur jalan dan jembatan, pengentasan kemiskinan melalui pemulihan ekonomi daerah yang terdampak oleh wabah Pandemi Covid-19, pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan untuk pencegahan dan penanganan dampak Covid 19. Selain itu juga untuk mendukung kegiatan pelayanan publik dan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang

tertuang dalam RPJMN di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan dan pembangunan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk pemulihan ekonomi akibat dampak Pandemi Covid 19 demi mewujudkan masyarakat Musi Rawas yang Maju, Mandiri dan Bermartabat (MANTAB) berdasarkan RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2021-2026.

3. Pengoptimalan belanja modal

Belanja modal diupayakan dengan tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan. Bentuk optimalisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik dengan dilakukan kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai dengan ketentuan berlaku.

4. Transparansi dan Akuntabel

Transparansi dan akuntabel setiap pengeluaran belanja harus dengan pertanggungjawaban sesuai ketentuan berlaku. Pelaporan pertanggungjawaban harus memenuhi aspek administrasi dan juga menyangkut proses keluaran dan hasil harus jelas.

Tabel 3.3
Struktur Perubahan Belanja Daerah

No	Uraian	Belanja			
		APBD TA. 2023	REALISASI APBD TA.2023 TW II	Proyeksi Perubahan APBD TA. 2023	Bertambah/ Berkurang
	BELANJA DAERAH	1.471.438.980.282	514.623.333.883,58	2.032.113.457.780	560.674.477.498
1.	Belanja Operasi	984.856.132.109	389.060.947.739,58		(984.856.132.109)
a.	Belanja Pegawai	606.911.775.180	291.984.169.309		(606.911.775.180)
b.	Belanja Barang dan Jasa	363.919.842.929	92.507.606.560,58		(363.919.842.929)
c.	Belanja Bunga	-		-	-
d.	Belanja Subsidi	-		-	-
e.	Belanja Hibah	14.024.514.000	5.069.171.870		(14.024.514.000)
f.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-

No	Uraian	Belanja			
		APBD TA. 2023	REALISASI APBD TA.2023 TW II	Proyeksi Perubahan APBD TA. 2023	Bertambah/ Berkurang
2.	Belanja Modal	180.210.456.635	20.862.514.244		(180.210.456.635)
3.	Belanja Tidak Terduga	16.311.011.400	0	16.311.011.400	
4.	Belanja Transfer	290.061.380.138	104.699.871.900	296.257.585.338	6.196.205.200
a.	Belanja Bagi Hasil	19.047.067.938	0	19.047.067.938	
b.	Belanja Bantuan Keuangan	271.014.312.200	104.699.871.900	277.210.517.400	6.196.205.200

c. Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah dilaksanakan karena adanya Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 yang merupakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara umum, perubahan kebijakan pembiayaan diarahkan pada: a) penerimaan pembiayaan yang mengalami perubahan karena adanya peningkatan SiLPA; dan b) pengeluaran pembiayaan pada Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Tabel 3.4
Struktur Pembiayaan Daerah

No	Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023	REALISASI APBD TA.2023 TW II	Proyeksi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Bertambah/ Berkurang
	PEMBIAYAAN DAERAH	10.000.000.000,00	0,00	92.512.086.267	82.512.086.267
1.	Penerimaan pembiayaan	10.000.000.000,00	0,00	92.512.086.267	82.512.086.267
a.	SiLPA	10.000.000.000,00	0,00	92.512.086.267	82.512.086.267
b.	Penerimaan Piutang daerah	-	-	-	
2.	Pengeluaran pembiayaan	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
a.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00
b.	pembayaran pokok utang	-	-	-	-

Sumber : BPKAD Kabupaten Musi Rawas, 2023

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas melalui penyelarasan terhadap tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat keutamaan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan.

Perencanaan pembangunan tahun 2023 ini merupakan merupakan pelaksanaan periode ke empat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021- 2026. Perencanaan tahun 2023 dirumuskan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya dan capaian kinerja RPJMD, identifikasi isu strategis, permasalahan dan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya serta permasalahan-permasalahan yang mendesak. Disamping hal tersebut di atas, dalam penentuan prioritas pembangunan seharusnya juga memperhatikan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2018-2023.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, tujuan dan sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang terdapat dalam RPJMD. Untuk itu, dalam penetapan sasaran pembangunan tahun 2023, RKPD Kabupaten Musi Rawas mengacu mempertimbangkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas.

Tujuan pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Musi Rawas didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan merupakan target yang ingin dicapai di Kabupaten Musi Rawas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tabel 4.1
Keterkaitan Misi dan Tujuan Pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan
1	2	3
1	Mewujudkan birokrasi yang profesional berbasis teknologi informasi	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik bagi pemenuhan pelayanan publik
2	Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas	1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing dan berkualitas
		2. Memantapkan kehidupan masyarakat yang religius dan aman serta menjunjung tinggi nilai kearifan lokal
3	Pemerataan Infrastruktur berwawasan lingkungan	1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur
		2. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, penataan ruang dan ketahanan bencana
4	Memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan
		2. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat
		3. Meningkatnya pembangunan masyarakat desa

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 terdapat 21 (dua puluh satu) Sasaran Pembangunan yang di terjemahkan dalam bentuk prioritas daerah, yang akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, dalam menjabarkan program dan kegiatan Tahun 2023. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk mendukung percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Sasaran pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Sasaran Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	Target 2023
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas birokrasi	1. Indeks RB	57,85
		2. Nilai SAKIP	BB (71,02)
		3. IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	81,52
2	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	1. Indeks SPBE	3.1
		2. Indeks Profesionalitas ASN	65,84
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,05
4	Meningkatnya Derajat Pendidikan	Indeks Pendidikan	69,61
5	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks kesehatan	79,5
6	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pemuda serta perlindungan anak	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,45
		2. Indeks Pembangunan Pemuda	Pratama
		3. Status Kabupaten Layak Anak	725 Madya
7	Terwujudnya Ketertiban, Keamananan, Ketentraman dan Kenyamanan Masyarakat	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	97%
		Indeks Demokrasi	92%
8	Terwujudnya Peningkatan Kehidupan beragama dan Kerukunan Umat Beragama	Indeks kerukunan umat beragama	75
9	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan kearifan dan kebudayaan lokal	1. Persentase lembaga adat yang aktif	72
		2. Indeks Budaya Literasi Daerah	30,5
10	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Persentase konektivitas antar wilayah	93,12
11	Kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (Ciptakarya, Kelistrikan, Pemukiman, Pengairan)	Indeks Infastruktur Dasar	97
		Indeks Sumber Daya Air	56
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	70,50

No.	Sasaran	Indikator	Target 2023
13	Meningkatnya penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	97
14	Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana	Indeks Penurunan Dampak resiko Bencana	51,72
15	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	Rp 6.178,33 milyar
16	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan	PDRB sektor Industri	Rp 1727,73 milyar
		PDRB sektor perdagangan	Rp 1021,4 milyar
17	Meningkatnya realisasi investasi Di Kabupaten Musi Rawas	Persentase peningkatan investasi	11
18	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan	13.05
19	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran	3,15
20	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	78,18
21	Persentase peningkatan desa maju	Persentase peningkatan Desa Maju	40,32

4.2. Tema dan Tematik Pembangunan Daerah Tahun 2023

RKPD Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 maka pemerintah daerah perlu untuk menetapkan tema pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2023 guna mendukung prioritas nasional dan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023. Tema pembangunan nasional yang ditetapkan untuk tahun 2023 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan. Sedangkan tema pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 adalah "Sumsel Maju Untuk Semua". Selanjutnya dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021- 2026, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021, arah kebijakan RKP 2023, arah kebijakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023, maka permasalahan di Kabupaten Musi Rawas, serta kerangka RKPD Kab. Musi Rawas Tahun 2023 dirumuskan didalam tema RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2023 yaitu :

“Peningkatan Infrastruktur Untuk Musi Rawas Mantab”

Pertumbuhan ekonomi global yang berkontraksi pada tahun ini menandakan semakin dalamnya ketidakpastian ekonomi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Kabupaten Musi Rawas, maka Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam perencanaan pembangunan tahun 2023 akan terfokus pada 2 keyword/kata kunci tema yang akan dilaksanakan di tahun 2023. Keyword tema pembangunan tahun 2023 adalah:

a. Peningkatan Infrastruktur

Dalam upaya mewujudkan infrastruktur yang berkualitas yaitu tersedianya infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan, maka perlu dilakukan beberapa hal :

- Meningkatkan konektivitas antar wilayah
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (Ciptakarya, Kelistrikan, Pemukiman, Irigasi, komunikasi)

b. Musi Rawas Mantab

- **Musi Rawas** yaitu merefleksikan seluruh wilayah dan isi Kabupaten Musi Rawas, artinya Kabupaten Musi Rawas dan seluruh masyarakat yang berada dan tercatat dalam wilayah administratif Kabupaten Musi Rawas.
- **Maju** yaitu kondisi masyarakat yang terus bergerak menuju kearah yang lebih baik, lebih sehat, lebih cerdas, lebih sejahtera dan religius, ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta adanya perhatian utama pada terpenuhinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya dan ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Perlu ditekankan di sini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin diraih, tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi berupaya keras pula untuk dapat

meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi mental – spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlaq mulia (religius).

- **Mandiri** adalah kemampuan riil Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi setahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan. Selain itu ditandai oleh (bersifat) mampu menghasilkan (dalam jumlah besar) produk-produk yang mendatangkan (memberi hasil, manfaat, dan sebagainya) serta menguntungkan dan mampu menghasilkan secara terus menerus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru secara berkisambungan. Mandiri juga ditandai dengan ketercukupan ruang untuk hidup dan berkembang, ketercukupan pangan, fasilitas peribadatan, pengelolaan air bersih, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas kebugaran, fasilitas transportasi, keselamatan permukiman/kota, pengelolaan air kotor dan drainase serta sanitasi layak, fasilitas pejalan kaki, ruang terbuka hijau, fasilitas untuk semua penduduk dan informasi pembangunan dan keterlibatan masyarakat serta wilayah dengan keseimbangan antara fisik-infrastruktur dan alam yang lestari, kemajuan perekonomian serta sosial budaya.
- **Bermartabat** yaitu masyarakat Musi Rawas menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan beretika termasuk didalamnya ramah sebagai ciri khas Musi Rawas.

Tabel 4.3

Tema dan Tematik Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

TEMA
“Peningkatan Infrastruktur Untuk Musi Rawas Mantab”
TEMATIK
Peningkatan Infrastruktur untuk Musi Rawas Mantab
Prioritas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan 2. Pengentasan kemiskinan 3. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah
KONDISI PERLU

Prioritas :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas Infrastruktur untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan prima dalam mencapai visi Mura Mantab.

Untuk mencapai target dalam tema pembangunan tersebut kemudian ditentukan tematik yang sesuai dengan mempertimbangkan 2 (dua) dimensi pembangunan. Dimensi penguatan sektor strategis mengangkat tematik optimalisasi pengelolaan sektor unggulan dan sumber daya alam di Kabupaten Musi Rawas, sedangkan dimensi pemulihan ekonomi mengangkat tematik pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas. Kedua tematik tersebut didukung dengan kondisi perlu yang diwujudkan dalam Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa berbasis teknologi informasi untuk pelayanan prima.

Adapun keselarasan antara Tema Pembangunan Nasional, Tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dan Tema Pembangunan Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4

Keselarasan Tema Pembangunan RKP Nasional Tahun 2023 dan Tema Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan Musi Rawas Tahun 2023

RKP Nasional	RKPD Musi Rawas	RKPD Sumatera Selatan
Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan	Peningkatan Infrastruktur untuk Musi Rawas Mantab	Sumsel Maju Untuk Semua

Keselarasan tema pembangunan antara RKPD Musi Rawas dengan prioritas RKP Nasional yang ke 5 (lima) “**Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar**” dan prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 yang ke 3 (tiga) “**Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang**”

Selanjutnya pada RKPD kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 dengan tema yang sesuai dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-

2026 dan dilatarbelakangi oleh tingkat capaian target bidang Infrastruktur pada tahun 2021 yang masih ada yang belum sesuai sehingga dipilihlah tema yang berkaitan dengan rencana “Peningkatan Infrastruktur ”

4.3 Telaah Terhadap Dokumen Perencanaan Untuk Penentuan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun sebelumnya, dan memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas serta mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis (internal dan eksternal) yang akan dihadapi Musi Rawas pada Tahun 2023.

4.3.1. Telaah Terhadap RKP 2023

Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah. Perencanaan pembangunan nasional Tahun 2023 mengacu kepada RPJMN Tahun 2020 – 2024.

Dalam RPJPN Tahun 2005-2025 Visi Pembangunan 2005-2025 adalah “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”, maka tujuan RPJPN Tahap ke-4 Tahun 2020-2024 diarahkan kepada “**Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing**”.

Tujuan RPJMN ke-4 dapat tercapai dengan acuan pada empat fokus pembangunan sebagai berikut:

1. Kelembagaan politik dan hukum.

2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat.
3. Struktur Perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif.
4. Terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Sesuai dengan arahan pada RPJPN maka tema pada RPJMN 2020-2024 adalah **“Indonesia Berpenghasilan Menengah–Tinggi Yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”** yang didukung dengan :

1. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Karakter Bangsa
3. Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas
4. Pengembangan Wilayah Untuk Pemerataan
5. Infrastruktur Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
7. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Selanjutnya berdasarkan RPJPN dan RPJMN 2020-2024 maka ditetapkan tema RKP Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”

Tema RKP Tahun 2023 tersebut didukung dengan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional yang terdiri dari:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan

- perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukanham dan transformasi pelayanan publik.

4.3.2. Telaah RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Pada tahun 2022 tema RKPD Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai Berikut:

“ Sumsel Maju Untuk Semua”

Dalam kaitan itu, Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 terdiri dari:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
2. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi;
3. Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang;
4. Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah.

4.3.3. Telaah Terhadap pemenuhan janji Kepala Daerah pada saat kampanye yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021– 2026

Sesuai dengan janji kampanye Ratna Machmud dan Suwarti pada kampanye Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas yang telah lalu, telah dituangkan kedalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 melalui visi dan misi RPJMD. Visi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 -2026 adalah:

“Terwujudnya Musi Rawas Yang Maju, Mandiri dan Bermartabat (MANTAB)”

Makna visi tersebut adalah “terwujudnya keseimbangan masyarakat Kabupaten Musi Rawas maju dan mandiri yang ditopang oleh produktivitas masyarakat yang tinggi dan didukung oleh SDM yang unggul dalam tata kehidupan masyarakat bermartabat”. Adapun pengertian dari akronim “*Musi Rawas Maju, Mandiri dan Bermartabat (Mantab)*” adalah sebagai berikut:

Musi Rawas : Yaitu merefleksikan seluruh wilayah dan isi Kabupaten Musi Rawas. Artinya Kabupaten Musi Rawas dan seluruh masyarakat yang berada dan tercatat dalam

wilayah administratif Kabupaten Musi Rawas.

Maju : Yaitu kondisi masyarakat yang terus bergerak menuju kearah yang lebih baik, lebih sehat, lebih cerdas, lebih sejahtera dan religius, ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta adanya perhatian utama pada terpenuhinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya dan ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Perlu ditekankan di sini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin diraih, tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi berupaya keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi mental – spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlaqul mulia (religius).

- Mandiri** : adalah kemampuan riil Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi setahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan. Selain itu ditandai oleh (bersifat) mampu menghasilkan (dalam jumlah besar) produk-produk yang mendatangkan (memberi hasil, manfaat, dan sebagainya) serta menguntungkan dan mampu menghasilkan secara terus menerus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru secara berkisambungan. Mandiri juga ditandai dengan kecukupan ruang untuk hidup dan berkembang, kecukupan pangan, fasilitas peribadatan, pengelolaan air bersih, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas kebugaran, fasilitas transportasi, keselamatan permukiman/kota, pengelolaan air kotor dan drainase serta sanitasi layak, fasilitas pejalan kaki, ruang terbuka hijau, fasilitas untuk semua penduduk dan informasi pembangunan dan keterlibatan masyarakat serta wilayah dengan keseimbangan antara fisik-infrastruktur dan alam yang lestari, kemajuan perekonomian serta sosial budaya.
- Bermartabat** : yaitu Masyarakat Musi Rawas menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan beretika termasuk didalamnya ramah sebagai ciri khas Musi Rawas.

Untuk menjabarkan Visi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026, ditetapkan menjadi 4 (empat) Misi yaitu :

1. Mewujudkan Birokrasi yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi;
2. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas
3. Pemerataan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan;
4. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat.

Tabel 4.5

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Sasaran RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Capaian (2023)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mewujudkan Birokrasi yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Reformasi Birokrasi) bagi pemenuhan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas birokrasi	Indeks RB	57,85
					Nilai SAKIP	BB (71,02)
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	81,52
				Meningkatnya Kapabilitas birokrasi	Indeks SPBE	3.1
					Indeks Profesionalitas ASN	65,84
Meningkatnya pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,05				
2.	Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing dan berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Derajat Pendidikan	Indeks Pendidikan	69,61
				Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks kesehatan	79,5
				Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pemuda serta perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,45
					Indeks Pembangunan Pemuda	Pratama
		Status Kabupaten Layak Anak	725 Madya			
	Memantapkan kehidupan masyarakat yang religius dan aman serta menjunjung tinggi nilai kearifan lokal	Indeks Demokrasi	Terwujudnya Ketertiban, keamanan, Ketentraman dan	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	97%	

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Capaian (2023)
1	2	3	4	5	6	7
				kenyamanan masyarakat		
				Terwujudnya keimanan dan kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	75
				Meningkatnya pelestarian dan pengembangan nilai kearifan dan kebudayaan lokal	Persentase Lembaga Adat yang Aktif	72
					Indeks Literasi Budaya membaca	30,5
3.	Pemerataan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase Konektivitas Antar Wilayah (%)	93,12
				Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (Ciptakarya, Kelistrikan, Pemukiman, Pengairan)	Indeks Infrastruktur dasar	97
					Indeks Sumber Daya Air	56
		Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, penataan ruang dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	70,50
				Meningkatnya penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	97
				Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan	Indeks Penurunan Dampak resiko Bencana	51,72

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Capaian (2023)
1	2	3	4	5	6	7
				bencana		
4	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan	PDRB Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	Rp 6.178,33 milyar
				Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan	PDRB sektor Industri	Rp 1727,73 milyar
					PDRB sektor perdagangan	Rp 1021,4 milyar
				Meningkatnya realisasi investasi Di Kabupaten Musi Rawas	Persentase peningkatan investasi	11
		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pengeluaran perkapita	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan	13,05
				Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran	3,15
				Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	78,18
Meningkatnya Pembangunan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya status desa	Persentase peningkatan Desa Maju	40,32		

4.3.4. Telaah Terhadap Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Musi Rawas

Sesuai dengan pasal Pasal 78 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, salah satu perumusan rancangan awal RKPD adalah penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten.

Pokok-Pokok Pikiran ini memiliki nilai yang strategis karena menjadi pertimbangan dalam merumuskan permasalahan daerah, sehingga diharapkan dapat memiliki kontribusi positif dalam menyempurnakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di masa yang akan datang. Penyusunan ini sekaligus merupakan penyaluran dari aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD pada saat pelaksanaan reses maupun komunikasi dengan masyarakat pada berbagai event kegiatan sosial kemasyarakatan. Penyusunan pokok-pokok pikiran ini sebagai bagian dari strategi mewujudkan visi dan misi Kabupaten Musi Rawas sehinggadiupayakan memiliki keselarasan dan kesinambungan dengan RKPD 2023 sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas.

4.3.5. Telaah Terhadap Hasil evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Sebelumnya

Pelaksanaan Evaluasi terhadap RKPD tahun sebelumnya dilakukan terhadap tiga aspek yaitu :

- a. Evaluasi terhadap capaian indikator makro RKPD tahun sebelumnya:
 1. Ada beberapa indikator makro yang capaiannya perlu ditingkatkan yaitu “**Angka Kemiskinan**”. Sejak tahun 2020 angka kemiskinan terus mengalami kenaikan, akibat Pandemi Covid 19 sehingga penduduk dengan pengeluaran per kapita dibawah garis kemiskinan Kabupaten Musi Rawas yaitu Rp. 504.598,- sekitar 37.750 jiwa atau 19,47 %. Tentunya saja masih sangat sulit untuk mencapai target “**Satudigit**” sesuai dengan target yang telah ditetapkan

oleh Provinsi yaitu Angka Kemiskinan Satu Digit sehingga diperlukan upaya yang maksimal dari OPD dan pihak-pihak terkait agar capaian kinerjanya dapat meningkat dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

b. Evaluasi Indikator Sasaran RKPD tahun sebelumnya

Beberapa indikator yang capaian kinerjanya kurang dari 75% yaitu :

1. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian yang capaian kinerjanya 70 %.
2. Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal yang capaian kinerjanya 57, 14%.
3. Persentase Anak Usia SD yang bisa baca tulis Al Quran yang capaian kinerjanya 50, 24 %.
4. Persentase Anak Usia SD yang Hafidz Al-Quran Jus 30 yang capaian kinerjanya 29, 83%.

c. Evaluasi Pelaksanaan terhadap Program RKPD Tahun 2021 dan Realisasi Fisik mencapai 94,76 % dan Realisasi Keuangan mencapai 92,07 %.

Secara umum Evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. OPD perlu memperhatikan capaian indikator program yang masih rendah. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah apakah target indikator terlalu tinggi, apakah indikator kurang tepat dalam menggambarkan hasil keluaran dari program, atau apakah program tersebut belum dilaksanakan dengan optimal. Dengan demikian dapat dilakukan perubahan target/ mengganti indikator dan/atau mengoptimalkan pelaksanaan program/kegiatan. Dalam menentukan target-target indikator harus berdasarkan data-data kondisi eksisting atau data-data realisasi periode lalu yang akurat sebagai asumsi. Sehingga target indikator tidak melebihi batas kemampuan sumberdaya OPD (*man, money, method, material, machine*).

- b. Menyusun perencanaan anggaran tidak dapat dipisahkan dari penyusunan perencanaan kebijakan (analisa terhadap persoalan eksternal/internal yang perlu diberikan solusi). Dengan kata lain menyusun rencana anggaran harus melalui analisa kebutuhan (bukan keinginan), sehingga alokasi anggaran untuk kegiatan/program bertitik tolak dari persoalan atau kewajiban yang perlu dilaksanakan (amanah Kepala Daerah/amanah RPJMN), dengan demikian program dan kegiatan dapat dibiayai lebih realistis (efisien). Terhadap OPD yang memiliki anggaran besar dan serapan kecil maka perlu melakukan perubahan perencanaan anggarandan kebijakan.

- c. Untuk menghindari potensi tumpang tindih kewenangan menjalankan program/kegiatan/indikator antara OPD satu dengan yang lain, seharusnya pada saat menentukan program/ kegiatan/indikator hal yang pertama perlu diperhatikan adalah tupoksi dari OPD tersebut. Setelah tupoksi diketahui, langkah kedua adalah menganalisis data-data indikator yang relevan dengan tupoksi tersebut. Jika data indikator menunjukkan kondisi yang belum baik, maka dapat dibuat program/kegiatan, namun jika dirasa sudah tidak ada persoalan, maka dapat melihat apakah terdapat persoalan lain yang relevan dengan tupoksi dan perlu diberikan solusi. Jika ya, maka dari persoalan tersebut dapat dibuat analisis *Logical Frame Work*, sehingga munculnya program/kegiatan/indikator berangkat dari kebutuhan akan penyelesaian terhadap persoalan eksiting (bukan dari keinginan) yang relevan dengan Tupoksi-nya. OPD yang memiliki persoalan tumpang tindih kewenangan perlu melakukan perbaikan program-kegiatan-indikatornya.

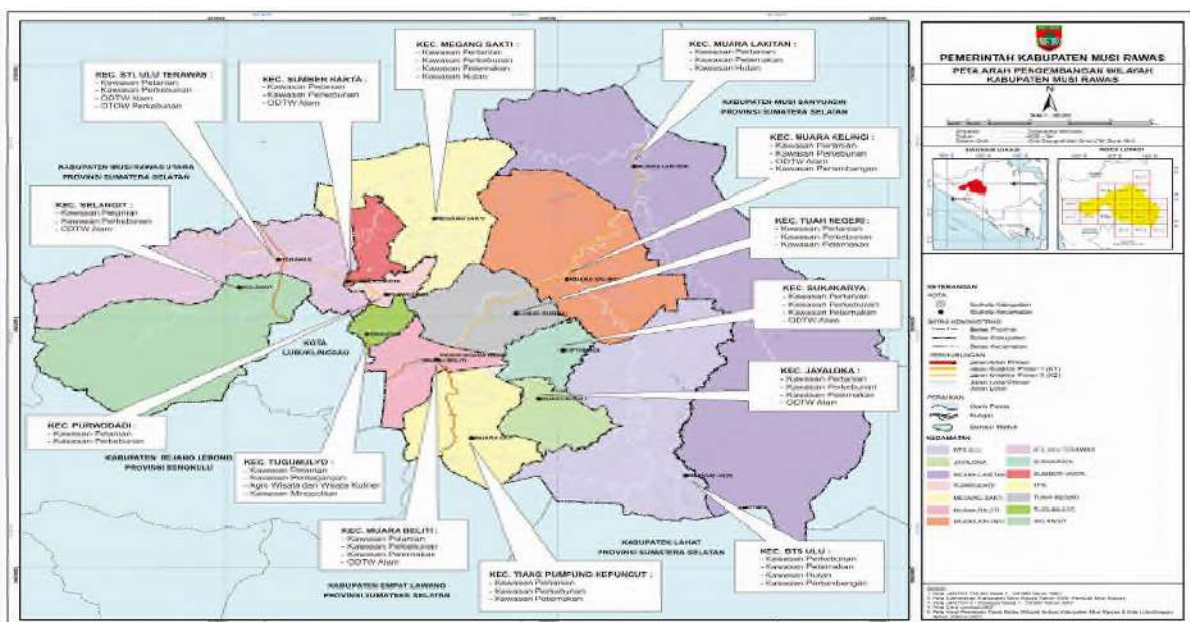
4.3.6. Telaah Terhadap RTRW Kabupaten Musi Rawas

Strategi dan prioritas pembangunan disusun agar mencapai tujuan dan hasil yang terukur dalam hal melaksanakan kegiatan didaerah agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah secara sistematis dan terarah.

Berdasarkan prioritas pembangunan serta strategi yang ditempuh, maka arah kebijakan pembangunan wilayah diupayakan untuk melakukan percepatan pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mendorong pembangunan wilayah di setiap kecamatan sesuai dengan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah. Dalam hal mewujudkan visi dan pelaksanaan misi dan prioritas pembangunan Kabupaten Musi Rawas yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026.

Gambar 4.1.

Peta Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Rawas



Dalam konstelasi RTRW, Muara Beliti sebagai ibukota Kabupaten Musi Rawas berperan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Mengacu pada kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Rawas yang tertuang dalam RPJMD, Muara Beliti berperan sebagai pusat agropolitan (*agropolitan centre*). Berdasarkan rencana struktur ruang, sistem pusat permukiman Kabupaten Musi Rawas terdiri dari Muara Beliti sebagai PKL dan pada jenjang berikutnya terdapat pusat pelayanan yang sekaligus menjadi sub pusat agropolitan (*agropolitan district*) yaitu Simpang Terawas, Megang Sakti, Simpang Semambang dan Muara Lakitan. Sedangkan ibukota kecamatan lainnya diarahkan sebagai sub pusat pelayanan bagi wilayah kecamatan masing-masing. Dengan demikian diharapkan tercipta suatu struktur ruang yang efektif dan efisien dimana Kota Muara Beliti menjadi pusat agropolitan

yang akan melayani 4 sub pusat agropolitan dan masing-masing sub pusat akan menjadi pusat pelayanan sosial ekonomi bagi wilayah *hinterland*. Agar struktur tersebut dapat terwujud dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1). Pembangunan pusat pemerintahan dan pusat agropolitan di Muara Beliti yang terdiri dari :
 - a. Pembangunan infrastruktur kawasan perkantoran, pusat perdagangan dan jasa serta pusat agropolitan berupa sistem jaringan jalan, listrik, drainase, air minum dan telekomunikasi.
 - b. Pembangunan bangunan utama perkantoran, pusat perdagangan dan bangunan pendukung kegiatan agropolitan.
 - c. Pembangunan pemukiman perkotaan, fasilitas sosial, ekonomi dan budaya, serta RTH untuk mendukung fungsi pusat perkotaan dengan pelayanan skala kabupaten.
 - d. Muara Beliti yang berfungsi sebagai *Agropolitan Center (AC)* didukung dengan pembangunan Terminal Peti Kemas di desa Durian Remuk dan Pergudangan.
- 2). Pembangunan Sub Pusat Agropolitan atau Pusat Pelayanan pada 4(empat) lokasi yaitu Simpang Terawas, Megang Sakti, Muara Lakitan dan Simpang Semambang berupa :
 - a. Sub Terminal Agropolitan.
 - b. Kawasan pertokoan/ruko.
 - c. Perkantoran untuk jasa dan keuangan.
 - d. Sub Terminal Penumpang.
 - e. Permukiman perkotaan.
 - f. Industri agro.
 - g. Workshop dan fasilitas pendukung kegiatan agropolitan.
- 3). Pembangunan infrastruktur wilayah yang mendukung terbangunnya sistem perkotaan dan agropolitan, yaitu :
 - a. Jalan kolektor yang menghubungkan pusat agropolitan Muara Belitidengan sub pusat agropolitan dan antar sub pusat agropolitan.
 - b. Pembangunan sistem pengairan berupa Bendung Daerah Irigasi (DI) Lakitan, DI Kelingi, DI Megang Tikip, dan DI lainnya, dengan sistem jaringan

irigasi untuk kecamatan yang telah dan akan dikembangkan pertanian padi-sawah seperti Tugumulyo, Muara Beliti, Purwodadi, Sumber Harta, STL Ulu Terawas, dan Megang Sakti.

- c. Pembangunan infrastruktur strategis lainnya seperti jalan Kereta Api (KA) yang akan menghubungkan Lubuklinggau, rencana Terminal Peti Kemas (di Selatan Muara Beliti), Palembang dan peningkatan Bandara Silampari.
- 4). Pembangunan fasilitas sosial ekonomi pada setiap ibukota kecamatan (sub pusat pelayanan) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, yaitu:
- a. Pasar Kecamatan
 - b. Puskesmas
 - c. Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah
 - d. Fasilitas umum; Tempat Ibadah, RTH dan lainnya

4.3.7. Telaah Terhadap Isu Strategis

Untuk mengatasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas, maka Kabupaten Musi Rawas menerjemahkan permasalahan pembangunan ke dalam isu strategis pada perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Isu Strategis Pembangunan Daerah

Permasalahan	Isu Strategis
<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur dasar berkualitas yang belum merata 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata
<ul style="list-style-type: none"> • Bertambahnya jumlah penduduk miskin 	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan kemiskinan dan pemulihan ekonomi secara terintegrasi Terhadap penduduk dan sektor ekonomi produktif
<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM)
<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintah dan pelayanan prima 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan publik berkualitas, merata dan berwawasan lingkungan

4.4 Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Dengan memperhatikan telaah tersebut diatas, maka prioritas pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2023 adalah:

Tabel 4.7
Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Sasaran	Indikator Prioritas Daerah	Target 2023
1	Peningkatan Infrastruktur Berwawasan lingkungan	Meningkatnya panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	Persentase Konektivitas antar wilayah	93,12
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (Ciptakarya, Kelistrikan, Pemukiman, Irigasi, komunikasi)	Indeks Infrastruktur Dasar	97
			Indeks Sumber Daya Air	56
		meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,50
		Meningkatnya penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	97
		Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana	Indeks Penurunan Dampak Resiko Bencana	51,72
2	Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya kontribusi pertanian dalam arti luas terhadap pertumbuhan perekonomian	PDRB sektor pertanian	Rp 6.178,33 milyar
		Meningkatnya kontribusi perindustrian perdagangan terhadap perekonomian	PDRB sektor Industri	Rp 1727,73 milyar
			PDRB sektor perdagangan	Rp 1021,4 milyar
		Meningkatnya realisasi investasi Di Kabupaten Musi Rawas	Persentase peningkatan investasi	11

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Sasaran	Indikator Prioritas Daerah	Target 2023	
		Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan	13,05	
		Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran	3,15	
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	78,18	
		Meningkatnya status desa	Persentase Peningkatan Desa Maju	40,32	
3	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas	Meningkatnya Derajat Pendidikan	Indeks Pendidikan	69,61	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks Kesehatan	79,5	
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pemuda serta perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,45	
			Kabupaten Layak Pemuda	Pratama	
		Terwujudnya Ketertiban, Keamanan, Ketentraman dan Kenyamanan Masyarakat	Status Kabupaten Layak Anak	725 Madya	
			Indeks Ketertiban dan Ketentraman	97%	
			Indeks Kerukunan Umat Beragama	75	
			Persentase Warisan budaya yang dilestarikan	72	
				Indeks Budaya Literasi Daerah	30,5
		4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	Indeks RB
	Nilai SAKIP			BB (71,02)	
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)			81,52	
Meningkatnya kapabilitas birokrasi	Indeks SPBE			3.1	
	Indeks Profesionalitas ASN			65,84	

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Sasaran	Indikator Prioritas Daerah	Target 2023
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,05

Selain memperhatikan isu strategis daerah sebagaimana yang tertuang didalam tabel 4.6 diatas serta RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 dalam penentuan prioritas daerah tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas juga memperhatikan arahan Pemerintah Pusat sebagaimana yang tertuang didalam RPJMN 2020-2024 dan arah kebijakan RKP Tahun 2023, serta arah kebijakan RKPDP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023. Berdasarkan arahan Pemerintah Pusat dan Provinsi, selanjutnya dilakukan sinkronisasi kondisi dan karakteristik daerah, prioritas daerah yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Musi Rawas tahun 2023 yaitu untuk mendukung pencapaian fokus dan sasaran pembangunan daerah dengan mengacu isu permasalahan yang ada di Kabupaten Musi Rawas maka penjabaran tema dan prioritas pembangunan dituangkan ke dalam arah kebijakan, program prioritas dan program nomenklatur pembangunan daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 4.8
Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPd TAHUN 2023	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
1	Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	1.Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan infrastruktur	Membangun dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	Membangun jembatan untuk konektivitas antar wilayah	Program pembangunan jembatan	Pembangunan jembatan, peningkatan jalan dan jembatan
				Memelihara dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	Program peningkatan jalan dan jembatan	
			Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur kelistrikan, sanitasi, jaringan irigasi	Pemenuhan jaringan listrik untuk konektivitas dan pengembangan wilayah	Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan listrik	Pembangunan sarana dan prasarana listrik
				Membangun dan meningkatkan kualitas jaringan irigasi	Pengelolaan sumber daya air untuk irigasi	Pembangunan dan optimalisasi jaringan irigasi

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2023	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
				Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur sanitasi	Pengelolaan Limbah dan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi	Pengelolaan Limbah Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi
				Meningkatkan jaringan air bersih bagi wilayah rawan air/pemenuhan akses rumah tangga terhadap air bersih	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pemasangan jaringan penyediaan air minum ke rumah-rumah penduduk
			Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur fasilitas umum dan pemerintahan	Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur fasilitas pelayanan publik	Peningkatan sarana dan prasarana umum	Pembangunan sarana dan prasarana Umum
			meningkatkan cakupan layanan infrastruktur TIK	Membangun infrastruktur TIK	Pembangunan sarana dan prasarana TIK	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana TIK

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2023	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
		2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	<p>Membangun infrastruktur pengelolaan persampahan</p> <p>Meningkatkan peran aktif masyarakat dan korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup</p>	<p>Pembangunan prasarana pengelolaan persampahan</p> <p>Pemberdayaan masyarakat dan korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup</p>	<p>Pengelolaan persampahan</p> <p>Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup</p>
2	Pengentasan kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	<p>1. Memperkuat Ketahanan sosial bagi masyarakat miskin</p> <p>2. meningkatkan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin</p>	<p>Memantapkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin</p> <p>Pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat miskin</p>	<p>Program Jaringan Pengamanan Sosial</p> <p>1. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan</p> <p>2. Peningkatan akses dan mutu</p>	<p>Pemberian Bantuan bagi masyarakat miskin</p> <p>pendidikan gratis bagi masyarakat miskin</p> <p>Pengobatan gratis bagi masyarakat miskin</p>

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2023	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
					Pelayanan kesehatan	
					3. Penyediaan Rumah layak huni	Pembangunan Rumah Layak Huni
					4. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kelistrikan	Penyediaan listrik yang murah dan merata untuk penduduk miskin
			3. Memperkuat ketahanan ekonomi bagi masyarakat miskin	Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap Sumber Daya Ekonomi	Program Pemberdayaan masyarakat miskin	pemberian modal usaha, bantuan alat usaha, pelatihan, penciptaan lapangan kerja
3	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	1. Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatkan cakupan layanan pendidikan dasar	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dasar	Pendidikan yang terjangkau untuk penduduk miskin	Penyelenggaraan pendidikan dasar dua belas tahun
						Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan
				Meningkatkan kualitas sarana	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan	Pembangunan dan peningkatan kualitas gedung sekolah

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2023	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
				dan prasarana pendidikan	prasarana pendidikan	Pengadaan sarana pendidikan
			Meningkatkan kualitas SDM tenaga kependidikan	Pemerataan guru	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga pendidik	Penyelenggaraan peningkatan kapasitas SDM Bidang pendidikan
				Peningkatan kualitas guru		Penerimaan / pengadaan tenaga pendidik
			Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal	Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan ketrampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan nonformal	Penyelenggaraan pendidikan nonformal	Pendidikan keagamaan Rumah tahfiz, pondok pesantren
					Pendidikan kejar paket	
		2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan serta SDM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2023	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan akses dan kemudahan layanan	memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK	Penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik
				Pengembangan SDM layanan publik	Peningkatan kualitas SDM layanan Publik	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas/kompetensi ASN
				Peningkatan kualitas kelembagaan unit layanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintah yang baik

Prioritas pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 didukung dengan Program Prioritas Daerah dan Kegiatan Prioritas Daerah. Program Prioritas dan Kegiatan Daerah harus memiliki indikator dan target yang akan dicapai pada tahun 2023. Masing-masing Program Prioritas Daerah dan Kegiatan Prioritas Daerah akan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.9

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan**

Program Prioritas : Program pembangunan jalan dan jembatan

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Program Prioritas RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggung jawab
Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan	Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan infrastruktur	• Persentase pembangunan Jalan	17,44	Dinas PU BinaMarga
		• Persentase pembangunan jembatan	15	

Tabel 4.10

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan**

Program Prioritas : Program peningkatan jalan dan jembatan

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Program Prioritas RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggung jawab
Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan	Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan infrastruktur	• Persentase peningkatan jalan	17,7	Dinas PU BinaMarga
		• Persentase rehab/pemeliharaan jalan	20,04	
		• Persentase peningkatan jembatan	16,67	
		• Persentase jembatan yang terpelihara	15,79	

Tabel 4.11

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan**

Program Prioritas : Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan listrik

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Program Prioritas RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Pembangunan sarana dan prasarana listrik	Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan infrastruktur	• Persentase jangkauan jaringan listrik	37,9	DPUCKTRP
		• Persentase jumlah lampu penerangan jalan umum	44	

Tabel 4.12

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan**Program Prioritas : Pengelolaan sumber daya air untuk irigasi
Pengelolaan sumber daya air untuk irigasi

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Program Prioritas RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Pembangunan dan optimalisasi jaringan irigasi	Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan infrastruktur	• Persentase prasarana fisik irigasi dalam kondisi baik	25	DPUCKTRP

Tabel 4.13

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan**

Program Prioritas : Pengelolaan Limbah dan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Pengelolaan Limbah	Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan infrastruktur	• Persentase usaha/kegiatan yang patuh dalam mengelola B3 dan limbah B3	• 68	Dinas LH

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi	Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Rasio rumah tangga bersanitasi per IPAL Komunal 	<ul style="list-style-type: none"> 91 	<ul style="list-style-type: none"> DPUCKTRP

Tabel 4.14

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan**

Program Prioritas : Pemasangan jaringan penyediaan air minum ke rumah-rumah penduduk

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Pemasangan jaringan penyediaan air minum ke rumah-rumah penduduk	Pemasangan jaringan penyediaan air minum ke rumah-rumah penduduk	<ul style="list-style-type: none"> Rasio rumah tangga pengguna air minum per SPAM IKK 	<ul style="list-style-type: none"> 29 	<ul style="list-style-type: none"> DPUCKTRP

Tabel 4.15

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan**

Program Prioritas : Peningkatan sarana dan prasarana umum

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Pembangunan sarana dan prasarana Umum	Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Persentase PSU perumahan yang layak 	<ul style="list-style-type: none"> 40 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perkim

Tabel 4.16

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan**

Program Prioritas : Pembangunan sarana dan prasarana TIK

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana TIK	Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan TIK	<ul style="list-style-type: none"> Persentase desa yang tersedia jaringan TIK 	<ul style="list-style-type: none"> 55 	<ul style="list-style-type: none"> Diskominfo dan Statistik

Tabel 4.17

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan**

Program Prioritas : Pembangunan prasarana pengelolaan persampahan

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Pengelolaan persampahan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> Persentase sampah yang dikelola Jumlah sampah yang diangkut ke TPA 	<ul style="list-style-type: none"> 34 2700 ton 	Dinas LH

Tabel 4.18

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan**

Program Prioritas : Pemberdayaan masyarakat dan korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup	Meningkatnya Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> Persentase diklat dan penyuluhan LH untuk masyarakat Persentase penghargaan LH untuk masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> 100 100 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas LH Dinas LH

Tabel 4.19

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Pengentasan kemiskinan**

Program Prioritas : Program Jaringan Pengamanan Sosial

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Pemberian Bantuan bagi masyarakat miskin	Meningkatnya pemerataan bantuan yang diterima masyarakat miskin	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keluarga PMKS penerima manfaat yang memperoleh jaminan sosial sesuai ketentuan Persentase PMKS yang memiliki kemampuan ketrampilan berwirausaha Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar 	<ul style="list-style-type: none"> 95 82 82 	Dinas Sosial

Tabel 4.20

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Pengentasan kemiskinan**

Program Prioritas : Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Pendidikan gratis bagi masyarakat miskin	Terpenuhinya pendidikan gratis bagi masyarakat miskin	<ul style="list-style-type: none"> Persentase siswa penerima subsidi 	<ul style="list-style-type: none"> 40 	Dibnas Pendidikan

Tabel 4.21

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Pengentasan kemiskinan**

Program Prioritas : Peningkatan akses dan mutu Pelayanan kesehatan

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Pengobatan gratis bagi masyarakat miskin	Terlaksananya pengobatan gratis bagi masyarakat miskin	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat yang terlaksana. 	100	RS. Dr. Sobirin

Tabel 4.22

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Pengentasan kemiskinan**

Program Prioritas : Penyediaan Rumah layak huni

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Pembangunan Rumah Layak Huni	Meningkatnya Rehabilitasi rumah tidak layak huni	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pemenuhan kebutuhan MBR mendapatkan akses bantuan RTLH 	<ul style="list-style-type: none"> 50 	Dinas Perkim

Tabel 4.23

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Pengentasan kemiskinan**

Program Prioritas : Peningkatan akses dan mutu pelayanan kelistrikan

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Penyediaan listrik yang murah dan merata untuk penduduk miskin	Tersedianya listrik yang murah dan merata untuk penduduk miskin	<ul style="list-style-type: none"> Persentase jangkauan jaringan listrik 	<ul style="list-style-type: none"> 37,9 	Dinas PUCKTRP

Tabel 4.24

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Pengentasan kemiskinan**

Program Prioritas : Program Pemberdayaan masyarakat miskin

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Pemberian modal usaha, bantuan alat usaha, pelatihan, penciptaan lapangan kerja	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat miskin	<ul style="list-style-type: none"> Persentase PMKS yang memiliki kemampuan ketrampilan berwirausaha 	<ul style="list-style-type: none"> 82 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Sosial

Tabel 4.25

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas**

Program Prioritas : Pendidikan yang terjangkau untuk penduduk miskin

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Penyelenggaraan pendidikan dasar dua belas tahun		<ul style="list-style-type: none"> Persentase PAUD dalam kondisi baik Persentase SD, SMP dalam kondisi baik 	<ul style="list-style-type: none"> 100 76,30 	Dinas Pendidikan

Tabel 4.26

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas**

Program Prioritas : Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Pembangunan dan peningkatan kualitas gedung sekolah	Meningkatnya kualitas gedung sekolah	<ul style="list-style-type: none"> Persentase PAUD cukup saporas Persentase SD, SMP cukup saporas 	<ul style="list-style-type: none"> 66,30 66,30 	Dinas Pendidikan

Tabel 4.27

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas**

Program Prioritas : Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga pendidik

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Penyelenggaraan peningkatan kapasitas SDM Bidang pendidikan		<ul style="list-style-type: none"> Persentase kualifikasi guru berpendidikan S1 Persentase guru bersertifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> 75 75,3 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pendidikan

Tabel 4.28

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas**

Program Prioritas : Penyelenggaraan pendidikan nonformal

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Pendidikan keagamaan Rumah tahfiz, pondok pesantren		<ul style="list-style-type: none"> Persentase peningkatan pemberian bantuan bidang keagamaan 	<ul style="list-style-type: none"> 100 	Bagian Kesra

Tabel 4.29

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas**

Program Prioritas : Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan serta SDM Bidang Kesehatan

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat	Terciptanya pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat	<ul style="list-style-type: none"> Persentase ketersediaan SDM Kesehatan yang berkompeten di bidang kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> 100 	Dinas Kesehatan

Tabel 4.30

Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Peningkatan Tata Kelola Pemerintah**

Program Prioritas : Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik	Terselenggaranya pelayanan publik yang berbasis elektronik	<ul style="list-style-type: none"> Persentase aplikasi yang diintegrasikan Persentase desa yang tersedia jaringan TIK 	<ul style="list-style-type: none"> 55 55 	Diskominfo dan Statistik

Tabel 4.31

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Peningkatan Tata Kelola Pemerintah**

Program Prioritas : Peningkatan kualitas SDM layanan Publik

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas/kompetensi ASN	Meningkatnya kapasitas / kompetensi ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai dimensi kompetensi aparatur ASN Pemkab Musi Rawas 	<ul style="list-style-type: none"> • 15 	<ul style="list-style-type: none"> • BKPSDM

Tabel 4.32

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

Prioritas Daerah : **Peningkatan Tata Kelola Pemerintah**

Program Prioritas : Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2023	OPD Penanggungjawab
Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintah yang baik		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah PD dengan tingkat maturitas SPIP level 3 • Jumlah PD yang menerapkan penilaian resiko • Jumlah PD yang memperoleh nilai SAKIP min. Nilai BB 	<ul style="list-style-type: none"> • 19 PD • 36 PD • 31 PD 	<ul style="list-style-type: none"> • Inspektorat

4.5 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 Dengan Prioritas Nasional Tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2023.

4.5.1 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 Dengan Prioritas Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Nasional Tahun 2023	Garis Keterkaitan	Prioritas Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023	Program Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	Program pembangunan jalan dan jembatan
				Program peningkatan jalan dan jembatan
				Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan listrik
				Pengelolaan sumber daya air untuk irigasi
				Pengelolaan Limbah dan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi
				Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
				Peningkatan sarana dan prasarana umum
				Pembangunan sarana dan prasarana TIK
				Pembangunan prasarana pengelolaan persampahan
				Pemberdayaan masyarakat dan korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		Pengentasan kemiskinan	Program Jaringan Pengamanan Sosial
				Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan
				Peningkatan akses dan mutu Pelayanan kesehatan
				Penyediaan Rumah layak huni
				Peningkatan akses dan mutu pelayanan kelistrikan
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing		Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Program Pemberdayaan masyarakat miskin
				Pendidikan yang terjangkau untuk penduduk miskin
				Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan
				Penyelenggaraan pendidikan nonformal
				Pendidikan kejar paket
4.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan		Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK
				5.
6.	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim		Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	
				7.

4.5.2 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 Dengan Prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Kabupaten Musi Rawas secara administratif merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu Prioritas Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2023 yang direncanakan pada sub bab didepan juga ditujukan untuk mendukung pencapaian Prioritas Provinsi Sumatera Selatan pada RKPD Sumatera Selatan Tahun 2023. Sinkronisasi prioritas daerah dengan prioritas provinsi disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.33
Sinkronisasi Prioritas Daerah Tahun 2023 dengan
Prioritas Provinsi Tahun 2023

No	Prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	Garis Keterkaitan	Prioritas Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023	Program Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023
1.	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial		Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	Program pembangunan jalan dan jembatan
				Program peningkatan jalan dan jembatan
				Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan listrik
				Pengelolaan sumber daya air untuk irigasi
				Pengelolaan Limbah dan Peningkatan
				pembangunan sarana dan prasarana sanitasi
				Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
				Peningkatan sarana dan prasarana umum
				Pembangunan sarana dan prasarana TIK
				Pembangunan prasarana pengelolaan persampahan
				Pemberdayaan masyarakat dan korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup
2.	Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi		Pengentasan kemiskinan	Program Jaringan Pengamanan Sosial
				Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan
				Peningkatan akses dan mutu Pelayanan kesehatan
				Penyediaan Rumah layak huni
				Peningkatan akses dan mutu pelayanan kelistrikan
3.	Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang		Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Pendidikan yang terjangkau untuk penduduk miskin
				Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan
				Penyelenggaraan pendidikan nonformal
				Pendidikan kejar paket

No	Prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	Garis Keterkaitan	Prioritas Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023	Program Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023
				Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan serta SDM Bidang Kesehatan
4.	Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah	←	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK Peningkatan kualitas SDM layanan Publik Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

4.5.3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2023

Tabel 4.34
Sinkronisasi Prioritas Daerah Tahun 2023 dengan RPJMD 2021-2026

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RPKD TAHUN 2023	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Misi
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan infrastruktur	Membangun dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	Membangun jalan dan jembatan untuk konektivitas antar wilayah Memelihara dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	M3. Pemerataan infrastruktur yang berkualitas serta berwawasan lingkungan
			Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur kelistrikan, sanitasi, jaringan irigasi	Pemenuhan jaringan listrik untuk konektivitas dan pengembangan wilayah	
			Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur fasilitas umum dan pemerintahan	Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur fasilitas pelayanan publik	
			meningkatkan cakupan layanan infrastruktur TIK	Membangun infrastruktur TIK	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Membangun infrastruktur pengelolaan persampahan	
				Meningkatkan peran aktif masyarakat dan korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup	
2.	pengentasan kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Memperkuat Ketahanan sosial bagi masyarakat miskin	Memantapkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin	M4. Memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat
			Meningkatkan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin	Pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat miskin	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPDTAHUN 2023	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Misi
1	2	3	4	5	6
		Memperkuat ketahanan ekonomi bagi masyarakat miskin	Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap Sumber Daya Ekonomi	Program Pemberdayaan masyarakat miskin	
3.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatkan cakupan layanan pendidikan dasar	Meningkatkan aksebilitas masyarakat terhadap pendidikan dasar	M2. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan			Pemerataan guru		
Meningkatkan kualitas SDM tenaga kependidikan			Peningkatan kualitas guru		
Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal		Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan ketrampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan nonformal			
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat	
4.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan akses dan kemudahan layanan	memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	M1. Mewujudkan birokrasi yang profesional berbasis teknologi
Pengembangan SDM layanan publik					
Peningkatan kualitas kelembagaan unit layanan publik					

4.6 Strategi Pendukung Tujuan Pembangunan

4.6.1 Strategi Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan SDGs

SDGs (Sustainable Development Goals) atau yang lebih dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan sebuah kesepakatan global baru yang dibuat oleh PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) sebagai bentuk dari tindak lanjut kesepakatan global yang telah dibuat sebelumnya yakni MDGs (Millennium Development Goals). SDGs juga dapat didefinisikan sebagai kesepakatan tujuan pembangunan baru yang dapat mendorong pembangunan ke arah yang lebih lanjut didasarkan pada hak asasi manusia ataupun kesetaraan

manusia dengan tujuan mendorong pembangunan dalam bidang sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan sebagainya. SDGs juga dilaksanakan dengan prinsip universal dan memiliki motto yaitu *"No One Left Behind"* yang memiliki arti tidak ada satu pun yang tertinggal.

SDGs (Sustainable Development Goals) sendiri memiliki 17 tujuan yang diadopsi, diperbaharui serta dimodifikasi dari MDGs (Millennium Development Goals) itu sendiri, yakni sebagai berikut :

1. Tanpa adanya kemiskinan.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu segala bentuk kemiskinan di berbagai tempat harus diminimalisirkan, entah itu dengan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan ataupun hal semacamnya.

2. Tanpa adanya kelaparan.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu untuk mengakhiri kelaparan yang ada, mencapai dan mempertahankan ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi yang dicakup, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan ke depannya.

3. Kehidupan sehat dan sejahtera.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua jenjang usia.

4. Pendidikan berkualitas.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu memastikan setiap pendidikan yang diterima berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang di dunia.

5. Kesetaraan gender.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu mencapai kesetaraan gender sekaligus mengurangi kesenjangan antar gender dan memberdayakan semua perempuan sebagaimana mestinya.

6. Air bersih dan sanitasi layak.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.

7. Energi bersih dan terjangkau.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu memastikan akses untuk energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua kalangan.

8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat dilakukan dengan cara mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua sebagai salah satu contohnya.

9. Industri, inovasi dan infrastruktur.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu membangun infrastruktur yang kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.

10. Berkurangnya kesenjangan.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu mengurangi kesenjangan di dalam dan diantara negara-negara.

11. Kota dan komunitas berkelanjutan.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu membuat wilayah perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.

12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

13. Penanganan perubahan iklim.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. Contohnya mengurangi pemakaian Air Conditioner yang dapat merusak lingkungan,

14. Ekosistem laut.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

15. Ekosistem daratan.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu ekosistem yang ada di darat contohnya seperti hutan harus dikelola secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.

16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.

17. Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

17 tujuan di atas telah disetujui oleh 197 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan Agustus tahun 2015 lalu. SDGs (Sustainable Development Goals) ini sendiri akan dijadikan sebagai tujuan pembangunan global selama 15 tahun ke depan hingga tahun 2030. Dengan adanya SDGs (Sustainable Development Goals) ini, diharapkan pembangunan yang ada di dunia menjadi lebih baik dan terarah ke depannya seiring perubahan zaman.

Berikut ini tabel 4.21 yang menyajikan keterkaitan antara prioritas pembangunan Kabupaten Musi Rawas dalam upaya untuk mendukung pencapaian tujuan SDGs

Tabel 4.35
Korelasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Dalam Merespon Program SDGs

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Prioritas Pembangunan RPKDKabupaten Musi Rawas	Program Prioritas RPKD Kabupaten Musi Rawas
1	Tanpa adanya kemiskinan	Pengentasan kemiskinan	1. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan 2. Peningkatan akses dan mutu Pelayanan kesehatan 3. Penyediaan Rumah layak huni 4. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kelistrikan 5. Program Pemberdayaan masyarakat miskin
2	Tanpa adanya kelaparan	Pengentasan kemiskinan	Program Jaringan Pengamanan Sosial
3	Kehidupan sehat dan Sejahtera	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan serta SDM

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Prioritas Pembangunan RKPDKabupaten Musi Rawas	Program Prioritas RKPD Kabupaten Musi Rawas
			Bidang Kesehatan
4	Pendidikan berkualitas	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan yang terjangkau untuk penduduk miskin • Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan • Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga pendidik • Penyelenggaraan pendidikan nonformal • Pendidikan kejar paket
5	Kesetaraan gender.	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan serta SDM Bidang Kesehatan
6	Air bersih dan sanitasi layak	Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Limbah dan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi • Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
7	Energi bersih dan terjangkau	Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan listrik
8	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	Pengentasan kemiskinan	Program Pemberdayaan masyarakat miskin rakyat
9	Industri, inovasi dan infrastruktur	Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana dan prasarana TIK
10	Berkurangnya kesenjangan	Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Program pembangunan jalan dan jembatan • Program peningkatan jalan dan jembatan
11	Kota dan komunitas Berkelanjutan	Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Program pembangunan jalan dan jembatan

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Prioritas Pembangunan RKPDKabupaten Musi Rawas	Program Prioritas RKPD Kabupaten Musi Rawas
			<ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan jalan dan jembatan • Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana • Pembangunan sarana dan prasarana TIK • Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan listrik • Peningkatan penanganan pemukiman kumuh
12	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	Pengentasan kemiskinan	Program Pemberdayaan masyarakat miskin
13	Penanganan perubahan iklim	Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	Pemberdayaan masyarakat dan korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup
14	Ekosistem laut.	Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	Pemberdayaan masyarakat dan korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup
15	Ekosistem daratan	Pengentasan kemiskinan	Program Pemberdayaan masyarakat miskin
		Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	Pemberdayaan masyarakat dan korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup
16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih
			Peningkatan kualitas SDM layanan Publik
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

4.6.2 Strategi Untuk Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarustamaan adalah upaya/strategi yang harus dilakukan untuk memberi peluang kepada seluruh komponen atau stakeholders agar dapat berperan secara optimal dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender (gender

mainstreaming) merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan dan keadilan gender (marginalisasi, stereotype, subordinasi, kekerasan dan beban ganda).

Pelaksanaan PUG dalam masyarakat tercermin dalam berbagai aktivitas yang dijalankan oleh OPD dengan didukung Tim Penggerak PKK dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW). Bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terhadap kaum perempuan dan anak-anak antara lain :

- Sosialisasi Kesetaraan Keadilan Gender (KKG)
- Pencanangan Musi Rawas sebagai Kabupaten layak anak,
- Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan,
- Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan melalui koordinasi dan sosialisasi dengan kader PKK, posyandu, puskesmas dan RS dalam upaya mengurangi/ meminimalisasir kematianIbu dan bayi.
- Kegiatan usaha ekonomi produktif dalam rangka program terpadu pemberdayaan masyarakat berbasis gender, serta
- Koordinasi dan sosialisasi terhadap organisasi masyarakat perempuan diMusi Rawas meliputi PKK, DWP, dan GOW.

Tabel 4.36
Dukungan Prioritas Daerah Terhadap Pengarustamaan Gender

Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah	Kegiatan Nomenklatur Daerah
Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah	Kegiatan Nomenklatur Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> Program Perlindungan Perempuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4.6.3. Strategi Untuk Mendukung Pelaksanaan SPM

SPM merupakan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sementara itu, pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah/pemerintah daerah untuk memenuhinya merupakan jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Dengan demikian maka penerapan SPM yang dilakukan oleh Pemerintah daerah, akan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah terhadap mutu dan jenis pelayanan yang prioritas kepada masyarakat. Oleh karenanya, dalam rangka percepatan pencapaian SPM di Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2023, telah dirumuskan beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Strategi

- 1) Penataan kelembagaan pemerintah yang sesuai kebutuhan, tepat fungsi dan tepat ukuran
- 2) Peningkatan kualitas SDM aparatur yang berkinerja tinggi dan sejahtera
- 3) Pemanfaatan teknologi bagi aparatur untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi
- 4) Pemberian kemudahan akses infrastruktur dan akses modal bagi masyarakat

b. Arah Kebijakan

- 1) Mewujudkan Organisasi Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien;
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;
- 3) Peningkatan dan pemenuhan pelayanan dasar publik terutama di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air minum, energi/listrik, telekomunikasi, perumahan dan permukiman melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- 4) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui produk unggulan daerah, posisi strategis, dan keterkaitan antar kawasan yang meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran.

4.7 Arah Pengembangan Kecamatan

Strategi kebijakan pembangunan wilayah kabupaten Musi Rawas diarahkan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah dengan memperhatikan karakteristik suatu wilayah seperti kandungan sumber daya alam, perbedaan demografis, dan konsentrasi kegiatan ekonomi di suatu wilayah.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berdasarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 maupun perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional dan nasional, serta dengan memperhatikan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi dan diformulasikan dari hasil Musrenbang Tahun 2022, maka dalam rangka penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah untuk Tahun 2023 disusun fokus pembangunan daerah yang menjadi kebijakan umum dalam penyusunan APBD Tahun 2023. Fokus pembangunan daerah yang tercakup dalam RKPD ini pada dasarnya merupakan kerangka operasional sebagai arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV, bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi sesuai dengan isu aktual dan kondisi umum yang dihadapi, maka agenda pada Tahun 2023 adalah pencapaian target prioritas pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, prioritas pembangunan daerah tersebut tertuang dalam daftar program dan kegiatan serta pagu indikatif Perangkat Daerah, karena bersifat indikatif maka implementasinya akan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, berikut rencana pembiayaan berdasarkan prioritas pembangunan daerah tahun 2023.

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

NO	PRIORITAS	FOKUS	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	Peningkatan Infrastruktur Berwawasan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (Ciptakarya, Kelistrikan, Pemukiman, Irigasi, komunikasi) 3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 4. Meningkatnya penataan ruang 5. Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 2. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan 3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 4. Dinas Lingkungan hidup 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6. Dinas Perhubungan 7. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 	528.914.867.112
2	Pengentasan kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kontribusi pertanian dalam arti luas terhadap pertumbuhan perekonomian 2. Meningkatnya kemandirian pangan 3. Meningkatnya kontribusi perindustrian perdagangan terhadap perekonomian 4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM serta Lembaga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pertanian dan Peternakan 2. Dinas Ketahanan Pangan 3. Dinas Perkebunan 4. Dinas Perikanan 5. Dinas Koperasi UKM 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 7. DPMPSTP 8. BPPRD 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 10. Dinas Sosial 11. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 	121.475.556.526

NO	PRIORITAS	FOKUS	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
		<p>Ekonomi non pertanian</p> <p>5. Meningkatnya pelayanan dan bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS</p> <p>6. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata</p>	12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
3	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas	<p>1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat</p> <p>2. Meningkatnya kualitas pendidikan</p> <p>3. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama</p>	<p>1. Dinas Kesehatan</p> <p>2. RS. Dr. Sobirin</p> <p>3. Dinas Pendidikan</p> <p>4. Badan Kesatuan Bangsa Politik</p> <p>5. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB</p> <p>6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</p> <p>7. Dinas Pemuda dan Olahraga</p> <p>8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>10. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah</p>	787.107.235.409
4.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah	<p>1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan profesionalisme aparatur</p> <p>2. Meningkatnya keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</p>	<p>1. Sekretariat DPRD</p> <p>2. Sekretariat Daerah</p> <p>3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p> <p>4. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p>	594.615.798.733

NO	PRIORITAS	FOKUS	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
			6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 7. Inspektorat 8. 14 Kecamatan	
Jumlah				2.032.113.457.780

Dari usulan rencana kerja dan pendanaan daerah melalui perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang tertuang didalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.2

Rekap Rencana Pendanaan Per Perangkat Daerah
Perubahan Tahun Anggaran 2023

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Anggaran Perubahan 2022
1	Dinas Pendidikan	413.321.970.039
2	Dinas Kesehatan	192.557.619.917
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Sobirin	103.217.615.582
4	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan	180.481.887.770
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	300.259.745.988
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	16.360.574.720
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	12.226.933.692
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.445.779.681
9	Dinas Sosial	12.351.122.307
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.654.918.976
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.028.178.921
12	Dinas Ketahanan Pangan	4.299.652.480
13	Dinas Lingkungan hidup	12.803.939.390
14	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.701.512.891
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.361.459.205
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.301.650.506
17	Dinas Perhubungan	5.478.871.427
18	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	11.084.068.136
19	Dinas Koperasi ,Usaha Kecil dan Menengah	3.572.733.743
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.532.961.268
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	13.305.029.060
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	21.527.438.661
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.648.151.817

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Anggaran Perubahan 2022
24	Dinas Perikanan	5.103.523.602
25	Dinas Pertanian dan Peternakan	26.142.846.242
26	Dinas Perkebunan	8.424.083.903
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.465.696.746
28	Sekretariat Daerah	71.739.910.979
29	Sekretariat DPRD	96.068.063.831
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.552.363.446
31	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	345.429.542.392
32	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	15.039.119.395
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.013.587.010
34	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.651.665.398
35	Inspektorat	17.075.898.167
36	Kecamatan BTS ULU	2.879.311.068
37	Kecamatan Muara Kelingi	3.457.707.877
38	Kecamatan Muara Lakitan	2.957.723.480
39	Kecamatan Jayaloka	2.670.031.041
40	Kecamatan Megang Sakti	4.163.330.499
41	Kecamatan Sukakarya	1.556.127.490
42	Kecamatan Tuah Negeri	1.646.585.700
43	Kecamatan Tugumulyo	3.878.165.950
44	Kecamatan Purwodadi	3.943.203.615
45	Kecamatan STL ULU Terawas	2.694.405.078
46	Kecamatan Sumber Harta	2.368.313.250
47	Kecamatan Muara Beliti	2.233.103.119
48	Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	1.552.597.923
49	Kecamatan Selangit	2.820.967.245
50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	34.061.767.160
Jumlah		2.032.113.457.780

Adapun rencana program/kegiatan pembangunan dalam perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 beserta pergeseran/alokasi anggaran sesuai urusan pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah diuraikan secara rinci pada tabel berikut:

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 merupakan bagian dari upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Berangkat dari kebutuhan yang terangkum dari hasil pengendalian dan evaluasi berjalannya program/kegiatan dan kerangka pendanaan, melalui Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas. Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 akan membantu dalam mendorong tercapainya tujuan pembangunan Musi Rawas sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026

Dalam implementasi dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023, diperlukan konsistensi dan komitmen seluruh OPD serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga tercapai sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Selanjutnya, dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023.

Muara Beliti, 28 Juli 2023

BUPATI MUSI RAWAS,

